



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2022**

LPPD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk.....	3
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/kelurahan	7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	8
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	13
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	13
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	20
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	26
d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	29
e. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja.....	44
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	46
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	50
2.1 Capaian Kinerja Makro	50
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	51
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	52
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	53
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	53
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	53
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	53
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja .	55



2.3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	59
2.3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	59
2.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	95
2.3.6	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja ..	98
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		99
3.1	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	99
3.2	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten	100
3.3	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	102
3.3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi.....	102
3.3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten	106
3.3.3	Permasalahan dan Kendala	107
3.3.4	Saran dan Tindak Lanjut	107
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL		108
4.1	Urusan Pendidikan	108
4.2	Urusan Kesehatan	120
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	140
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	146
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	150
4.6	Urusan Sosial	156
4.7	Program dan Kegiatan	161
BAB V PENUTUP		171

DAFTAR LAMPIRAN

Indikator Kinerja Kunci Hasil (*outcome*) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD Tahun 2021

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output*) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD Tahun 2021

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Terhadap LPPD Tahun 2021



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	4
Tabel 1.2	Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	4
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Wajib Ktp Dan Kepemilikan KTP.....	6
Tabel 1.6	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020	7
Tabel 1.7	Pns Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	12
Tabel 1.8	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.....	13
Tabel 1.9	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021	21
Tabel 1.10	Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi	24
Tabel 1.11	Tematik Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.....	28
Tabel 1.12	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi	30
Tabel 1.13	Perubahan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi....	38
Tabel 1.14	Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Banyuwangi 2021	45
Tabel 1.15	Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Dasar di Kab Banyuwangi.....	48
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Banyuwangi	50
Tabel 3.1	Tugas Pembantuan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021	101
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.....	102
Tabel 3.3	Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pendidikan	106
Tabel 3.4	Solusi atas Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pendidikan	107
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	108
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	109
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	110
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Tahun 2021.....	111
Tabel 4.5	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	121
Tabel 4.6	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	123
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	124
Tabel 4.8	Dukungan Personil Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2021	125
Tabel 4.9	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	141
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	141
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	142
Tabel 4.12	Alokasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup.....	143
Tabel 4.13	Daftar Pegawai PNS dan THL Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	143
Tabel 4.14	Daftar Dukungan Personil SPM Dinas Lingkungan Hidup 2021.....	144
Tabel 4.15	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....	147
Tabel 4.16	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	147
Tabel 4.17	Alokasi Anggaran SPM Dinas PUCKPP Tahun 2021	148
Tabel 4.18	Daftar Pegawai PNS dan THL DPUCKPP Kab. Banyuwangi Tahun 2021 ..	149
Tabel 4.19	Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	151



Tabel 4.20	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	152
Tabel 4.21	Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	152
Tabel 4.22	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi ..	153
Tabel 4.23	Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kab Banyuwangi	154
Tabel 4.24	Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	155
Tabel 4.25	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	157
Tabel 4.26	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial.....	158
Tabel 4.27	Alokasi anggaran pencapaian SPM Dinas Sosial PPKB Tahun 2021.....	159
Tabel 4.28	Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan	161
Tabel 4.29	Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan	163
Tabel 4.30	Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum	165
Tabel 4.31	Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat	165
Tabel 4.32	Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	166
Tabel 4.28	Program dan Kegiatan Bidang Sosial	168



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Linieritas Misi dan Tujuan.....	23
Gambar 1.2 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab Banyuwangi	28



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah salah satu sumber utama informasi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan mendapatkan *feedback* bagaimana asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilaksanakan dan diimplementasikan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Januari 2022 Nomor 120.04/926/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra-Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2021 di beberapa bidang sudah berjalan cukup baik. Meskipun ada beberapa bidang yang belum optimal dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan tetapi juga sektor ekonomi, pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan serta hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dibawah koordinasi Kepala Daerah.



Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dan berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi oleh Pemerintah Pusat.

Banyuwangi, Maret 2022

BUPATI BANYUWANGI



IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pada dasarnya pembentukan suatu daerah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban maka peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah dapat terlaksana. Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu dilakukan. Dengan terbentuknya Kabupaten Banyuwangi, kewenangan daerah sebagai daerah otonom akan terintegrasi dan terlaksana dengan pemerintah pusat dan daerah serta mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan.

Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang-Undang yang ada adalah mengacu pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UndangUndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat,



dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $7^{\circ} 43'$ - $8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53'$ – $114^{\circ} 38'$ Bujur Timur. Adapun batas administratif wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Situbondo;
- Sebelah Timur Selat Bali;
- Sebelah Selatan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso

Wilayah Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan, yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas :

- a) Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;



- b) Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;
- c) Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
- d) Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
- e) Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
- f) Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 5.782,50 km², masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak jika dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta memiliki pulau sebanyak 13 buah.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 mencapai 1.750.778 jiwa, dengan komposisi 875.108 jiwa penduduk laki-laki dan 875.670 jiwa penduduk perempuan.



Secara rinci sebaran jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dapat disajikan pada tabel berikut :

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	2	3	4	5	6
1	Pesanggaran	27.910	27.764	55.674	20.846
2	Bangorejo	33.842	33.410	67.252	24.792
3	Purwoharjo	35.551	35.105	70.656	26.215
4	Tegaldlimo	34.432	33.898	68.330	25.004
5	Muncar	69.861	68.769	138.630	49.665
6	Cluring	40.175	39.829	80.004	29.590
7	Gambiran	34.059	34.390	68.449	24.354
8	Srono	50.028	49.536	99.564	36.789
9	Genteng	48.047	47.406	95.453	32.939
10	Glenmore	38.493	39.147	77.640	28.140
11	Kalibaru	33.203	33.528	66.731	24.097
12	Singojuruh	26.254	26.411	52.665	19.792
13	Rogojampi	28.349	29.028	57.377	21.425
14	Kabat	32.617	32.522	65.139	24.317
15	Glagah	18.372	18.919	37.291	14.420
16	Banyuwangi	58.863	60.725	119.588	42.007
17	Giri	15.609	15.915	31.524	11.861
18	Wongsorejo	39.436	39.721	79.157	30.061
19	Songgon	29.452	29.459	58.911	22.131
20	Sempu	43.041	43.011	86.052	30.942
21	Kalipuro	42.500	42.683	85.183	31.667
22	Siliragung	25.346	24.720	50.066	18.266
23	Tegalsari	26.643	26.257	52.900	19.106
24	Licin	15.120	15.055	30.175	12.028
25	Blimbingsari	27.905	28.462	56.367	21.565
Jumlah		875.108	875.670	1.750.778	642.019

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi Tahun 2021

Potensi jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang merupakan usia produktif dilihat dari jumlah usia angkatan kerja yakni dari usia 20 sampai 59 tahun sejumlah 58.6%. Selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 1.2
STRUKTUR PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH JIWA	%
1	0 s/d 4	80.402	4,59
2	5 s/d 9	115.717	6,61
3	10 s/d 14	129.427	7,39
4	15 s/d 19	127.417	7,28



5	20 s/d 24	134.385	7,28
6	25 s/d 29	125.947	7,19
7	30 s/d 34	119.792	6,84
8	35 s/d 39	121.901	6,96
9	40 s/d 44	137.105	7,83
10	45 s/d 49	135.731	7,75
11	50 s/d 54	136.639	7,80
12	55 s/d 59	114.401	6,53
13	60 s/d 64	92.281	5,27
14	65 s/d 69	66.112	3,78
15	70 s/d 74	49.475	2,83
16	75 Ke Atas	64.046	3,66
JUMLAH		1.750.778	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi Tahun 2021

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Banyuwangi terbanyak adalah pertanian/ peternakan/ perikanan sebanyak 324.770 jiwa atau sebesar 22,79%. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 1.3
JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA
MENURUT LAPANGAN USAHA DAN JENIS KELAMIN

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH	%
1	Belum/Tidak Bekerja	65.572	4,60
2	Mengurus Rumah Tangga	245.227	17,21
3	Pelajar/Mahasiswa	206.685	14,50
4	Pertanian/ Peternakan/	324.770	22,79
5	Perdagangan	54.731	3,84
6	Industri	3.254	0,23
7	Jasa Kemasyarakatan	5.707	0,40
8	Konstruksi	3.076	0,22
9	Pemerintahan	37.820	2,65
10	Swasta	301.464	21,15
11	Wiraswasta	176.435	12,38
12	Lainnya	491	0,03
Jumlah		1.425.232	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi Tahun 2021

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banyuwangi masih didominasi oleh tingkat pendidikan tamat SD dengan sebesar 530.124 penduduk. Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang lain diuraikan dalam tabel berikut :



TABEL 1.4
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak Sekolah	501.780
2	SD/Sederajat	530.124
3	SLTP/Sederajat	311.774
4	SLTA/Sederajat	333.686
5	Diploma	16.480
6	Strata I	54.131
7	Strata II	2.679
8	Strata III	124
Jumlah		1.750.778

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi Tahun 2021

Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 adalah 1.348.469 dan jumlah kepemilikan KTP di Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 adalah 1.322.073 (99%). Rincian Jumlah penduduk wajib KTP dan kepemilikan KTP di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.5
JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP DAN KEPEMILIKAN KTP

NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	MEMILIKI KTP	SUDAH REKAMAN
1	Pesanggaran	43.083	42.259	42.259
2	Bangorejo	52.523	51.561	51.561
3	Purwoharjo	55.928	54.906	54.906
4	Tegaldlimo	53.724	52.758	52.758
5	Muncar	106.615	104.592	104.592
6	Cluring	62.307	61.176	61.176
7	Gambiran	52.855	51.935	51.935
8	Srono	76.870	75.323	75.323
9	Genteng	72.243	70.705	70.705
10	Glenmore	60.061	58.833	58.833
11	Kalibaru	51.131	50.089	50.089
12	Singonjuruh	40.515	39.696	39.696
13	Rogojampi	44.300	43.418	43.418
14	Kabat	49.590	48.554	48.554
15	Glagah	28.964	28.435	28.435
16	Banyuwangi	90.146	88.247	88.247
17	Giri	24.251	23.801	23.801
18	Wongsorejo	60.578	59.346	59.346
19	Songgon	45.434	44.494	44.494
20	Sempu	65.755	64.520	64.520
21	Kalipuro	64.757	63.370	63.370
22	Siliragung	39.076	38.396	38.396
23	Tegalsari	40.784	40.070	40.070
24	Licin	23.655	23.164	23.164



NO	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KTP	MEMILIKI KTP	SUDAH REKAMAN
25	Blimbingsari	43.324	42.425	42.425
Jumlah		1.348.469	1.322.073	1.322.073

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuwangi Tahun 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/kelurahan

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 25 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6
JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1	Pesanggaran	5	-
2	Siliragung	5	-
3	Bangorejo	7	-
4	Purwoharjo	8	-
5	Tegaldlimo	9	-
6	Muncar	10	-
7	Cluring	9	-
8	Gambiran	6	-
9	Tegalsari	6	-
10	Glenmore	7	-
11	Kalibaru	6	-
12	Genteng	5	-
13	Srono	10	-
14	Rogojampi	10	-
15	Kabat	14	-
16	Singojuhur	11	-
17	Sempu	7	-
18	Songgon	9	-
19	Glagah	8	2
20	Licin	8	-
21	Banyuwangi	-	18
22	Giri	2	4
23	Kalipuro	5	4
24	Wongsorejo	12	-
25	Blimbingsari	10	-
Jumlah		189	28

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2021



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, jumlah perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah 55 (lima puluh lima) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- 3) Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- 5) Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 7) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan perindustrian;
- 10) Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 11) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;



- 12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
- 14) Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
- 15) Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 17) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 19) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
- 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 21) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 22) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 23) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;



- 24) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 25) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- 26) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 27) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 28) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 29) RSUD Blambangan;
- 30) RSUD Genteng;
- 31) Kecamatan Banyuwangi merupakan Kecamatan Tipe A;
- 32) Kecamatan Giri merupakan Kecamatan Tipe A;
- 33) Kecamatan Glagah merupakan Kecamatan Tipe A;
- 34) Kecamatan Wongsorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
- 35) Kecamatan Kalipuro merupakan Kecamatan Tipe A;
- 36) Kecamatan Singojuruh merupakan Kecamatan Tipe A;
- 37) Kecamatan Kabat merupakan Kecamatan Tipe A;
- 38) Kecamatan Rogojampi merupakan Kecamatan Tipe A;
- 39) Kecamatan Songgon merupakan Kecamatan Tipe A;
- 40) Kecamatan Srono merupakan Kecamatan Tipe A;
- 41) Kecamatan Muncar merupakan Kecamatan Tipe A;
- 42) Kecamatan Cluring merupakan Kecamatan Tipe A;
- 43) Kecamatan Purwoharjo merupakan Kecamatan Tipe A;
- 44) Kecamatan Tegaldlimo merupakan Kecamatan Tipe A;
- 45) Kecamatan Pesanggaran merupakan Kecamatan Tipe A;
- 46) Kecamatan Bangorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
- 47) Kecamatan Gambiran merupakan Kecamatan Tipe A;
- 48) Kecamatan Genteng merupakan Kecamatan Tipe A;
- 49) Kecamatan Sempu merupakan Kecamatan Tipe A;
- 50) Kecamatan Glenmore merupakan Kecamatan Tipe A;



- 51) Kecamatan Kalibaru merupakan Kecamatan Tipe A;
- 52) Kecamatan Licin merupakan Kecamatan Tipe A;
- 53) Kecamatan Tegalsari merupakan Kecamatan Tipe A;
- 54) Kecamatan Siliragung merupakan Kecamatan Tipe A;
- 55) Kecamatan Blimbingsari merupakan Kecamatan Tipe A.

Adapun unit kerja di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi No. 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi);
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi);
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi) sebanyak 45 (empat puluh lima) unit yang tersebar di 25 (dua puluh lima) kecamatan;
4. Satuan Pendidikan (sesuai Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) di 25 (dua puluh lima) kecamatan;

Sesuai data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2021 jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Banyuwangi adalah 9.219 orang dengan rincian PNS laki – laki sebanyak 4.505 orang dan PNS perempuan sebanyak 4.714 orang. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuwangi telah memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.



Adapun untuk sebaran PNS berdasarkan jenis Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
PNS KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD	36	4	40
2.	SLTP	100	2	102
3.	SLTA	1134	412	1546
4.	D I	15	59	74
5.	D II	70	50	120
6.	D III	200	798	998
7.	D IV	31	23	54
8.	S 1	2767	3292	6059
9.	S 2	133	60	193
10.	Dokter Spesialis	16	13	29
11.	S 3	3	1	4
TOTAL		4505	4714	9219

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS berpendidikan paling banyak adalah S1 dengan jumlah 2767 pria dan 3292 wanita. Untuk jumlah PNS S2 sebanyak 133 pria dan 60 wanita sedangkan untuk PNS S3 sebanyak 3 pria dan 1 wanita. Tingginya pendidikan aparatur pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan terhadap jalannya roda pemerintahan yang baik. Dengan banyaknya jumlah PNS yang memiliki pendidikan tinggi di Kabupaten Banyuwangi dapat membantu dan melancarkan jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 yang belum teraudit atau unaudited bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2021 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer. Jumlah pagu anggaran belanja daerah Tahun 2021 sebanyak Rp.



3.314.730.486.501,15 dan terealisasi sebanyak Rp. 3.093.493.032.676.90 atau mencapai 93.32%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8
REALISASI BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Operasi	2.169.650.952.044,15	1.986.096.128.899,29	91.54
2.	Belanja Modal	686.471.199.830,00	661.111.566.009,61	96.31
3.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000.00	29.019.869.108,00	72.55
4.	Belanja Transfer	418.608.334.627,00	417.265.468.660,00	99.68
TOTAL		3.314.730.486.501,15	3.093.493.032.676.90	93.32

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2021

Berdasarkan data pengelolaan belanja Kabupaten Banyuwangi masing – masing komponen belanja telah diarahkan dan memihak pada kepentingan publik. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama dikondisi pandemi Covid-19. Penggunaan belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas yang mendukung program – program strategis. Belanja daerah memprioritaskan belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi, meskipun terjadi dinamika ekonomi global saat pendemi Covid-19. Disamping itu inovasi – inovasi terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan jenis kegiatan. Adanya peningkatan daya kreativitas dan dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Permasalahan Kabupaten Banyuwangi dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - a) Prosentase jalan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun semakin menurun, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :



- Sistem drainase sepanjang jalan yang tidak sempurna;
 - Masih kurang dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
 - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menangani kawasan kumuh.
- b) Ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) :
- Tingginya laju erosi dan sedimentasi;
 - Tingkat kerusakan lahan.
- c) Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis
Faktor yang menyebabkan jaringan irigasi proporsinya berkurang dalam setiap tahun :
- Seiring berjalannya waktu terjadi pengurangan fungsi saluran;
 - Terkena longsor pada tebing saluran;
- d) Peningkatan jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi baik.
Bangunan pelayanan publik yang berfungsi dengan baik berkurang kuantitasnya pada setiap tahun yang dipengaruhi oleh banyak lokasi yang akan dibangun namun tanahnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
-
- 3) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
-
- 4) Urusan Sosial :
- a) Capaian indikator prosentase angka PMKS turun drastis dengan melakukan berbagai kegiatan bantuan seperti pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan, putus sekolah, warga miskin dan usia jompo.
- b) Kurangnya pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana pada seluruh anggota tagana.



- 5) Urusan Tenaga Kerja :
 - a) Seiring melonjaknya jumlah pengangguran di Kabupaten Banyuwangi dan menurunnya tingkat kesempatan kerja;
 - b) Kondisi perekonomian yang ada tentu juga mempengaruhi kinerja ekonomi sektoral dan pada akhirnya juga mempengaruhi pasar tenaga kerja;
 - c) Kenaikan jumlah angkatan kerja, transformasi struktur ekonomi serta korelasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal;
 - d) Adanya potensi pelonjakan angka pengangguran sebagai imbas dari pandemi Covid-19.
- 6) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a) Masih banyaknya kenakalan pada anak yang diakibatkan peran dari orang tua kurang peduli pada kebutuhan setiap hari anak;
 - b) Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
- 7) Urusan Pangan :
 - a) Kurangnya edukasi dan pemasaran;
 - b) Menurunnya mutu pangan olahan dari segi sensoris (rasa, bau, warna dan tekstur) nilai gizi dan nutrisi serta tampilan pangan olahan tersebut;
 - c) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 8) Urusan Lingkungan Hidup :

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar yang belum maksimal.
- 9) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - a) Permasalahan yang banyak muncul pada urusan wajib umumnya adalah dalam hal kelancaran pelayanan masyarakat, disebabkan oleh banyaknya permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan : pindah keluar, pindah datang penduduk, KK yang datanya kosong, perekam KTP-el, pencetakan KTP-el dan akta -akta catatan sipil peristiwa penting lainnya;



- b) Permasalahan pelayan juga disebabkan oleh kelancaran jaringan dalam proses pelayanan melalui (SIAK).
- 10) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
- a) Kurang optimalnya pemberdayaan usaha lembaga ekonomi perdesaan;
 - b) Manajemen BUM Desa yang belum optimal sehingga melakukan pelatihan mengenai ketrampilan manajemen;
 - c) Berkurangnya fungsi dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan seperti Posyandu dan Kelompok Masyarakat Produktif.
- 11) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana :
- a) Pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan Lintas Sektor terkait yang masih belum optimal;
 - b) Kurang dukungan dan motivasi dari segenap jajaran Pemkab dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya;
 - c) Kurangnya pemahaman dan informasi bagi penduduk mengenai fungsi dan kegunaan KB.
- 12) Urusan Komunikasi dan Informatika :
- a) Penyediaan akses informasi bagi masyarakat melalui media Lembaga komunikasi publik radio milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal;
 - b) Masih kurangnya pemahaman masyarakat milenial akan tata cara, fungsi dan tantangan dalam berkomunikasi di era digital ini.
- 13) Urusan Perhubungan :
- a) Kurang adanya terobosan dalam pendanaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - b) Kasadaran masyarakat akan berlalu lintas masih kurang hal tersebut dikarenakan rambu lalu lintas yang kurang adanya pemeliharaan.



14) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- a) Mengadakan revitalisasi dengan harapan agar menumbuhkan pemahaman bahwa koperasi bukan hanya sekedar lembaga pemberi pinjaman tetapi juga dapat mensejahterakan anggotanya;
- b) Rendahnya Sumber Daya Manusia serta minimnya pengetahuan tentang perkoperasian;
- c) Masih minimnya koperasi serba usaha yang hanya memiliki satu usaha yaitu simpan pinjam, karena pada jaman sekarang banyak sektor perbankan yang menyediakan penawaran lebih beragam dan juga sudah menjangkau pelosok masyarakat.

15) Urusan Penanaman Modal :

Masih belum maksimal pelayan mengenai kemudahan, kelancaran dan kecepatan dalam proses penanaman modal atau perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyuwangi;

16) Urusan Statistik :

- a) Masih ada anggapan sulit untuk mencari dan mempermudah akses pencarian data;
- b) Tenaga teknis IT pada setiap SKPD Kabupaten Banyuwangi masih kurang memahami dan harus diberikan pembekalan mengenai pengolahan dan penyusunan data/statistik sektoral.

17) Urusan Persandian :

- a) Kurang terpenuhinya pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
- b) Perlu ditingkatkan kapasitas teknologi keamanan informasi dan pengembangan pelayanan keamanan informasi.

18) Urusan Kebudayaan :

Belum maksimalnya pengenalan budaya daerah Banyuwangi kepada dunia luar agar lebih menarik wisatawan.



19) Urusan Perpustakaan :

- a) Akses masyarakat dan pelajar untuk mendapatkan layanan perpustakaan keliling dengan menggunakan mobil belum terlaksana secara menyeluruh keberbagai daerah;
- b) Jumlah PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih terbatas sehingga masih dibantu THL;
- c) Minat membaca dan belajar dari masyarakat serta pelajar masih sedikit sehingga perlu adanya penambahan jumlah koleksi bahan pustaka.

20) Urusan Kearsipan :

Kurangnya pengetahuan dari perangkat desa tentang pengelolaan dan penyimpanan arsip secara benar serta restorasi agar tetap terjaga keasliannya.

21) Urusan Kelautan dan Perikanan :

- a) Pemahaman atas budidaya perikanan dan perawatannya masih kurang;
- b) Produksi benih ikan yang harganya murah seperti ikan lele dan tombro mengalami penurunan.

22) Urusan Pariwisata :

- a) Kurang Optimalnya peran mitra pariwisata dalam mendukung kunjungan wisatawan, daya tarik wisata dan lama tinggal wisatawan di Banyuwangi;
- b) Pengembangan destinasi seperti meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta SDM pariwisata.

23) Urusan Pertanian :

- a) Ketersediaan Infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air yang belum memadai;
- b) Harga komoditas pertanian cenderung fluktuatif akibat ketersediaan di pasar bergantung musim dan kondisi alam;
- c) Semakin bertambahnya alih fungsi lahan pertanian dalam setiap tahun.

24) Urusan Perdagangan :

- a) Tidak ada resi yang diterbitkan karena gudang SRG belum beroperasi disebabkan belum adanya pengelola yang ditunjuk;



- b) Belum optimalnya penguatan pada kelembagaan kelompok pedagang pasar;
- 25) Urusan Perindustrian :
- a) Kurangnya inovasi para pelaku industry dalam menciptakan dan mengembangkan produk industry;
 - b) Berkurangnya jumlah unit usaha IKM yang tersebar di Kecamatan Srono, Muncar, Glenmore dan Rogojampi.
- 26) Urusan Transmigrasi :
- a) Kurangnya wawasan dan ketrampilan bagi calon transmigran yang akan melakukan keberangkatan dalam jangka waktu dekat;
 - b) Penyuluhan mengenai transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjangkau semua pihak.
- 27) Urusan Pemerintahan Umum :
-
- 28) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik :
-
- 29) Urusan Perencanaan :
- a) Perlu adanya bahan analisis apakah ada kemungkinan bahwa target yang ditentukan sebelumnya memang layak ataukah ada kecenderungan target yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan kemampuan kinerja yang dikerjakan dimasa tahun berjalan;
 - b) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu.
- 30) Urusan Keuangan :
- a) Dari ke enam indicator dalam urusan keuangan ada satu yang tidak mencapai target yaitu potensi pendapatan daerah;
 - b) Kurangnya peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
 - c) Permasalahan muncul dari sector pajak yaitu penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan menyebabkan belanja biaya



pemungutan serta belanja insentif pemungut pajak daerah juga tidak dapat terserap dengan maksimal.

31) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan :

Perlunya bahan analisis apakah ada kemungkinan bahwa target yang ditentukan sebelumnya memang layak atukah ada kecenderungan target yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan kemampuan kinerja yang dikerjakan dimasa tahun berjalan.

32) Urusan Penelitian dan Pengembangan :

Perlunya bahan analisis apakah ada kemungkinan bahwa target yang ditentukan sebelumnya memang layak atukah ada kecenderungan target yang terlalu rendah jika dibandingkan dengan kemampuan kinerja yang dikerjakan dimasa tahun berjalan.

33) Urusan staf dan Pengawasan :

- a) Keuangan daerah dan administrasi pada wilayah Irban I dan II mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya;
- b) Keterbatasan anggaran dalam peningkatan pelaksanaan tupoksi pengawasan.

34) Urusan Sekretariat :

Persentase kajian keagamaan dan kemasyarakatan masih belum bias berjalan dengan optimal karena belum mencapai target.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 3.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:



“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banyuwangi dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

**TABEL 1.9
PERWUJUDAN VISI RPJMD KABUPATEN BANYUWANGI 2016-2021**

VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas SDM Banyuwangi	Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.
	Meningkatnya perekonomian Daerah	Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan,



VISI	PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN PILAR-PILAR VISI
		perkebunan, dan hortikultura, 2) Pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.
	Masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera berlandaskan semangat gotong royong	Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
	Kemandirian Masyarakat & Daerah	Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

Sumber : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2021 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021:

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial;



- d. Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good And Clean Governance*) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

Lima butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi terpilih kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Merujuk terhadap revisi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, selain berorientasi terhadap penyempurnaan RPJMD dikarenakan perubahan regulasi dari Permendagri 54 Tahun 2010 ke Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat perubahan perspektif atau sudut pandang terhadap pencapaian Visi Kabupaten Banyuwangi tahun 2021.

Misi ke 3 Bupati Kabupaten Banyuwangi yakni “Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik, Ekonomi, dan Sosial” yang sebelumnya diorientasikan sebagai sebuah tujuan utama, dalam perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi berubah perspektifnya sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga 5 Misi politis Bupati Kabupaten Banyuwangi mengalami rekonstruksi kedalam Misi Pembangunan. Berikut merupakan linieritas Misi Politis dan Misi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 1.1. Linieritas Misi dan Tujuan

Tiga butir Misi Pembangunan di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemukan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi. Berikut

digambarkan konstruksi substansi misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Hal ini didasarkan pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pada Pasal 166 Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut: (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah, (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung, (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran RPJMD. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang merujuk pada perubahan RPJMD ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1.10
MATRIK HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUWANGI

MISI		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,	1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	1	Indeks Pendidikan
					2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	2	Indeks Kesehatan



MISI		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya				3	Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan	3	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)
II	Optimalisasi sumber daya untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang	4	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
					5	Bertambahnya Nilai Investasi	5	Pertumbuhan Nilai Investasi
							6	Tingkat Pengangguran Terbuka
					6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
3	Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7	Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan	8	Indeks Gini Indeks		
					8	Menjamin Perlindungan Sosial	9	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
					9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	10	Pembangunan Masyarakat (IPMas)
							11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
							12	Indeks Desa Membangun (IDG)
III	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good And Clean Governance) Serta Layanan Publik	4	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	13	Nilai SAKIP
							14	Indeks RB
							15	Opini WTP BPK terhadap LKPD



MISI		Tujuan			Sasaran Strategis			
		No	Uraian	Indikator Kinerja	No	Uraian	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi				11	Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah	16	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mengingat RPJMD Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan penyesuaian atau perubahan, maka strategi yang dihasilkan juga merupakan strategi baru yang telah disesuaikan sebagaimana isu yang berhasil diidentifikasi. Jumlah strategi yang dimuat dalam Perubahan RPJMD berjumlah 10 strategi meliputi :

Strategi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang berdaya saing yang tidak hanya bertumpu terhadap pendidikan formal melalui penanaman dan penguatan pendidikan karakter dan berfokus terhadap menciptakan sumber daya manusia yang kreatif

Strategi 2: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi baik dalam Preventif, Represif, maupun Kuratif melalui Penyediaan Sarana, Prasarana dan Tenaga Medis Berkualitas

Strategi 3: Meningkatkan kualitas belanja masyarakat baik pada sektor pangan dan non pangan melalui stabilisasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi dan penguatan sektor strategis Kabupaten Banyuwangi

Strategi 4: Intergrasi Pengembangan Potensi Unggulan Sebagai Daya tarik Investasi Melalui Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Poros Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang Berkelanjutan



- Strategi 5:** Efektivitas modal investasi masuk di Kabupaten Banyuwangi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi padat karya sebagai tumpuan utama pembangunan
- Strategi 6:** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Aksesibilitas, Akses Barang-Jasa Hulu ke Hilir, Dan Stimulasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- Strategi 7:** Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS
- Strategi 8:** Optimalisasi Penguatan Modal Sosial Pengarusutamaan Gender
- Strategi 9:** Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan
- Strategi 10:** Meningkatkan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan inovasi layanan di segala bidang

Melihat arsitektur arah kebijakan serta uraian arah kebijakan yang ada pada perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pada tahun 2021 yang tercermin dalam tematik pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 adalah : **“Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Banyuwangi”**. Arah kebijakan menaungi beberapa penekanan pada proses implementasi strategi karena pada tahun 2021, semua strategi masih dalam proses implementasi. Dari 10 strategi yang diimplementasikan, terdapat 6 strategi yang memiliki perhatian lebih. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2021, proses implementasi 4 strategi lainnya sudah berada pada tahap akhir, jadi penekanannya hanya pada mempertahankan kinerja. Berikut merupakan 6 strategi yang masih menjadi perhatian utama, yaitu strategi 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Namun setelah mempertimbangkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, serta proses sinkronisasi dengan tematik aprovinsi Jawa Timur dan Nasional, maka tematik pembangunan Kabupaten



Banyuwangi Tahun 2021 sedikit mengalami perubahan menjadi :
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Melalui Kebangkitan Pertanian, Pariwisata dan Penguatan SDM.”

GAMBAR 1.2
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN
KABUPATEN BANYUWANGI



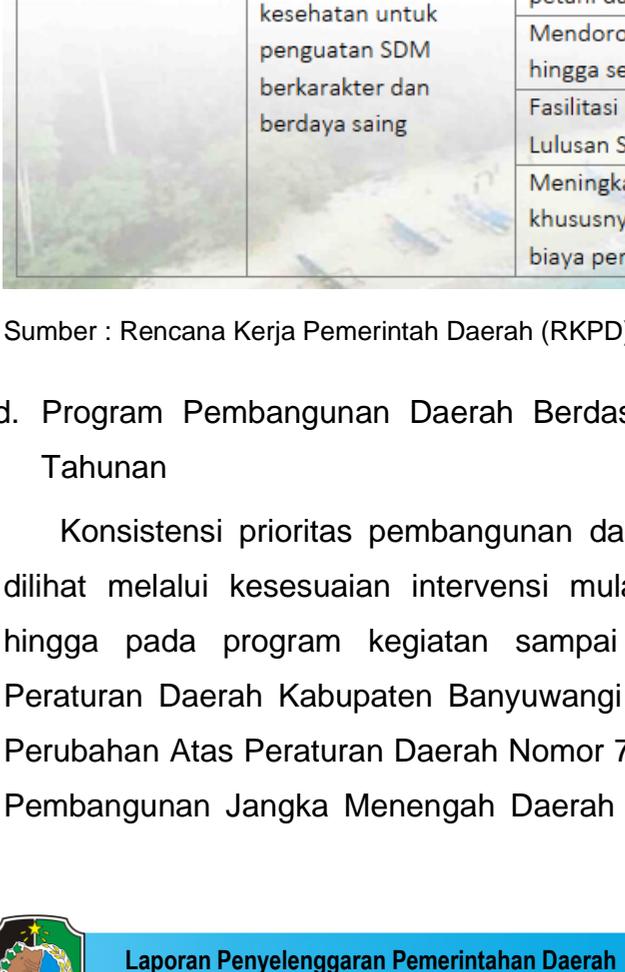
Sumber : RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Tematik dan prioritas pembanguana serta intervensi nya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 1.11
TEMATIK PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUWANGI

Tema	Prioritas Pembangunan	intervensi
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Melalui Kebangkitan Pariwisata, Agropolitan dan Penguatan SDM	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang yang beririsan dengan kawasan strategis nasional	Menyediakan infrastruktur pendukung usaha perikanan dan pertanian (Khususnya Cold Storage, & Lumbung Padi Gapoktan)
		Integrasi antar kawasan pertanian dengan kawasan pariwisata
		Meningkatkan kerjasama antar daerah di bidang ekonomi, khususnya akses pasar untuk sektor pertanian, dan industri dan perdagangan
	Menguatkan kemandirian produktifitas ekonomi lokal bidang pariwisata dan pertanian untuk	Fasilitasi dan Optimalisasi fungsi asuransi pertanian
		Meningkatkan keberdayaan desa
		meningkatkan branding produk olahan khas daerah sebagai cendermata pariwisata



Tema	Prioritas Pembangunan	Intervensi
	menjangkau skala internasional	Mendorong banyuwangi menjadi pusat percontohan/laboratorium pengembangan pertanian (dikhususkan untuk sektor tanaman pangan/hortikultura/Perkebunan) sehingga dapat dijadikan objek pariwisata dan edukasi pertanian.
		Modernisasi teknologi pertanian pada proses produksi (Bibit, metode dan sarana prasarana)
		Membangun kembali citra petani/profesi petani/nelayan/Peternak
		Memangkas rantai distribusi hasil pertanian
		Menjaga kualitas Lingkungan Hidup di Banyuwangi
	Transformasi digital dalam rangka percepatan pelayanan publik, kemudahan perizinan dan	Mempermudah proses pengurusan izin usaha (OSS)
		Pemutakhiran sarpras IT
		Pengembangan aplikasi untuk mendorong orientasi layanan menjadi jemput bola
	Inovasi layanan dasar pendidikan dan kesehatan untuk penguatan SDM berkarakter dan berdaya saing	Meningkatkan kondusifitas kegiatan belajar mengajar
		Mewujudkan Banyuwangi Tangguh Bencana
		Memastikan afirmasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani dan nelayan miskin
		Mendorong sertifikasi kemampuan tenaga kerja hingga setara D1/D2
		Fasilitasi & distribusi tenaga kerja khususnya Lulusan SMK
		Meningkatkan jiwa wirausaha pemuda, khususnya di bidang digital untuk menekan biaya permodalan

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

d. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Konsistensi prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2021 dapat dilihat melalui kesesuaian intervensi mulai dari prioritas pembangunan hingga pada program kegiatan sampai pada kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun



2016-2021, program pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1.12
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

No	Program
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
	Urusan Pendidikan
	Program Peningkatan Akses PAUD
	Program Peningkatan Kualitas PAUD
	Program Peningkatan Akses Pendidikan SD
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SD
	Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat
	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
	Urusan Perpustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Urusan Kearsipan
	Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	Program Pembinaan Kepramukaan
	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
	Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan
	Urusan Kesehatan
	Program Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
	Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat



No	Program
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Program Pelayanan Kesehatan
	Program Sumberdaya Kesehatan
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Bidang Kesehatan)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Blambangan
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Blambangan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD Genteng
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan RSUD Genteng
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana
	Program Ketahanan Keluarga Sejahtera
	Program Pengendalian Penduduk
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan dan non-Pangan
	Urusan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pasar
	Urusan Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan
	Urusan Pertanian
	Program Pengembangan Budidaya dan Usaha Peternakan
	Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner
	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Tanaman Pangan
	Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Perkebunan dan Hortikultura
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
	Urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan
	Urusan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya



No	Program
	Urusan Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi dan Jaringan Kemitraan Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
	Program Penumbuhan Wirausaha Baru
	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro
	Urusan Perindustrian
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Industri Kecil
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri
	Program Pembinaan Industri
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan
	Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan
	Program Rehabilitasi Hutan/Lahan
	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan
6	Bertambahnya Nilai Investasi
	Urusan Penanaman Modal
	Program Pengembangan Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal
	Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Urusan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Penempatan Tenaga Kerja
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
	Urusan Perindustrian
	Program Pembangunan Sumber Daya Industri
7	Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan
	Urusan Perdagangan
	Program Optimalisasi Perdagangan



No	Program
8	Menjamin Perlindungan Sosial
	Urusan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Perlindungan Sosial
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan masyarakat
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan dan Ketertiban Umum
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Satuan Linmas
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Program Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana
	Program Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana
	Program Pemulihan Pasca Bencana
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	Program Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak
	Program Pemberdayaan, Pengarusutamaan Gender Dan Anak
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
	Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga dan Masyarakat Perdesaan
	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
10	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik
	Urusan Perencanaan
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah



No	Program
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	Program Perencanaan Pembangunan Kesra dan Pemerintahan
	Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayah dan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
	Urusan Penelitian dan Pengembangan
	Program Penelitian dan Pengembangan
	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur
	Program Pengendalian Sumberdaya Aparatur
	Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi
	Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur
	Keuangan Keuangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah
	Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
	Staf dan Pengawasan
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Surat Menyurat
	Program Dukungan Kelengkapan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional
	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
	Program Kerjasama Pembangunan
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
	Program Pembentukan Produk Hukum
	Program Peningkatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum
	Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan



No	Program
	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa
	Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ Wakil KDH
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Kesekretariatan Daerah
	Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah
	Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan
	Program Peningkatan Standar Kompetensi dan Disiplin Aparatur
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
	Program Pengembangan Ekinerja
	Program Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan
	Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
	Program Pembinaan Inovasi Daerah
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Bupati/Wakil Bupati
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KDH/WKDH
	Program Dukungan Penyelenggaraan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN I
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN II
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
11	Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah
	Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
	Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika



No	Program
	Program Tatakelola Pengembangan e-Government
	Statistik
	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
	Persandian
	Program Pengamanan Informasi Daerah
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Pependudukan
	Keuangan
	Program Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
	Staf dan Pengawasan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan DPRD
	Pendukung
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	Program Pembangunan Fasilitas Publik
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
	Program Pembangunan Jalan
	Program Pembangunan Jembatan
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi
	Program Pembangunan Trotoar



No	Program
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Sumber Daya Air Lainnya
	Program Pembangunan Sistem Informasi/data Base Sumber Daya Air
	Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Program Pengendalian Banjir
	Program Pemberdayaan Masyarakat
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
	Program Penataan Lingkungan
	Program Penataan Perumahan
	Program Pengendalian Kawasan Kumuh
	Program Pengembangan Rusun dan PSU
	Perhubungan
	Program Pengembangan Angkutan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
	Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan
	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Program Pengelolaan LPJU

Sumber : Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal percepatan Implementasi Sistem Informasi



Pemerintah Daerah, Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan pemetaan program kegiatan 2021 disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

TABEL 1.13

PERUBAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB BANYUWANGI

No	Program
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pengembangan Kurikulum
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
	Urusan Pemerintahan Bidang Arsip
	Program Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
	Program Perizinan Penggunaan Arsip
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengendalian Penduduk
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)



No	Program
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KB)
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan dan non-Pangan
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilitasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
4	Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pembinaan Sejarah
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



No	Program
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pengembangan UMKM
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Pengelolaan Persampahan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
6	Bertambahnya Nilai Investasi
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial



No	Program
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
7	Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Program Stabilitasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
8	Menjamin Perlindungan Sosial
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
9	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan masyarakat
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
	Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak



No	Program
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
10	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Kepegawaian
	Program Kepegawaian Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Keuangan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Program Administrasi Umum
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Wilayah IRBAN III
	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan



No	Program
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
	Program Penatagunaan Tanah
	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11	Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Urusan Pemerintahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Keuangan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Pendukung
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional



No	Program
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengembangan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Urusan Pemerintahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Program Pengelolaan Pelayaran
	Program Pengelolaan Penerbangan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

e. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan



dan sasaran organisasi. Rincian rencana kinerja tahunan Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1.14
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
I	T1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	72.95
	T1. S1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan	%	0.62
	T1. S2. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	Indeks Kesehatan	%	0.81
	T1. S3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan dan non-Pangan	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	%	0.78
II	T2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Perumbuhan Ekonomi	%	5.94
	T2. S4. Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	7.02
	T2. S5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68.39
	T2. S6. Bertambahnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	70
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.98
III	T3. Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan	Angka Kemiskinan		6.55
	T2. S7. Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan	Indeks Gini	%	0.27
	T2. S8. Menjamin Perlindungan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12.1
	T2. S9. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	%	0.70
		Indeks Desa Membangun (IDG)	%	0.82



NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	86.60
IV	T4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93.14
	T4. S10. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	AA
		Indeks RB	%	78
		Opini WTP BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
	T4. S11 Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Skor Indeks	16000

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Lahirnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyempurnakan konsep otonomi daerah di era modern. Dalam undang – undang tersebut, Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah semakin didekatkan kepada warganya dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan semakin seringnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah baik pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi harus berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan



Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Untuk menindaklanjuti amanat undang – undang tersebut maka, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Sehubungan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terbit di pertengahan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, menyebabkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Banyuwangi berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan penjabaran pencapaian target SPM yang harusnya terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tidak dapat dilaksanakan mengingat RPJMD Kabupaten Banyuwangi sudah memasuki tahun ke 5 (lima) pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016– 2021 termasuk perubahannya.

Tahun 2021 adalah tahun transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi mengingat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2021 – 2024 dilakukan pada hari Jum’at, 26 Februari 2021. Sesuai dengan pasal 264 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa : “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. Sehingga pada tanggal 26 Agustus 2021 atas persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi,



Bupati Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 ini masih berdasarkan program kegiatan perangkat daerah tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 termasuk perubahannya. Sedangkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – 2026 sudah mengintegrasikan indikator target penerapan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Di Kabupaten Banyuwangi terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah yang mampu 29 (dua puluh sembilan) jenis – jenis pelayanan dasar daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.15
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PELAYANAN DASAR
DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERANGKAT DAERAH
1.	Pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan
2.	Pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
3.	Pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan kesehatan balita	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Dinas Kesehatan



13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Dinas Kesehatan
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Dinas Kesehatan
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas PU Pengairan
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Lingkungan Hidup
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman
20.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
21.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Dinas Sosial
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Dinas Sosial
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Dinas Sosial
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Dinas Sosial
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Semua data dan capaian kinerja makro didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi maupun Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1
CAPAIAN KINERJA MAKRO KABUPATEN BANYUWANGI

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,62	71,38	0,26
2	Angka Kemiskinan	8,06	8,07	0,12
3	Angka Pengangguran	5,34	5,42	1,50
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3,58	4,08	-213,97
5	Pendapatan Perkapita	81.102,88	85916,02	5,93
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,36	0,37	2,78

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

secara tidak langsung capaian kinerja makro di masing – masing indikator sangat dipengaruhi adanya pandemi covid – 19 yang melanda Indonesia mulai bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jika dilihat dari tren tiap tahunnya, setiap indikator kinerja makro mengalami tren positif mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kinerja makro Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan akibat dampak sosio ekonomi dari pandemi covid – 19. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemic covid – 19, pada tahun 2021 beberapa sektor mengalami peningkatan kinerja yang membaik.



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Adapun *mapping* perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib maupun pilihan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

PER URUSAN PEMERINTAHAN

1	Pendidikan	:	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	:	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	Dinas PU CKPP Dinas PU Pengairan Dinas Lingkungan Hidup
4	Perumahan Rakyat	:	Dinas PU CKPP Bagian Pemerintahan Setda
5	Trantibumlinmas	:	Satpol PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB
7	Tenaga Kerja	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB
9	Pangan	:	Dinas Pertanian dan Pangan
10	Pertanahan	:	Dinas PU CKPP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Pemerintahan Setda
11	Lingkungan Hidup	:	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Capil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



14	Pengendalian Penduduk dan KB	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB
15	Perhubungan	: Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	: Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi dan UKM	: Diskop UKM dan Perdagangan
18	Penanaman Modal	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Pemuda dan Olahraga	: Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	: Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	: Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan	: Dinas Perikanan
26	Pariwisata	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian	: Dinas Pertanian dan Pangan
28	Perdagangan	: Diskop UKM dan Perdagangan
29	Industri	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri
30	Transmigrasi	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri

FUNGSI PENUNJANG

1	Perencanaan dan Keuangan	: Inspektorat : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Pengadaan	: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Kepegawaian	: Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan
4	Manajemen Keuangan	: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	Transparansi Publik	: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output*) dapat dilihat dalam Lampiran Capaian IKK *Output*



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*output*) dapat dilihat dalam Lampiran Capaian IKK *Outcome*

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Pencapaian Indikator Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dalam Lampiran Capaian IKK FPUP.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan perjanjian kinerja akhir RPJMD Kabupaten Banyuwangi mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tujuan Strategis 1			
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skala	72.95
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan			
1.1.1	Indeks Pendidikan	Skala	0.62



Sasaran Strategis 1.2 Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan			
1.2.2	Indeks Kesehatan	Skala	0.81
Sasaran Strategis 1.3 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan dan non-Pangan			
1.3.3	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	Skala	0.78

Tujuan Strategis 2

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Indikator Kinerja		Satuan	Target
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.94
Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan yang berkelanjutan			
2.1.4	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	7.02
Sasaran Strategis 2.2 Bertambahnya Nilai Investasi			
2.2.5	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	70
2.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Skala	2.98
Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
2.3.7	Indeks Kualitas Lingkungan	Skala	68.39

Tujuan Strategis 3

Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3	Angka Kemiskinan	%	6.55
Sasaran Strategis 3.1 Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan			
3.1.8	Indeks Gini	Skala	0.27
Sasaran Strategis 3.2 Menjamin Perlindungan Sosial			
3.2.9	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12.1
Sasaran Strategis 3.3 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
2.3.10	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Skala	0.70
2.3.11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skala	86.60
2.3.12	Indeks Desa Membangun (IDM)	Skala	0.82



Tujuan Strategis 4			
Meningkatkan Kualitas Pelayanan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala	93.14
Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik			
4.1.13	Nilai SAKIP	Predikat	AA
4.1.14	Indeks RB	Skala	78
4.1.15	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP
Sasaran Strategis 4.2 Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah			
3.2.16	Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Indeks	16.000

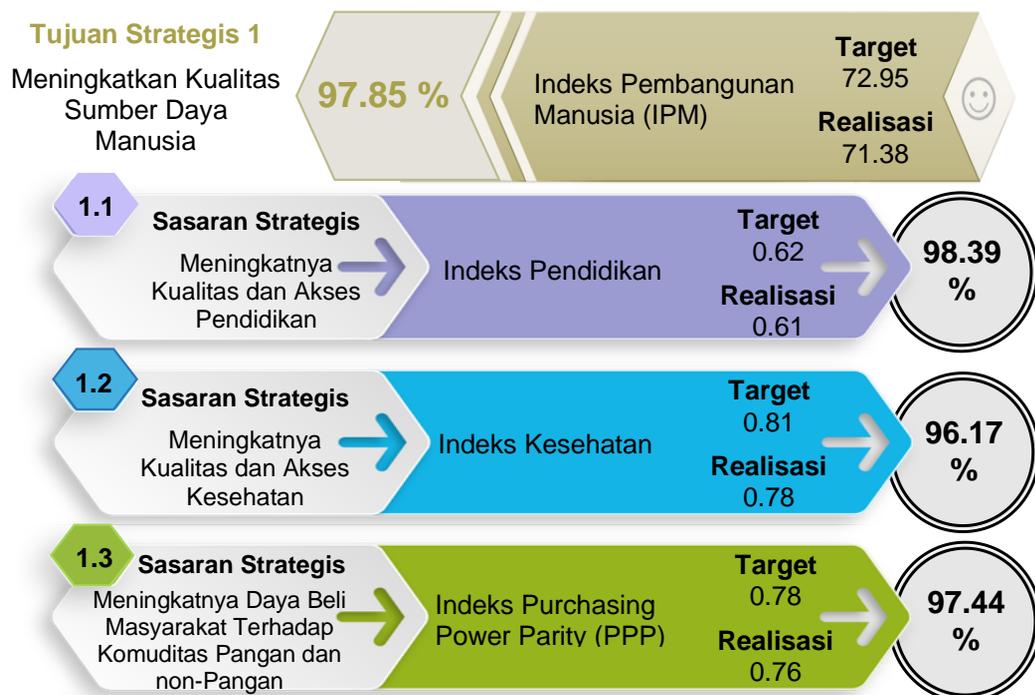
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

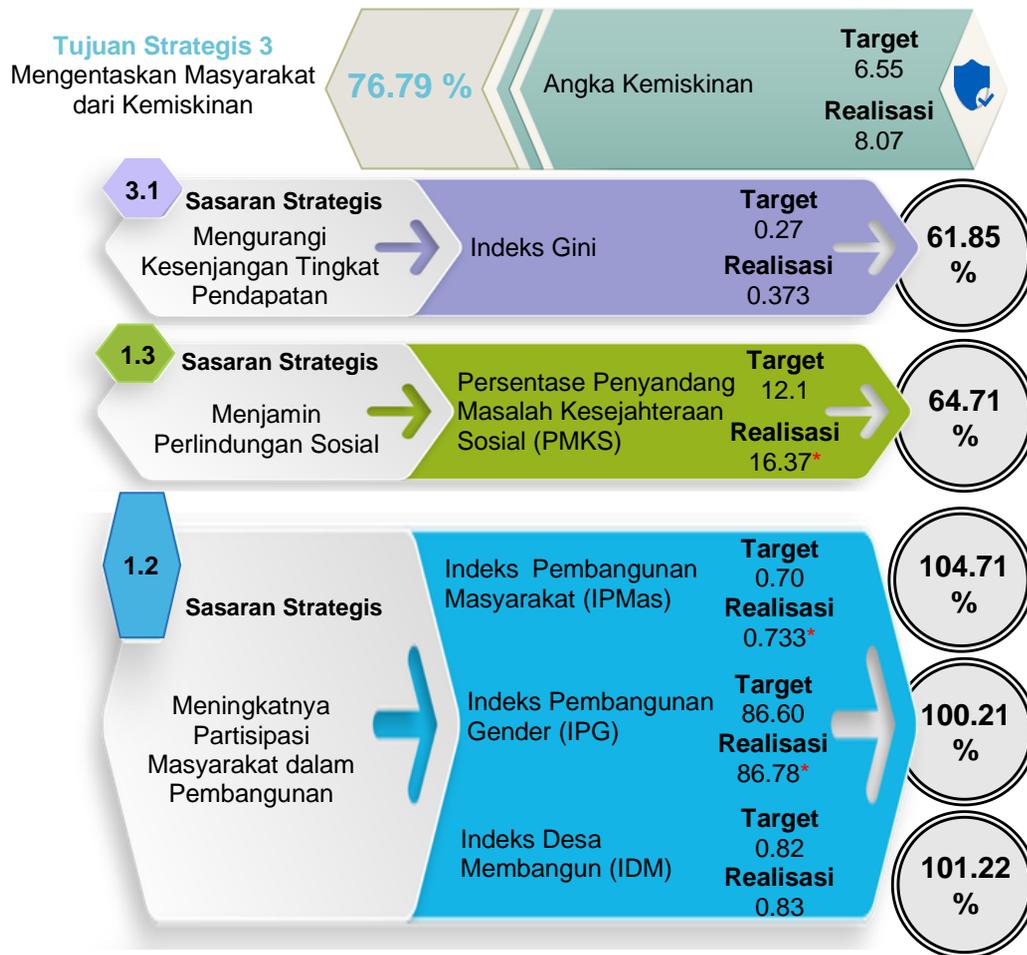
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi Misi Kabupaten Banyuwangi selama periode 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah direview pada tahun 2019 lalu. Nilai akuntabilitas dari capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Tujuan dan IKU Sasaran Strategis.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Utama Tujuan dan 11 Sasaran dengan 16 Indikator Kinerja Utama Sasaran yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Banyuwangi tahun 2021.



**REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021**





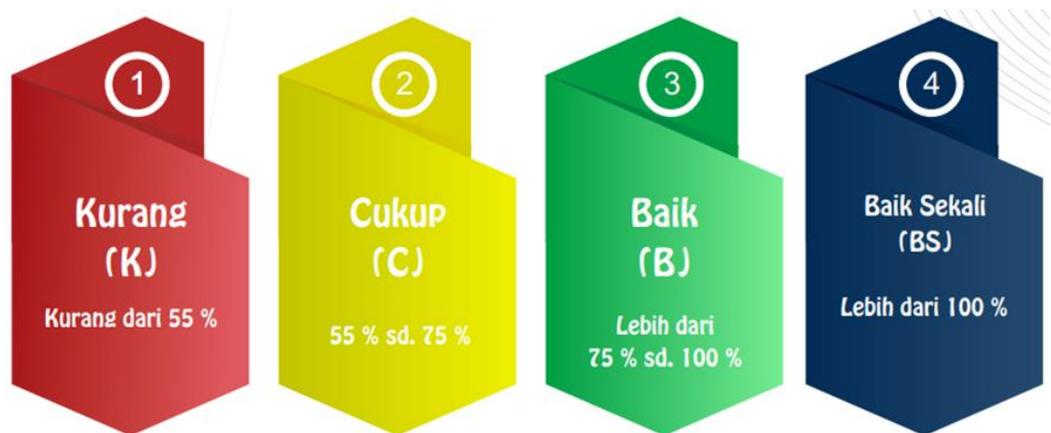
*) Angka Realisasi Sementara, Nilai Realisasi 2021 belum rilis dari BPS

***) Angka Realisasi Tahun 2020, Nilai Realisasi 2021 belum rilis dari kementerian/Lembaga terkait



***) Angka Realisasi mengalami perubahan skala (penilaian sekor indek dari oleh kementerian/lembaga

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 4 indikator kinerja utama tujuan dan 16 indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan pada tahun 2021, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja utama tujuan dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama sasaran terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, selebihnya belum dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Akan tetapi jika dilihat dari tren realisasi hingga akhir RPJMD pada tahun 2021 dan berdasarkan kategori capaian kinerja pada dasarnya sebagian besar indikator menunjukkan progres realisasi yang positif dan terus mengalami peningkatan dengan kategori capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sebagai berikut:



Rata-rata Capaian IKU Tujuan sebesar 85.84 % atau Capaian Kinerja dengan Kategori Baik dengan rincian :

3 IKU (75%) dengan kategori capaian kinerja Baik

1 IKU (25%) dengan kategori capaian kinerja Cukup



Rata-rata Capaian IKU Sasaran sebesar 86.15 % atau Capaian Kinerja dengan Kategori Baik dengan rincian :

4 IKU (25%) dengan kategori capaian kinerja Sangat Baik

8 IKU (50%) dengan kategori capaian kinerja Baik

3 IKU (18.75%) dengan kategori capaian kinerja Cukup

1 IKU (6.25%) dengan kategori capaian kinerja Kurang



2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, perbandingan pengukuran capaian kinerja Kabupaten Banyuwangi dengan tahun sebelumnya tercakup ke dalam perbandingan capaian terhadap target dalam pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan pada sub bab berikutnya.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Ketercapaian sasaran kinerja direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 97.85% kategori capaian kinerja Baik



Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi sebesar 71,38 pada tahun 2021. Angka IPM tersebut naik tipis sebesar 0,76 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,62. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2016-2021 terus menunjukkan kinerja yang positif. Pada awal RPJMD tahun 2016 IPM Kabupaten Banyuwangi masih pada indeks 69,00 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 71,38 dengan capaian kinerja sebesar 98.85% atau kategori capaian kinerja baik.

Adapun indikator yang merupakan dimensi dasar pembentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

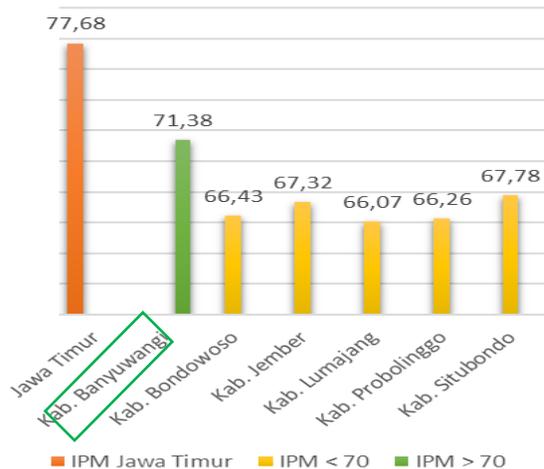
- Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat;



b. Dimensi Pengetahuan Meningkat;

c. Dimensi Standar Hidup Layak.

Sejak adanya pandemi Covid-19 hingga tahun 2021 dampaknya berpengaruh besar terhadap kinerja ekonomi, bahkan kegiatan sosial yang menyebabkan Dimensi Standar Hidup Layak menurun, dan menjadi penyebab melambatnya laju capaian IPM.



Tahun 2021 IPM Kabupaten Banyuwangi masih menempati urutan 21 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten terdekat dan IPM Kabupaten Banyuwangi masih menunjukkan status pembangunan manusia dalam kategori menengah keatas.

Dalam pencapaian tujuan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, didukung oleh tiga sasaran pembangunan:

Sasaran ke-1

Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan
Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Pendidikan



Tahun 2021

Target
0.62

Realisasi
0.61

98.39 %

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 pada indikator indeks pendidikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, realisasi tahun 2021 sebesar 0.61 dengan capaian kinerja sebesar 98.39% atau kategori capaian kinerja baik.



INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT KOMPONEN TAHUN 2016-2021

Harapan Lama Sekolah (HLS)

menunjukkan nilai positif dapat diartikan bahwa banyak penduduk Kabupaten Banyuwangi yang melanjutkan sekolah pada level yang lebih tinggi, adapun capaian pada tahun 2021 mencapai 13.10 tahun.

Dengan capaian tersebut dapat diketahui minimal pendidikan anak Kabupaten Banyuwangi sampai dengan Diploma 1.



Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

juga menunjukkan nilai positif pada tiap tahunnya. Tahun 2021 rata-rata penduduk Kabupaten Banyuwangi pada usia 25 tahun keatas telah menyelesaikan pendidikan selama 7,42 tahun atau setara dengan masuk kelas VII.



Program Pendukung Peningkatan Indeks Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi :

 Dinas Pendidikan	 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<ul style="list-style-type: none">• Program Pengelolaan Pendidikan• Program Pengembangan Kurikulum• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan• Program Pengendalian Perizinan Pendidikan• Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	<ul style="list-style-type: none">• Program Pembinaan Perpustakaan• Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno• Program Pengelolaan Arsip• Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan Indeks Pendidikan ditengah pandemi Covid-19 tidak lepas dari upaya konsistensi, kolaboratif dan terus berinovasi dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pada bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus berupaya memastikan kualitas dan akses pelayanan bidang pendidikan bagi anak- anak Banyuwangi tetap terjamin meskipun pada tahun 2021 pandemi Covid-19 belum selesai yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan menjadi sangat berat karena terdapat batasan-batasan dan penyesuaian – penyesuaian dengan kondisi yang ada.

Capain kinerja tersebut diperoleh dari terus menumbuhkan dan mengembangkan inovasi – inovasi di bidang pendidikan diantaranya:

Melaksanakan gerakan masyarakat penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) dan Sahabat Dikmas yang kegiatannya melibatkan Forimda, Forpimka, dan semua stekholder di bidang pendidikan, dan pelaksanaan Akselerasi Sekolah Masyarakat (AKSARA)

Wujudkan Generasi Cerdas

- ✓ Lebih dari **Rp. 4,5 MILIAR** beasiswa kuliah
- ✓ **1.197 PELAJAR** terima bantuan uang saku dan transportasi
- ✓ **892 PELAJAR** terima bantuan antisipasi anak putus sekolah



Banyuwangi Berkah



- ✓ Insentif untuk **12.373 GURU NGAJI**
- ✓ Lebih dari **Rp. 17 MILIAR** bantuan pesantren dan operasional rumah ibadah

Banyuwangi Cerdas
Melaksanakan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meningkatkan kualitas secara akademis bagi warga kurang mampu berupa Bantuan uang saku, bantuan biaya hidup, bantuan biaya transport dan beasiswa mahasiswa berestasi tidak mampu, siswa Asuh Sebaya (SAS), Program Garda Ampuh (Gerakan angkat anak muda putus sekolah, Smart Better) dan tetap konsisten dikembangkan hingga sekarang.

Sasaran ke-2

Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kesehatan



Tahun 2021

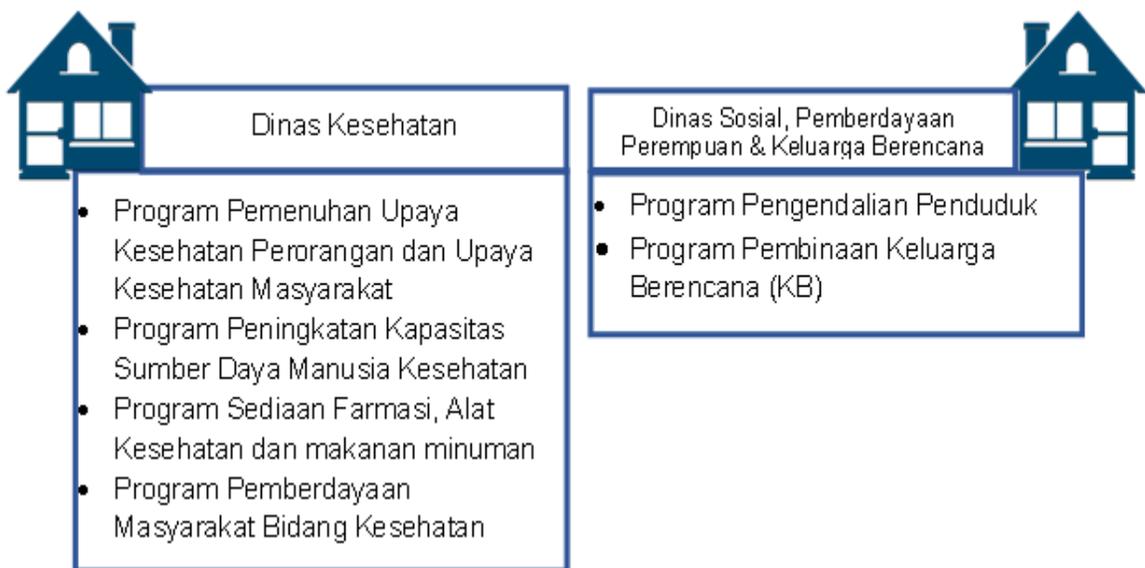
Target
0.81

Realisasi
0.78



Dimasa Pandemi Covid 2019 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih mampu mempertahankan kinerja di bidang kesehatan dengan ditunjukkan pada realisasi Indeks Kesehatan tahun 2021 sebesar 0.78 atau sama dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yakni di pada tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 96.17% atau kategori capaian kinerja baik.

Program Pendukung Peningkatan Indeks Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:



Upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penanganan urusan kesehatan diantaranya :

- Sinergitas lintas program, lintas sektor dan stakeholder terkait dalam pembangunan bidang kesehatan terutama dalam penanganan pandemi covid-19
- Akses fasilitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan sebagai prioritas kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, peningkatan layanan ditunjang dengan adanya inovasi layanan kesehatan dimana layanan Puskesmas dengan metode “Jemput Bola Rawat Warga”
- Upaya promotif dan prefentif di Puskesmas dan jaringannya;
Puskesmas dan jaringannya bukan lagi menjadi tempat kunjungan orang sakit melainkan lebih dikembangkan lagi menjadi tempat berkunjungnya orang sehat, perubahan paradigma Puskesmas menjadi Mall Orang Sehat disetiap Puskesmas adalah sebagai upaya promotif dan prefentif dalam rangka konsultasi terkait bidang kesehatan dan pengecekan kesehatan masyarakat.



✓ **770 WARGA SAKIT**
ditangani program
“**Jemput Bola Rawat Warga**”

✓ Rehabilitasi
34 PUSKESMAS dan
19 Puskesmas Pembantu

✓ Tambah
133 TENAGA KESEHATAN
di seluruh faskes

Capaian Vaksinasi, Gotong Royong TNI, Polri, ormas, parpol, kades, relawan, dsb.

Dosis 1

92,28%

Dosis 2

70,39%

Dinas Kesehatan Banyuwangi
24 Februari 2022



Sasaran ke-3

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komoditas Pangan dan Non-Pangan
 Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Purchasing Power Parity (PPP)



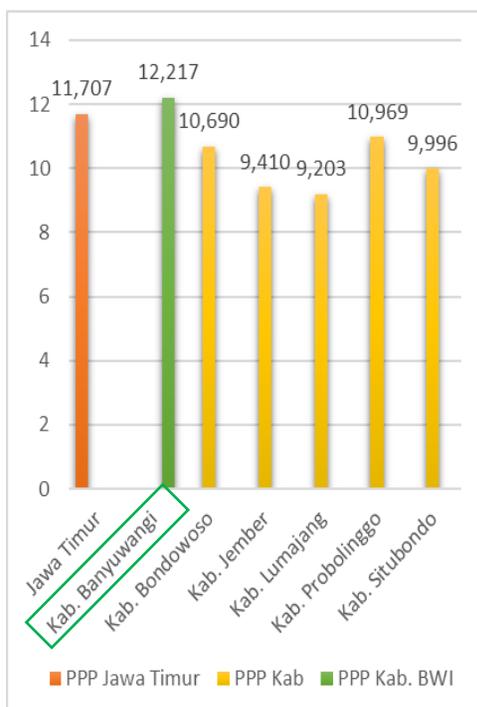
Tahun 2021

Target
0.78

Realisasi
0.76

97.44 %

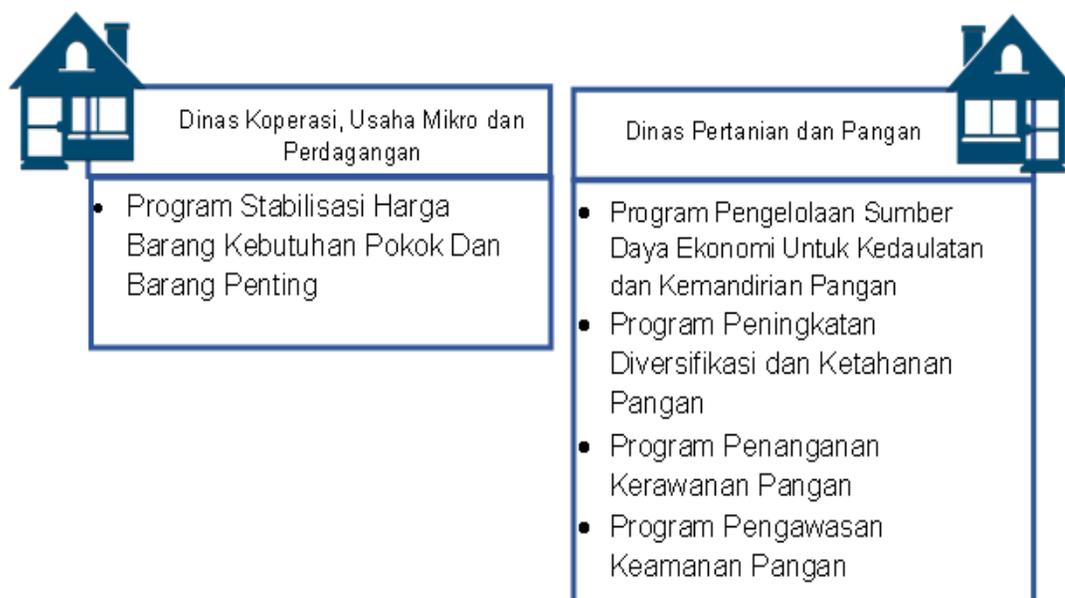
Indeks Purchasing Power Parity (PPP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sebesar 0.76 atau masih sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja meningkatnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non-pangan (PPP) dengan indikator Indeks Purchasing Power Parity (PPP) sebesar 97.44 % atau capaian kinerja tahun 2021 kategori baik.



Pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga tahun 2021 masih membuat daya beli masyarakat masih belum benar-benar pulih, sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat belum mengalami perbaikan yang signifikan, namun demikian **Standar Hidup Layak (PPP)** Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 mampu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 12,14 juta/tahun menjadi 12,217 juta/tahun, dan lebih baik dari kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Timur



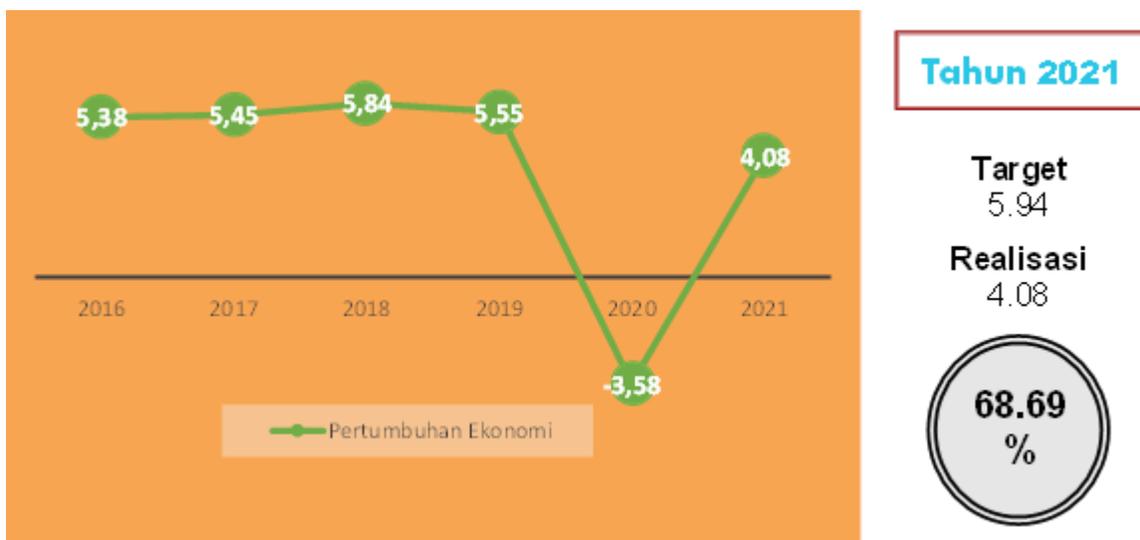
Pendukung Peningkatan Indeks Purchasing Power Parity (PPP) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:



Strategi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Peningkatan Indeks Purchasing Power Parity, adalah sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan stabilisasi harga komoditas perdagangan melalui monitoring harga bahan pokok dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas perdagangan setiap hari di pasar-pasar daerah. Stabilisasi harga bahan pokok akan sangat berdampak pada daya beli masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari tahun sebelumnya. Walaupun masih dalam masa pandemi yang mengakibatkan penurunan pendapatan, masyarakat masih melakukan aktivitas ekonomi secara normal, sehingga target dapat tercapai;
- Dukungan teknologi dalam budidaya tanaman pertanian dan pendampingan melalui peningkatan kompetensi petani, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan terpadu;
- Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan pemberian layanan Mobil Layanan Pertanian Terpadu (e-BILAPERDU).

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi dimasa pandemi covid-19 pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang positif mampu rebound tumbuh 4.08 dengan capaian kinerja sebesar 68.69% karegori capaian kinerja Cukup



Upaya Kabupaten Banyuwangi dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemi dengan berbagai program kebijakan pemulihan ekonomi dan sinergitas penanganan pandemi terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

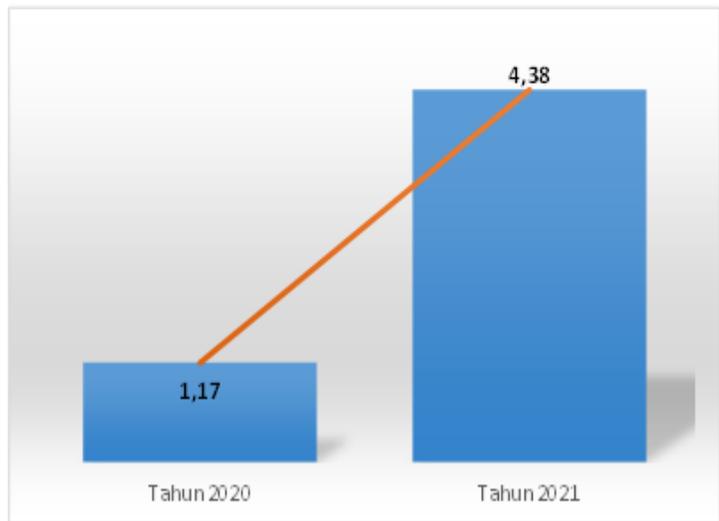
Pencapaian angka pertumbuhan ekonomi ini cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -3.58% atau rebound sebesar 7.66 poin persen. Secara komparatif pertumbuhan ekonomi di kabupaten Banyuwangi lebih tinggi dari angka nasional dan Propinsi Jawa Timur.



Dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, didukung oleh tiga sasaran pembangunan:

Sasaran ke-4

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan
Indikator Kinerja Sasaran : Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan



Tahun 2021

Target
7.02

Realisasi
4.38

62.39
%

Sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan yang Berkelanjutan dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan dengan indikator kinerja sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 4.38 atau dengan capaian kinerja 62.39% dengan kategori capaian kinerja cukup.

Program Pendukung Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi :



Dinas Pertanian dan Pangan

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen



Dinas Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Program Pengelolaan Permuseuman
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Kabupaten Banyuwangi didukung oleh sektor-sektor penentu PDRB dan berikut 5 sektor kontributor terbesar PDRB Kabupaten Banyuwangi menurut lapangan usaha tahun 2022.





Peningkatan Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Banyuwangi melalui :

- Peningkatan akses dan jaringan pemasaran produk pertanian diantaranya dengan diselenggarakannya Agro Expo, Festival Pangan dan Non Beras (FEPANORA), serta Kontes Ternak sebagai media edukasi dan promosi produk pertanian unggulan;
- Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT);
- Peningkatan kesuburan lahan melalui fasilitasi pupuk organik pada areal pertanian seluas 17.425 Ha sebesar 139.400 liter, pada areal 7.000 Ha sebesar 5.000 kg pupuk organik granule, POC pada 603 Kelompok Tani;
- Penerapan sistem tanam jajar legilo dan penggunaan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat;
- Peningkatan pelayanan pertanian dengan Inovasi e-BILAPERDU

Aplikasi E-Bilaperdu, Respons Cepat Tanggulasi Masalah

Melalui e-Bilaperdu, para petani bisa mendapatkan berbagai penanganan mengenai pertanian, mulai dari konsultasi hingga penindakan.

E-BILAPERDU
Elektronik Banyuwangi Layanan Terpadu

MOBILE PELAYANAN PERTANIAN TERPADU

- ✓ Pelayanan quick response pertanian yang terakses online
- ✓ Informasi layanan konsultasi
- ✓ Data terkait pertanian
- ✓ Fasilitasi pertanian sebagai stimulan produksi komunitas pertanian

Layanan

- Petani
- Harga Komoditi
- Konsultasi
- Info Tani
- Lahan Pertanian
- Cuaca

- Optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian oleh kelompok tani sebagai peningkatan produktivitas dan kesejahteraan kelompok tani melalui Pelayanan terpadu jasa alat dan mesin pertanian (PLAYU ANTER)

Playu Anter pada 5 UPJA (Unit Pengelola Jasa Alat dan Mesin Pertanian)

- ✓ Tani Makmur (Rogojampi)
- ✓ Rejosari (Glagah)
- ✓ Tentrem (Tegaldlimo)
- ✓ Mutiara Tani (Blimbingsari)
- ✓ Setia Budi (Wongsorejo)



Peningkatan Sektor Perdagangan dan UMKM sebagai penyumbang PDRB di Kabupaten Banyuwangi

Sektor perdagangan dan UMKM merupakan sektor yang juga sangat terdampak akibat pandemi covid -19 dan hingga pada tahun 2021 belum selesai sehingga arah kebijakan Pemkab Banyuwangi adalah menjaga agar sektor perdagangan dan UMKM tetap tangguh dimasa yang sulit

Mantapkan UMKM Naik Kelas



✓ **1.786 UMKM**
menerima bantuan
alat usaha produktif

✓ **6.510 UMKM**
baru berdiri, buka lapangan
kerja baru

✓ **75.000 TRANSAKSI**
Hari Belanja UMKM dan Pasar
Rakyat

✓ **800 UMKM**
didampingi pengurusan
SPP-IRT, serta rebranding
dan redesain kemasan

✓ **12.000 UMKM**
didampingi peroleh NIB

✓ **49.782 UMKM**
didampingi akses permodalan
lewat KUR, CSR BUMN, dsb.

✓ **379 WARUNG**
ikuti program **Warung Naik
Kelas (WENAK)**

✓ **12.013 UMKM**
difasilitasi pendampingan
program Rumah Kreatif
Goes to Village



- Pendampingan Teman Usaha Rakyat (TUR) berupa pendampingan kepada UMKM agar terus berkembang. Teman Usaha Rakyat adalah Pendamping UMKM Banyuwangi yang diberikan pembekalan ilmu terkait peningkatan kualitas UMKM seperti Materi Copy Writing, Bussines Model Canvas, Foto Produk, Studio Creator, Pengelolaan Market Place serta Animasi dan Story melalui Aplikasi Canva.
- Fasilitasi pemasaran produk hingga packaging produk yang belum memenuhi standar dan memberikan subsidi jasa pengiriman produk UMKM yang bekerjasama dengan PT.POS Indonesia

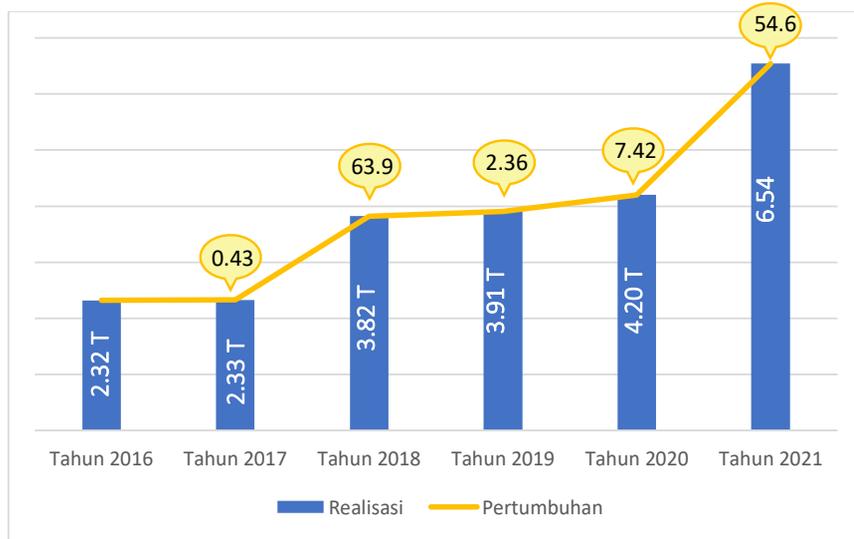


Pada Sektor Pariwisata di tahun 2021 masih sangat terdampak pandemi covid-19, sehingga langkah-langkah yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi:

1. menyiapkan destinasi wisata dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai Cleaness, Healthy, Safety, dan Environment (CHSE). Banyuwangi juga menjadi salah satu kota/kabupaten tujuan perjalanan dinas Kementerian/Lembaga se-Indonesia karena dianggap menjadi salah satu daerah yang sukses melakukan inovasi disektor pariwisata ditengah pandemi;
2. Pemilihan strategi penerapan konsep wellness tourism, staycation dan private family tourism ditengah pandemi yang memberikan pilihan berwisata lebih privat, sehat, aman dan nyaman bagi wisatawan;
3. Aktualisasi seni berupa kegiatan tampilan kesenian lokal dan musisi lokal di hotel-hotel di Banyuwangi yang bertajuk “Harmoni di Masa Pandemi” dengan penerapan protokol Kesehatan yang ketat untuk mendukung konsep staycation dengan memberikan atraksi seni bagi pengunjung hotel.

Sasaran ke-5

Bertambahnya Nilai Investasi
Indikator Kinerja Sasaran 1 : Pertumbuhan Nilai Investasi



Tahun 2021

Target
70

Realisasi
54.60

78.00 %

Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang hanya sebesar 2.32 Triliun menjadi 6.54 Triliun pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat selama kurun waktu 5 tahun terakhir dan pada tahun 2021 ini realisasi nilai investasi mampu tumbuh 54.60% atau capaian kinerjanya sebesar 78.00% dengan kategori capaian kinerja baik.

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi meningkatkan nilai investasi di masa pandemi Covid-19 didukung oleh :

1. Penyederhanaan sistem pelayanan penanaman modal sehingga memberikan kemudahan kepada investor;
2. Keadaan Kabupaten Banyuwangi yang semakin kondusif meskipun pandemi covid-19 belum berakhir;
3. Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung;
Pengembangan Inovasi Aksesibilitas unit pelayanan penanaman yang lebih banyak dan murah melalui (pasar pelayanan publik dan gerai pelayanan perikanan terpadu) merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan pengembangan fasilitas layanan kepada masyarakat.
4. Inovasi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan penanaman modal (non OSS-RBA).



Namun demikian sejumlah tantangan masih mengiringi upaya peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi dimasa pandemi Covid-19, tantangan-tantang tersebut diantaranya :

1. Percepatan penetapan Peraturan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
2. Penetapan dan pengelola kawasan industri;
3. Percepatan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal;
4. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dimasa pandemi covid-19.

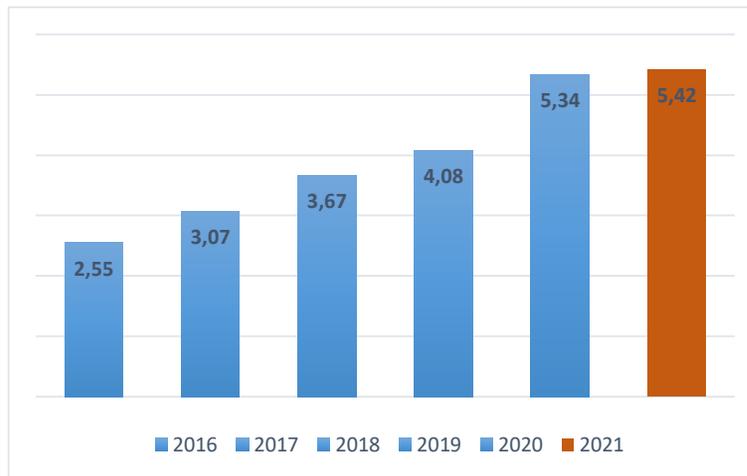
MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANYUWANGI



187 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi



Indikator Kinerja Sasaran 2 : Tingkat Pengangguran Terbuka



Tahun 2021

Target
2.98

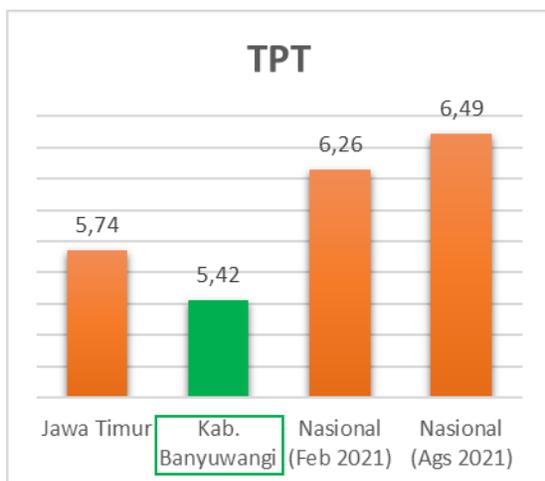
Realisasi
5.42

18.12
%

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 pada indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” mengalami peningkatan jumlah pengangguran sebesar 5.42% atau naik 0.08 dari tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerjanya pada indikator tingkat pengangguran hanya 18,12% dengan kategori capaian kurang.

Pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Banyuwangi, pada tahun 2021 pengangguran sebanyak 50.659, namun sejalan dengan program pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan dampak covid-19 direspon oleh pasar kerja dengan berbagai stimulus kebijakan pemerintah, sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Banyuwangi mengalami perbaikan.





Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyuwangi masih lebih rendah dari Propinsi Jawa timur sebesar 5.74 dan Nasional sebesar 6.26 pada bulan Februari dan Agustus sebesar 6.49.



Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

- Program Pengembangan UMKM



Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian

- Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga kerja
- Program Hubungan Industrial

Strategi perbaikan kinerja dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyuwangi

- Menjalin kerja sama dengan perusahaan berskala nasional agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan;
- Meningkatkan pendidikan dan keterampilan pencari kerja sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja;
- Memberikan reward / insentif kepada perusahaan, industri dan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja;
- Mendorong penciptaan wirausaha / lapangan kerja / kesempatan kerja baru;
- Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan agar lebih maju dan berkembang yaitu dengan memberikan stimulus berupa bantuan akses pinjaman kepada perbankan;
- Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi yang sebesar- besarnya di Kabupaten Banyuwangi.



Sasaran ke-6

Meningkatnya Kualitas Lingkungan
 Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Target
68.39

Realisasi
70.61

103.25 %

Kinerja meningkatnya kualitas lingkungan yang direpresentasikan dengan Indikator Indeks Lingkungan Hidup pada tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar sebesar 103.25% dengan kategori capaian kinerja baik sekali, capaian ini diukur dari target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebesar 68.39 % dan mampu terselisasi sebesar 70.61 %.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbentuk dari 3 indikator pembentuk yakni Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air
70.61	59,73	86,34	60,00

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Banyuwangi:

1. Peningkatkan pengawasan terhadap jenis usaha/atau kegiatan yang menghasilkan polutan baik berupa limbah padat, cair dan udara (emisi/ambient);
2. Kerja kolaborasi dan sinergi bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti: pengelolaan sampah, melestarikan sumber mata air,



melakukan penanaman terhadap lahan kritis, dan menjaga sungai bersih

3. Kolaborasi bersama lembaga-lembaga swadaya pegiat lingkungan dalam penanganan, pengelolaan persampahan serta pendampingan dan edukasi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat mengenai sampah.

- PT Systemiq Lestari Indonesia
 - Program Project STOP (Maret 2018 s/d Desember 2021):
Peningkatan kapasitas masyarakat Kec. Muncar untuk pengelolaan sampah
 - Program Banyuwangi Hijau (November 2021 s/d November 2026):
Peningkatan cakupan layanan persampahan skala Kabupaten Banyuwangi
- InSWA (Indonesia Solid Waste Assosation) Juni 2020 s/d Juni 2022:
Peningkatan dan pendampingan perubahan perilaku masyarakat sektor pengelolaan sampah
- EcoRanger 2018 s/d 2021:
Pengelolaan sampah di Desa Sumberagung Kec. Pesanggaran



Banyuwangi Hijau adalah program pengendalian sampah, khususnya sampah plastik



Program ini kelanjutan dari Project STOP (Stop Ocean Plastics) yang sukses dilaksanakan di Muncar sejak 2018 dan akan diperluas menjangkau lima kecamatan lainnya: Songgon, Rogojampi, Sempu, Genteng, dan Singojuruh.



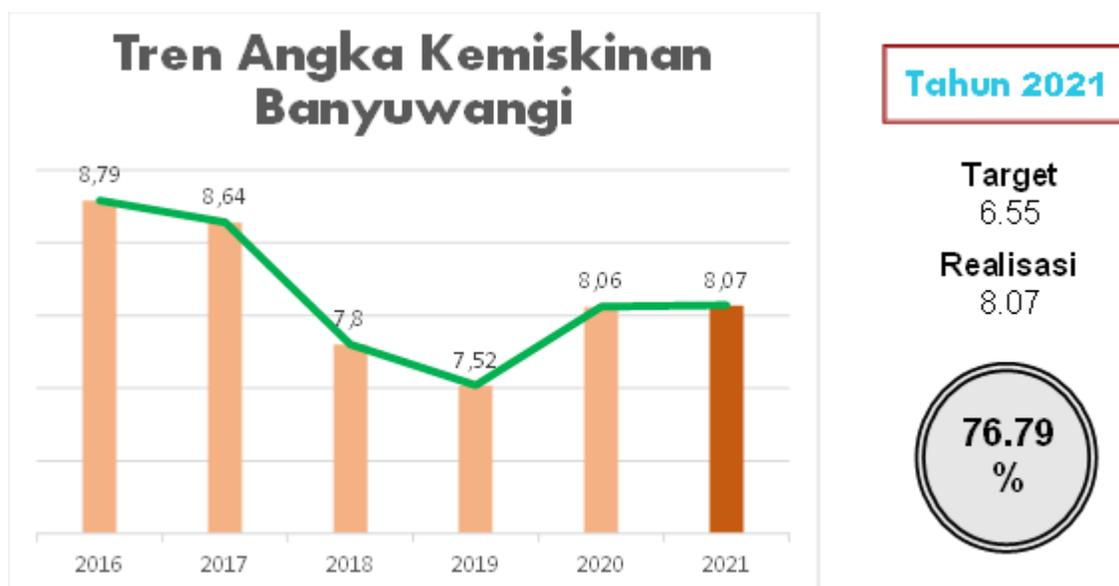
Akan dibangun pusat pengolahan sampah. Targetnya dapat menghentikan 150.400 ton sampah dan 21.000 ton sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan.



Project STOP ditangani langsung oleh Borealis, korporasi yang berbasis di Wina, Austria yang bekerjasama dengan PT Systemiq Lestari Indonesia. Sumber pembiayaan project berasal dari Pemerintah Norwegia dan Borealis.



Ketercapaian sasaran kinerja direpresentasikan melalui IKU Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 76.79% atau dengan kategori capaian kinerja baik.



Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan di Banyuwangi sangat baik dengan tren yang terus menurun hingga tahun 2019, namun dampak pandemi covid-19 meningkatkan kembali angka kemiskinan di Banyuwangi.

Menekan angka laju kemiskinan adalah prioritas pada tahun 2021 karena covid-19 masih belum selesai.



Dalam pencapaian tujuan Mengentaskan Masyarakat dari Kemiskinan, didukung oleh tiga sasaran pembangunan:

Sasaran ke-7 Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan
Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Gini



Tahun 2021

Target
0.27

Realisasi
0.373

61.85
%

Realisasi kinerja Indeks Gini Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sebesar 0.373 dan mengalami peningkatan sebesar 0.04 poin dari tahun sebelumnya dengan Capaian kinerjanya sebesar 61.85% atau kategori capaian kinerja kurang. Meningkatnya kemiskinan di Banyuwangi juga membuat tingkat ketimpangan di Kabupaten Banyuwangi ikut meningkat.

Indeks Gini, merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi dan menggambarkan kesenjangan antar wilayah, semakin besar atau banyak jumlah Indeks Gini.



Upaya yang dilakukan untuk menurunkan indeks gini, melalui :



Meningkatkan perekonomian daerah dengan pemerataan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, basis pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19 melalui Banyuwangi Rebound.



Ekosistem Pemulihan Ekonomi

- Transformasi Agribisnis**
 - Nilai Tambah Pertanian-Perikanan
 - Go Organic : 300 Ha, Pendampingan 20.000 Petani
 - Go Digital: Pilot Project Pertanian Presisi 4 Kecamatan
 - Menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Pendampingan 17.000 Keluarga Masyarakat Desa Hutan & Tani Hutan
- UMKM Naik Kelas**
 - 2.000 UMKM Go Digital
 - Hari Belanja Pasar & UMKM
 - 2.000 UMKM Dapatkan P-IRT
 - Bantuan 2.000 Alat Produksi Warga Kurang Mampu
 - Pemberdayaan Ekonomi 1.000 Purna Migran
 - Ongkir Gratis UMKM
- Pariwisata Pulih**
 - 1.000 Pelaku Pariwisata Tersertifikasi CHSE
 - 111 Festival Ber-Prokes
 - Belanja Wisatawan Rp1 Triliun, Length of Stay 3 Hari 2 Malam
 - Tingkatkan Kualitas 25 Destinasi (Tambahkan Atraksi, Amenitas, dan Akses)
- 1.000 Kilometer Infrastruktur Jalan**
 - Pemerataan Pembangunan Desa
 - Podat Karya 10.000 Tenaga Kerja
- 300 Titik Infrastruktur Irigasi**
 - Dukung Produktivitas Pertanian : 84.600 m
 - Podat Karya 7.500 Tenaga Kerja
 - Layani 146.000 Ha Lahan Pertanian
- Reformasi Perizinan**
 - Tumbuhkan Investasi Rp4,89 Triliun
 - Transparan, Mudah, Pasti
 - Jemput Bola Perizinan UMKM
- Youth Economy**
 - Kewirausahaan Kaum Muda: Jagoan Tani, Jagoan Bisnis, Jagoan Digital
 - Pendampingan Kewirausahaan 5.000 Anak Muda
- Womenpreneur**
 - Kemandirian Kaum Perempuan
 - Pendampingan Kewirausahaan 2.000 Perempuan Kepala Keluarga



Sasaran ke-8

Menjamin Perlindungan Sosial
 Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Tahun 2021

Target
12.1

Realisasi
16.37*

67.71 %

Realisasi kinerja Menjamin Perlindungan Sosial Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 yang direpresentasikan dengan Persentase PMKS sebesar 16.37 dengan capaian kinerja sebesar 67.71% atau kategori capaian kinerja kurang.

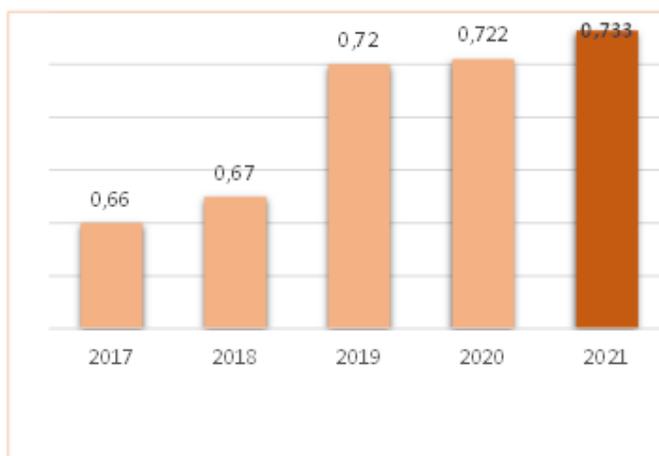
Solusi Sosial untuk Warga

- ✓ **3.017 WARGA** terima makanan setiap hari - **Rantang Kasih**
- ✓ **1.500 RUMAH** direnovasi menjadi rumah sehat layak huni
- ✓ **200.000 Warga** Penerima Bansos Pusat

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelontorkan bantuan sosial selain dari pemerintah pusat, juga memberikan bantuan berupa pemberian makanan bagi lansia sebatangkara (Rantang Kasih) dan bedah rumah guna meredam dampak pandemik covid-19 terhadap penyandang masalah sosial di Banyuwangi dan mampu mengurangi resiko masyarakat menjadi penduduk miskin.

Sasaran ke-9

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
 Indikator Kinerja Sasaran 1 : Indeks Pembangunan Masyarakat



Tahun 2021

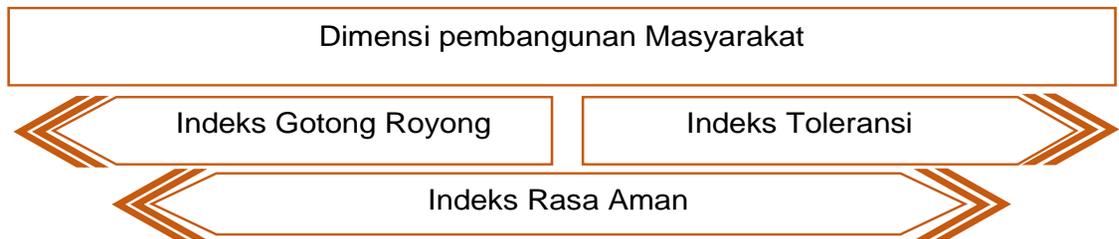
Target
0.70

Realisasi
0.733*

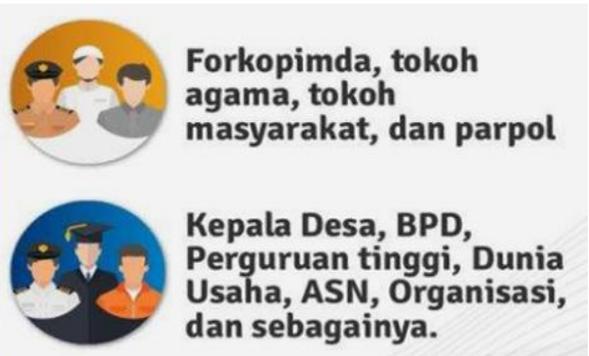
104.71 %



Capaian Kinerja Sasaran startegis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna dengan Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sebesar 104.71% atau kategori capaian kinerja baik sekali dinama pencapaian kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 0.70 dan terealisasi sebesar 0.733.

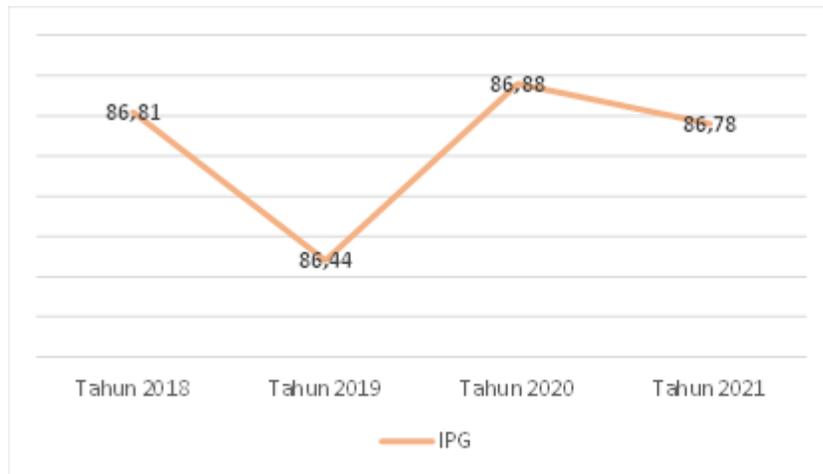


dimasa pandemi covid-19 kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen masyarakat sangat penting dengan program Banyuwangi Rebound “merajut harmoni” bersama :



Indikator Kinerja Sasaran 2 : Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 adalah sebesar 100.21% atau Kategori Capaian kinerja sangat baik, dimana Indeks Pembangunan Gender ditargetkan sebesar 86.60 dan mampu terealisasi sebesar 86.78.



Tahun 2021

Target
86.60

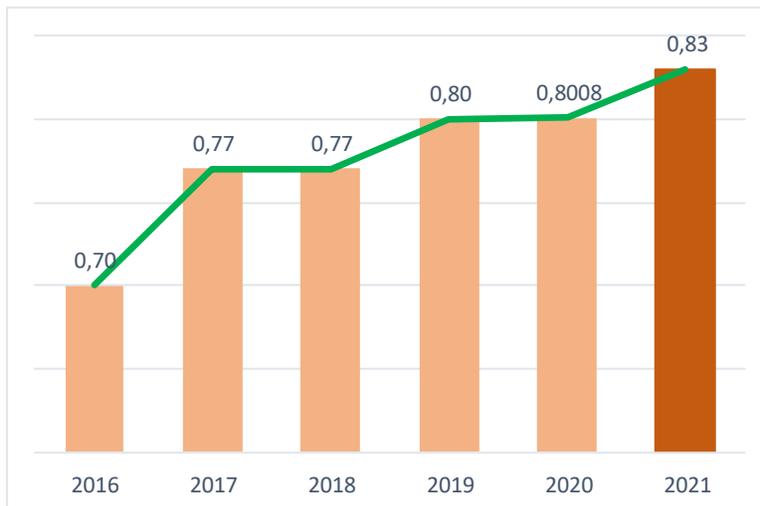
Realisasi
86.78*

100.21
%

Langkah peningkatan kinerja Indeks Pembangunan Gender (IDG) yaitu :

- Semua Pembangunan gender mempunyai faktor pendukung yang meliputi pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang meliputi gender laki-laki dan perempuan yang melibatkan lintas SKPD sehingga pengukuran dan perhitungan terkait dengan BPS provinsi;
- Pelibatan seluruh *stakeholder* untuk menghilangkan anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga;
- Mendorong perempuan agar meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat;
- Memberikan bimbingan dan pelatihan disegala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga;
- Sinergitas dan optimalisasi program kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak lintas sektoral.

Indikator Kinerja Sasaran 3 : Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)



Tahun 2021

Target
0.82

Realisasi
0.83

101.22
%

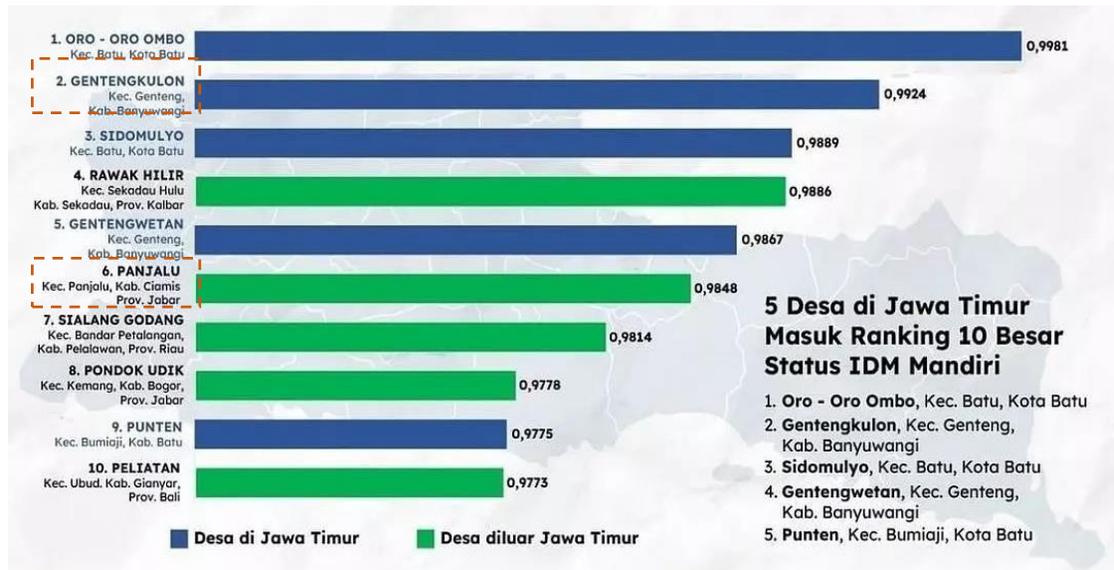
**KINERJA PROGRESIF
DESA DI BANYUWANGI**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Tren Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2016 - 2021 (5 tahun) mengalami tren yang positif. Desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat hingga di tahun 2021 mencapai 89 desa, desa maju 87 desa, sedangkan desa berkembang tinggal 13 desa dan sudah tidak terdapat desa tertinggal di Kabupaten Banyuwangi. Desa di Kabupaten Banyuwangi mampu kuat dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadikan desa yang mensejahterakan kehidupan masyarakat.



2 DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI MASUK 5 BESAR RANGKING NASIONAL STATUS DESA MANDIRI

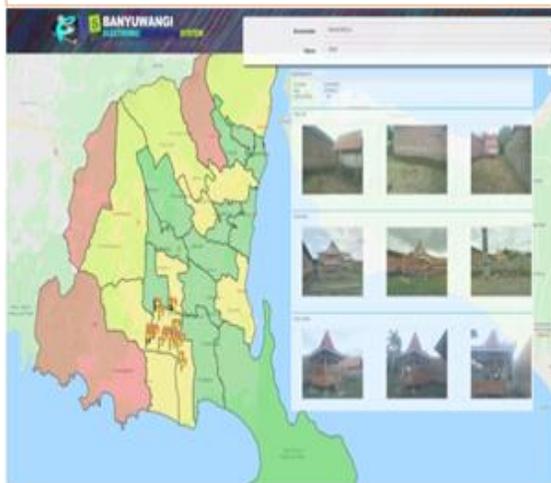


Langkah dan program dalam pencapaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banyuwangi sebagai kategori desa mandiri yaitu :

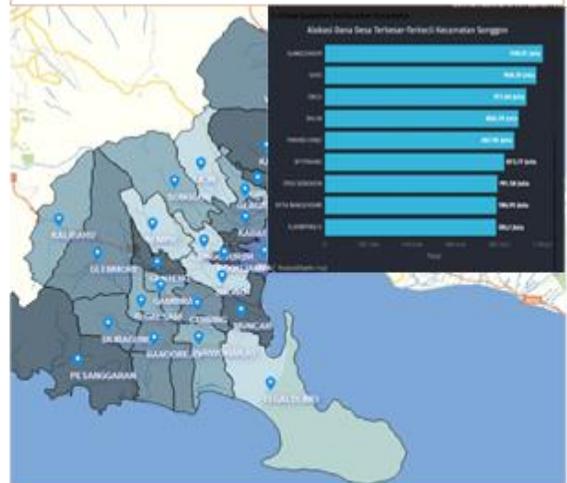
- Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat desa dengan program kerjasama antar desa dan program penataan desa;
- Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat desa dengan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan program Administrasi Pemerintah Desa.

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Inovasi Monitoring pembangunan proyek fisik di desa dapat dipantau secara online system melalui E-Monitoring Sistem (E-MS)



Inovasi Penggunaan E-Village Budgeting (E-VB) dalam mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa



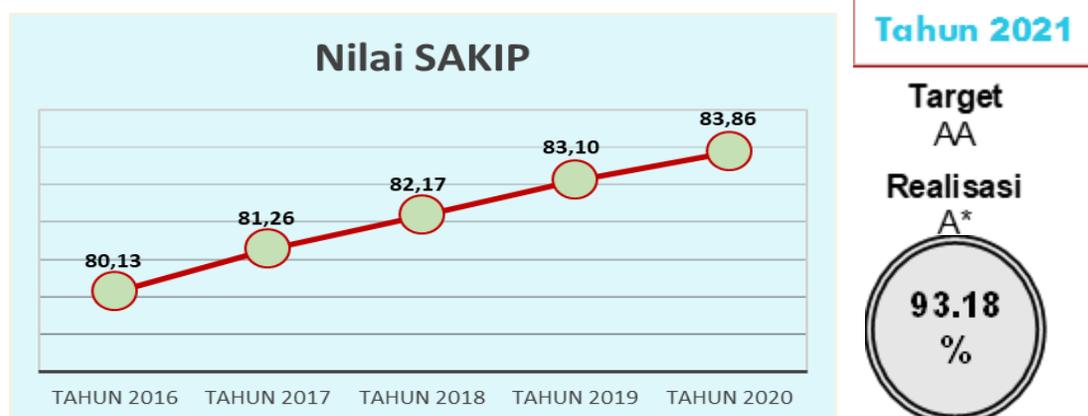
Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang direpresentasikan dengan Indikator Indeks Kepuasan Manusia (IKM) merupakan alat kontrol mutu kinerja pelayanan publik atas kinerja yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan pengembangan melalui inovasi pelayanan publik.



Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 sebesar 100.02% dengan kategori capaian kinerja baik sekali. Selama kurun waktu 2016 hingga 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan, dari 79.63 pada tahun 2016 hingga di tahun 2021 sebesar 93.16.

Dalam pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, didukung oleh dua sasaran strategis

Sasaran ke-10 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik
Indikator Kinerja Sasaran 1 : Nilai SAKIP



Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum dirilis tahun 2021 secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh predikat A. Nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2016 sebesar 80.13, hingga tahun 2020 sebesar 83.86.

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Kabupaten di Jawa Timur yang terus konsisten mempertahankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



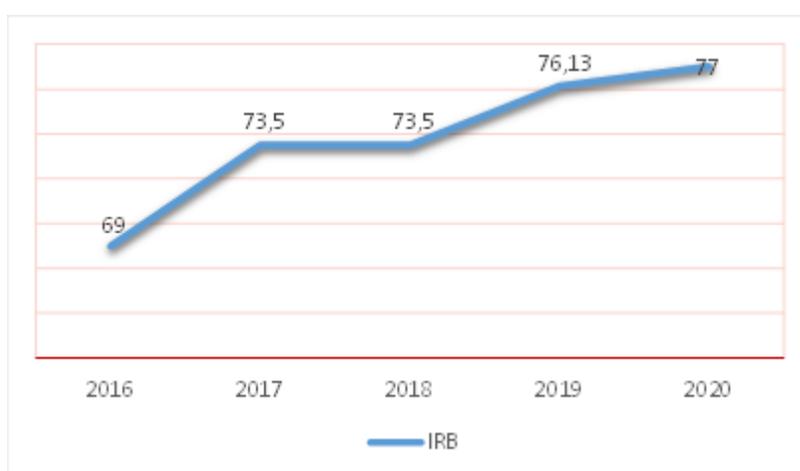
Langkah-langkah percepatan dan konsistensi SAKIP Kabupaten Banyuwangi :

- Menerapkan e-kinerja dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS (TPP) atau TPP berbasis kinerja sampai ke level individu, besar kecilnya TPP berdasarkan capaian kinerja masing – masing PNS baik kinerja proses maupun kinerja output / outcome sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan e-kinerja, setiap atasan langsung dapat memantau / memonitor serta menilai setiap aktivitas / kegiatan dan capaian kinerja bawahannya, sehingga akan diketahui “Siapa melakukan apa” sesuai jabatan dan ukuran kinerja masing-masing pegawai. Jadi setiap pegawai mempunyai ukuran kinerja yang jelas dan terukur;
- Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral yaitu bekerja secara tim

bukan Superman tetapi Supertim;

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja serta melakukan inovasi – inovasi, baik inovasi percepatan pelayanan publik maupun inovasi peningkatan kinerja pegawai;
- Terus menerus melakukan pembinaan kepada seluruh SKPD, khususnya SKPD Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga diharapkan SKPD Kecamatan secara bertahap lebih paham terhadap SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP; Menyempurnakan keterkaitan / integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang dikembangkan secara mandiri.

Indikator Kinerja Sasaran 2 : Indeks Reformasi Birokrasi



Tahun 2021

Target
78

Realisasi
77*

98.72
%

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 hingga laporan ini dibuat belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2020. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 69 hingga tahun 2020 menjadi 77.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, dan mampu melayani publik melalui 8 area perubahan melalui Peraturan Bupati Banyuwangi tahun 2018 tentang Road



Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2022 dengan 3 sasaran :

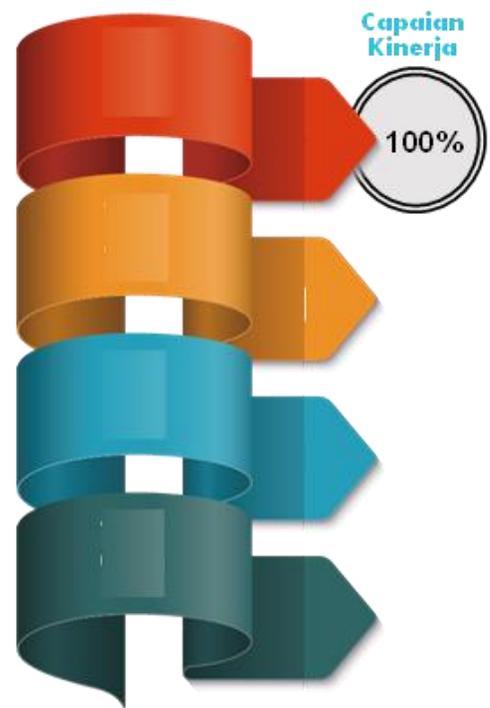


Pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuwangi didukung oleh :

- a. Melaksanakan roadmap, coaching dan asistensi pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program reformasi birokrasi, setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan learning reformasi birokrasi dan sharing experience;
- b. Monitoring dan percepatan 8 area perubahan sesuai roadmap reformasi;
- c. Melaksanakan Penyederhaan Birokrasi sebagai bagian dari mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik;
- d. Optimalisasi peran APIP (maturitas SPIP level 3 dan kapasitas APIP level 3);
- e. Internalisasi pembangunan zona integritas, pada tahun 2021 ada penambahan unit kerja yang menjadi WBK, sehingga hingga 2021 terdapat 2 unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berstatus WBK yakni RSUD Blambangan dan Pukesmas Sempu.

Indikator Kinerja Sasaran 3 : Opini WTP BPK Terhadap LKPD

Opini BPK terhadap LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 belum keluar, sehingga dalam laporan ini capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2020 berdasarkan surat BPK Perwakilan Jawa Timur nomor: 471/S-HP/XVIII.SBY/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, bahwa Opini atas Laporan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah dengan telah meraih sebanyak 9 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK, meskipun disaat pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan refocusing anggaran. Namun demikian kualitas tata kelola keuangan Banyuwangi mampu dijaga dengan kualitas baik.

Strategi konsistensi pencapaian kinerja dengan inovasi :

- BKU Online merupakan pemanfaatan internet banking Bank Jatim dengan sistem keuangan BIPA4 sudah terkoneksi secara realtime sehingga mempermudah proses penatausahaan keuangan serta mengurangi resiko kesalahan input nominal BKU. Dengan demikian data laporan realisasi anggaran (LRA) dapat tersaji secara valid.
- SP2D Online memudahkan transaksi perbankan, serta mengurangi kesalahan input nominal dan nomor rekening oleh petugas perbankan

Sasaran ke-1

Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik

Indikator Kinerja Sasaran 2 : Indeks Inovasi Pemerintah Daerah

Sasaran setrategis terciptanya Inovasi Pemerintah daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 84.19% atau kategori capaian kinerja baik.



Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 kembali menjadi kabupaten terinovatif se-Indonesia dalam Innovation Government Award (IGA) dengan meraih nilai tertinggi dengan skor 84.19.

Inovasi merupakan strategi percepatan akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya dan berkomitmen dalam menciptakan iklim inovasi pelayanan. Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten masuk dalam TOP Kompetisi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK), ini merupakan wujud percepatan-percepatan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas.





2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021.

**Realisasi anggaran Program Pendukung Ketercapaian Sasaran Strategis
Kabupaten Banyuwangi tahun 2021**

SASARAN	Pagu	Realisasi	% Capaian Realisasi
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan	256,714,615,515.00	250,969,248,363.10	85.14
Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan	134,176,886,421.00	82,991,094,019.43	66.58
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Komuditas Pangan dan non-Pangan	1,732,171,210.00	1,510,547,550.00	88.50
Meningkatnya PDRB sector unggulan yang berkelanjutan	3,055,066,851.84	2,848,338,699.20	93.81
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	14,597,592,157.00	12,944,884,940.00	91.15
Bertambahnya Nilai Investasi	3,719,940,671.00	3,263,811,264.00	83.90
Mengurangi Kesenjangan Tingkat Pendapatan	524,995,490.00	515,552,140.00	98.2
Menjamin Perlindungan Sosial	515,023,561.67	568,489,466.60	92.90
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	17,043,372,541.00	14,344,712,455.62	83.17
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	517,279,791,944.00	473,590,341,633.49	84.35
Terciptanya Inovasi Pemerintah Daerah	22,220,949,613.00	20,688,320,213.00	93.07
Penunjang <ul style="list-style-type: none"> • Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Urusan Perumahan dan Permukiman • Urusan Perhubungan 	488,486,511,213.00	481,586,253,360.00	88.59

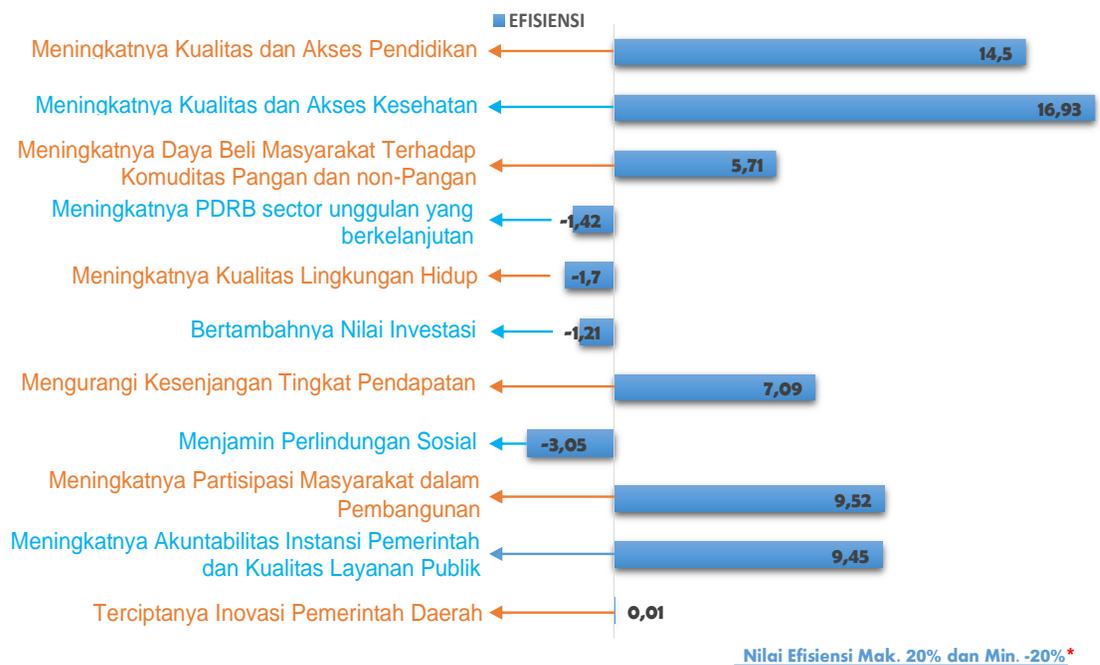
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran

Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan



Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta program pendukung sasaran tidak menjadi bagian perhitungan efisiensi.

**Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021**



Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja berdasarkan 11 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, efisiensi terjadi pada semua sasaran strategis yakni terdapat efisiensi dari -3.05 sampai dengan 16.93.

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021, didorong oleh kebijakan meliputi:

- Pengalokasian anggaran dengan standar belanja berbasis program yang mendukung sasaran dan tujuan pembangunan;
- Peninjauan Kembali RPJMD (Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan) / perubahan RPMJD sebagai penuntasan permasalahan dan isu strategis pembangunan (2020-2021);
- Strategi dan Kebijakan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran;
- Penerapan Reviu Kelembagaan Berbasis Kinerja (Perampingan Kelembagaan, Penyederhanaan /Perubahan Struktur Organisasi);
- Percepatan kinerja dengan Inovasi.



2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun untuk analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Kabupaten Banyuwangi terhadap target dalam pembangunan jangka menengah telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (untuk urusan pemerintah absolut) atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Sedangkan, asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menunjukkan bahwa penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa,



dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemberi penugasan. Berdasarkan pokok – pokok pemikiran tersebut, maka sangat penting dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 403.470.000,00. OPD penyelenggara kegiatan Tugas Pembantuan tersebut adalah Dinas Pertanian dan Pangan untuk melaksanakan 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta 2) Program Dukungan Manajemen. Sampai dengan akhir tahun 2021, capaian realisasi anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Dinas Pertanian dan Pangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 401.625.000,00 atau sebesar 99,54% dari pagu yang diberikan dengan capaian fisiknya sebesar 100%.

Selain itu, dalam hal ini juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh alokasi dana dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah untuk penyelenggaraan penugasan Dinas Pendidikan sebesar Rp 660.000.000 pada tahun 2021 untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kemudian capaian realisasi anggarannya sebesar Rp 658.336.000. tak hanya itu, untuk memperlancar Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan juga mendapatkan alokasi dana dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek Republik Indonesia sebesar Rp 1.583.020.000,00 yang capaian realisasi anggaran penyelenggaraannya juga sebesar Rp 1.583.020.000,00. Dana alokasi tersebut diperuntukkan untuk pendidikan non formal/kesetaraan.



TABEL 3.1
TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021

No.	Asal Penugasan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Kementerian Pertanian RI	Rp 403.470.000,00	Rp 401.625.000,00	99,54
2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Rp. 2.243.020.000	Rp. 2.241.356.000	99,92

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021



3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Banyuwangi

Uraian target dan realisasi Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT
YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
1.	Kementerian Pertanian RI	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan							
			Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Banyuwangi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	58.470.000	58.270.000	99,66	Kegiatan terlaksana 100%	100
			Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Banyuwangi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	240.000.000	239.800.000	99,92	Kegiatan terlaksana 100%	100
			Program Dukungan Manajemen							
			Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura (Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal)	Banyuwangi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	105.000.000	103.555.000	98,62	Kegiatan terlaksana 100%	100



2.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 0290/C2/KU.03.00/2021, Tanggal 24 Juni 2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 177/C2.FTL/LBB/2021	Bantuan Penyelenggaraan Lingkungan Belajar Berkualitas PAUD							
			Bantuan Lingkungan Belajar Berkualitas	Banyuwangi	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	45.000.000	44.686.000	99,30	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 0310/C2/KU.03.00/2021, Tanggal 28 Juni 2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 135/C2.FPL/PM/2021	Bantuan Penjaminan Mutu	Banyuwangi	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	35.000.000	34.850.000	99,57	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : Kep-0742/C2/KU.03.00/2021, Tanggal 21 September 2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 048/TAKOLA/LITDAS-1/X/2021	Bantuan Literasi Dasar PAUD	Banyuwangi	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	30.000.000	30.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : Kep-0081/C2/KU.03.00/2021, Tanggal 31 Mei 2021 dan Perjanjian Kerja Sama	Bantuan Peningkatan Peran Bunda PAUD Tingkat Kabupaten/Kota	Banyuwangi	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	50.000.000	48.800.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100



		Nomor : 272/TAKOL/BUNDA- 3.1/V/2021								
		SK-- 0001/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)	Banyuwangi	TK Sunan Ampel, TK Darussalam dan TKS Khadijah 161	75.000.000	75.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SK-- 0002/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)	Banyuwangi	TK Dharma Wanita 10, TK Tunas Bangsa, TK Pertiwi 4 Songgon dan TK Dharma Wanita 44	100.000.000	100.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SK-- 0003/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)		TK Al Amnan, TK Khadijah 184 dan KB Dewi Fortuna	75.000.000	75.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SK-- 0004/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)	Banyuwangi	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 5, TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 (Kecamatan Banyuwangi) dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1 (Kecamatan Tegaldimo)	75.000.000	75.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SK- 0005/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana	Banyuwangi	TK Baitul Mukminin	50.000.000	50.000.000	100	Kegiatan	100



			Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)		dan TK Tunas Bangsa 3 Bajul Mati				terlaksana 100%	
		SK-0006/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)	Banyuwangi	TKS Tunas Harapan dan PAUD KB Lestari Aisyiyah	50.000.000	50.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SK-0007/C2/KU.02.01/2021	Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD							
			Bantuan Sarana Pembelajaran PAUD / Alat Permainan Edukatif (APE)	Banyuwangi	KB Brawijaya, TK Cut Nyak Dien Bareng, dan TK Pertiwi 33 Pesanggaran	75.000.000	75.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SK Direktur Kursus dan Pelatihan, Nomor : 0872/D5/PM/05.00/2021, tanggal 21 Mei 2021 dan SPK Nomor : 731/D5/PM.05.00/2021 , tanggal 24 Mei 2021	Program Pendidikan Kecakapan (PKK), TIPE A : Platinum, Bidang Perhotelan Jenjang III, KKNi Berstandar Industri	Banyuwangi	LKP Desy Education	1.049.520.000	1.049.520.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SPK nomor 3605/D5/PM.05.00/2021 tanggal 09 november 2021	PKK ESP Tourism Tour Guide	Banyuwangi	LKP EJC Banyuwangi	50.000.000	50.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SPK nomor 3605/D5/PM.05.00/2021 tanggal 09 november 2021	PKK Bidang Jasa Usaha Makanan	Banyuwangi	Platinum College Indonesia	60.000.000	60.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		SPK nomor 3605/D5/PM.05.00/2021 tanggal 09 november 2021	PKK Bahasa Asing untuk tour guide	Banyuwangi	LKP Cheerful	52.500.000	52.500.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Perjanjian	PKK Komputer Administrasi	Banyuwangi	LKP Magistra	41.500.000	41.500.000	100	Kegiatan	100



		Kerjasama Nomor: 2504/D5/PM.05.00/2021	Perkantoran		Utama Banyuwangi				terlaksana 100%	
			PKK Pemandu Wisata	Banyuwangi	LKP Inochi Language House	52.500.000	52.500.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
			PKK Pelatihan Teknisi Komputer	Banyuwangi	LKP PTCC	33.000.000	33.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
			PKK Pelatihan Aplikasi Komputer	Banyuwangi	LKP PTCC	55.000.000	55.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Nomor 0837/D5/PM.05.00/2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 152/SPK/PKK/2021	PKK Tahap 1	Banyuwangi	LKP American English Course	94.500.000	94.500.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Nomor 2133/D3/PM.05.00/2021 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 3033/D5/PM.05.00/2021	PKK Tahap 2	Banyuwangi	LKP American English Course	94.500.000	94.500.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Nomor 3141/D5/PM.05.00/2021	PKK Tata Rias Pengantin	Banyuwangi	LKP Titi Wangi	60.000.000	60.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100
		Surat Keputusan Nomor 129/D5/PM.05.00/2021	PKW Pelatihan Budidaya Jamur	Banyuwangi	PKBM BKM Bina Makmur	60.000.000	60.000.000	100	Kegiatan terlaksana 100%	100

3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/ Kota

Nihil



3.3.3. Permasalahan dan Kendala

Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 yang diberikan oleh Kementerian Pertanian yaitu 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta 2) Program Dukungan Manajemen dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan atau tidak ada permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian kegiatan keseluruhan sebesar 100%.

Sedangkan dalam penyelenggaraan penugasan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan masyarakat, pendidikan non formal/kesetaraan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 3.3
PERMASALAHAN TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PENDIDIKAN

No	Program dan Kegiatan	Permasalahan
1.	Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tata Rias Pengantin	Belum semua peserta didik lancar dalam merintis usaha dikarenakan adanya Pandemi Covid-19
2.	PKW Pelatihan Budidaya Jamur	

3.3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Dari tabel permasalahan diatas, didapat solusi penyelesaian masalah seperti tabel berikut ini :

TABEL 3.4
SOLUSI ATAS PERMASALAHAN TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PENDIDIKAN

No	Program dan Kegiatan	Solusi
1.	Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tata Rias Pengantin	Kerjasama dengan Pihak Swasta yang mempunyai <i>orginizer</i> serupa yang memiliki banyak jejaring <i>client</i>
2.	PKW Pelatihan Budidaya Jamur	Memberikan Motivasi akan pentingnya menciptakan pekerjaan dan berwirausaha serta melakukan pendampingan dan Rencana Tindak Lanjut agar produk laku keras dan menjadi tambahan pemasukan bagi warga

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

SPM PENDIDIKAN (Kabupaten/Kota)			
Pasal 5 PP 2/2018			
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR
1.	Pendidikan anak usia dini	warga negara usia 5 s.d. 6 tahun.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
2.	Pendidikan dasar	warga negara usia 7 s.d. 15 tahun.	
3.	Pendidikan kesetaraan	warga negara usia 7 s.d. 18 tahun.	

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Penerapan dan Penetapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan antara lain :



- a. Kesesuaian kewenangan, SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
- d. Kesiambungan, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
- e. Keterukuran, SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan
- f. Ketepatan sasaran, SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam	100 %	Setiap tahun



		pendidikan Anak Usia Dini		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	100 %	Setiap tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	100 %	Setiap tahun

4.1.3 Realisasi

Realisasi terhadap target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	45.471 org
		44.180 org = 102,92%
2.	Pendidikan Dasar	211.054 org
		201.164 org = 104,92 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	4.482 org
		4.403 org = 101,79 %

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada perangkat daerah pengampu urusan Pendidikan sesuai dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4

Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Pendidikan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	320.200.898.342,00	306.919.148.778,16	95,85%
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	49.984.640,00	49.984.640,00	100,00%
3.	Program Pengembangan Kurikulum	144.987.740,00	141.597.980,00	97,66%
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	99.997.120,00	35.837.120,00	35,84%
	JUMLAH	320.495.867.842,00	307.146.568.518,16	95,83%

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada perangkat daerah pengampu urusan Pendidikan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- Pejabat Eselon II = 0 orang
 - Pejabat Eselon III = 3 orang
 - Pejabat Eselon IV = 7 orang
 - Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan = 32 orang
 - Penilik TK = 12 orang
 - Tenaga Fungsional Pengawas PAUD = 1 orang
 - Tenaga Fungsional Pengawas SD = 48 orang
 - Tenaga Fungsional Pengawas SMP = 5 orang
 - Sahabat Dikmas = 100 orang
-
- Jumlah = 208 orang



4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

1) Jumlah Peserta Didik PAUD Penerima Perlengkapan Dasar:

a) Permasalahan :

Realisasi penerima perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai untuk jenjang PAUD pada tahun 2021 baru mencapai 1.250 (35,06%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 3.565

b) Analisa Penyebab :

Alokasi anggaran Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk pemenuhan perlengkapan dasar pada jenjang PAUD berupa buku gambar dan alat mewarnai hanya cukup untuk 1.250 orang.

c) Solusi :

Pemenuhan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai pada Jenjang PAUD pada tahun 2021 dapat dipenuhi menggunakan dana BOP PAUD.

2) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan :

a) Permasalahan :

Realisasi penerima pembebasan biaya pendidikan pada jenjang PAUD pada tahun 2021 mencapai jumlah 42.133 dari sasaran sebanyak 42.713 atau sebesar 98,64%.

b) Analisa Penyebab

Pemenuhan pembebasan biaya pendidikan jenjang PAUD berasal dari Dana BOP PAUD yang penggunaannya harus mematuhi petunjuk teknis pengelolaan Dana BOP PAUD.

c) Solusi

Mendorong Satuan Pendidikan PAUD untuk selalu melakukan pengisian dan pemutakhiran data Dapodik sesuai dengan kondisi riil sebagai dasar penghitungan alokasi Dana BOP PAUD

3) Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini :

a) Permasalahan



Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki ijazah D-IV/S1 bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sejumlah 1.576 orang dari 3.182 orang guru yang sudah memiliki ijazah D-IV/S1 atau sebesar 49,53%.

b) Analisa Penyebab

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seluruh pembiayaan dan kuota peserta PPG ditentukan oleh Kemendikbudristek. Pada tahun 2021, kuota Guru PAUD yang mengikuti Program Profesi Guru (PPG) di Kabupaten Banyuwangi hanya 75 orang peserta.

c) Solusi

Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan untuk guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019.

4) Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang memiliki Ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah:

a) Permasalahan

Jumlah Kepala Sekolah PAUD yang memiliki Ijazah D-IV/S1 dan bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah berjumlah 579 orang dari seluruh Kepala Sekolah PAUD Formal yang berjumlah 789 orang dengan persentase capaian sebesar 73,38%.

b) Analisis Penyebab

- Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional melalui



Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seluruh pembiayaan dan kuota peserta PPG ditentukan oleh Kemendikbudristek.

- Berkurangnya jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik karena memasuki masa pensiun.

c) Solusi

Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan untuk guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 yang juga diperuntukkan bagi kepala sekolah .

5) Jumlah Satuan PAUD terakreditasi

a) Permasalahan

Jumlah Satuan PAUD terakreditasi pada tahun 2021 adalah sebesar 590 dari PAUD Formal sejumlah 789 satuan pendidikan sehingga jumlah capaian sebesar 74,78%.

b) Analisis Penyebab

Bertambahnya sekolah PAUD di Kabupaten Banyuwangi dan jumlah kuota Satuan PAUD yang terpanggil untuk akreditasi di Tahun 2021 sangat sedikit

c) Solusi

Dinas Pendidikan meningkatkan pengendalian proses perizinan Pendirian Satuan PAUD di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

b. Pelayanan Pendidikan Dasar

1) Jumlah Peserta Didik SD/SMP Penerima Perlengkapan Dasar:

a) Permasalahan :

Realisasi penerima perlengkapan dasar berupa buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar untuk jenjang SD/SMP pada tahun 2021 baru mencapai 2.462 dari target 16.234 atau hanya 15,17%.



b) Analisa Penyebab :

Alokasi anggaran Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk pemenuhan perlengkapan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP) berupa buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar hanya cukup untuk 2.462 orang.

c) Solusi :

- Pemenuhan perlengkapan dasar berupa buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar pada Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada tahun 2021 juga dapat dipenuhi melalui Dana BOS.
- Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang diselenggarakan di SD/SMP juga dapat membantu pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik di Jenjang SD/SMP

2) Jumlah Peserta Didik SD/SMP yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan :

a) Permasalahan :

Realisasi penerima pembebasan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP) pada tahun 2021 mencapai jumlah 30.189 dari sasaran sebanyak 32.615 atau sebesar 92,56%.

b) Analisa Penyebab

Masih kurangnya pencapaian realisasi peserta didik yang menerima pembebasan biaya pendidikan disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian data dengan data riil kondisi peserta didik serta alokasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun 2021.

c) Solusi

- Pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik berasal dari program inovasi Garda Ampuh, Uang Saku, Uang Transport, dan biaya hidup yang berasal dari dana APBD yang diprioritaskan untuk peserta didik kurang mampu .
- Pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik juga berasal dari Program Indonesia Pintar
- Program inovasi Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan meningkatkan kepekaan sosial diantara warga sekolah untuk saling membantu menjaga agar tidak ada anak yang putus sekolah



- Mendorong Satuan Pendidikan (SD/SMP) untuk selalu melakukan pengisian dan pemutakhiran data Dapodik sesuai dengan kondisi riil peserta didik sehingga diperoleh data peserta didik yang valid dan benar
- 3) Jumlah Pendidik Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat profesi guru:
- a) Permasalahan
- Jumlah Pendidik Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sertifikat profesi guru sejumlah 4.968 orang dari 10.741 orang guru yang sudah memiliki ijazah D-IV/S1 atau sebesar 46,25%.
- b) Analisa Penyebab
- Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seluruh pembiayaan dan kuota peserta PPG ditentukan oleh Kemendikbudristek. Pada tahun 2021, kuota Guru SD/SMP yang mengikuti Program Profesi Guru (PPG) di Kabupaten Banyuwangi hanya berjumlah 58 orang guru SD dan 16 orang guru SMP .
 - Setiap tahun jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik semakin berkurang karena memasuki masa pensiun terutama untuk Guru PNS.
- c) Solusi
- Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan ,Riset dan Teknologi membuka pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan untuk guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019.



- Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Guru memprioritaskan pelamar yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan sudah memiliki sertifikat pendidik dari Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra jabatan.
- 4) Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah:
- a) Permasalahan

Jumlah Kepala Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang memiliki ijazah D-IV/S1 dan bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah berjumlah 612 orang dari seluruh Kepala Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP) yang berjumlah 1024 orang dengan persentase capaian sebesar 59,77%.
 - b) Analisis Penyebab
 - Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang seluruh pembiayaan dan kuota peserta PPG ditentukan oleh Kemendikbudristek.
 - Setiap tahun jumlah kepala sekolah yang memiliki sertifikat pendidik semakin berkurang karena memasuki masa pensiun terutama untuk Guru PNS.
 - c) Solusi
 - Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan untuk guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 yang juga diperuntukkan bagi kepala sekolah .



- Dinas Pendidikan meningkatkan pengendalian proses perizinan Pendirian SD/SMP di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal salah satunya adalah dengan pengendalian kualitas tenaga pendidik dan kependidikan terutama kepala sekolah.

5) Jumlah Tenaga Penunjang di Pendidikan Dasar (SD/SMP)

yang berkualifikasi SMA :

a) Permasalahan

Jumlah tenaga penunjang di Pendidikan Dasar (SD/SMP) mencapai 1.587 dari kebutuhan 1.645 atau sebesar 96,47%

b) Analisis Penyebab

Masih terdapat Satuan Pendidikan (SD/SMP) yang belum memiliki tenaga penunjang/tenaga administrasi.

c) Solusi

Mengusulkan formasi Pengangkatan CPNS atau PPPK kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten untuk formasi tenaga administrasi

6) Jumlah Satuan Pendidikan (SD/SMP) terakreditasi

a) Permasalahan

Jumlah Satuan Pendidikan (SD/SMP) terakreditasi pada tahun 2021 adalah sebesar 1003 dari jumlah seluruhnya 1024 satuan pendidikan sehingga jumlah capaian sebesar 97,95%.

b) Analisis Penyebab

Masih terdapat Satuan Pendidikan (SD/SMP) yang belum terakreditasi disebabkan adanya pendirian sekolah swasta baru.

c) Solusi

Dinas Pendidikan meningkatkan pengendalian proses perizinan Pendirian Satuan PAUD di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

1) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Penerima Perlengkapan Dasar:

a) Permasalahan :

Realisasi penerima perlengkapan dasar berupa modul pembelajaran dan perlengkapan belajar untuk Pendidikan Kesetaraan pada tahun



2021 mencapai 855 orang dari 896 orang atau sebesar 95,38 persen.

b) Analisa Penyebab :

Alokasi anggaran Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk pemenuhan perlengkapan dasar pada jenjang PAUD berupa modul pembelajaran dan perlengkapan belajar cukup untuk 855 orang

c) Solusi :

Pemenuhan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai pada Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2021 dapat dipenuhi menggunakan dana BOP Kesetaraan.

2) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan :

a) Permasalahan :

Realisasi penerima pembebasan biaya pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2021 mencapai jumlah 5.944 dari sasaran sebanyak 6.199 atau sebesar 95,89%.

b) Analisa Penyebab

Alokasi anggaran Pemerintah Daerah pada tahun 2021

c) Solusi

Pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik pada Pendidikan Kesetaraan berasal dari Program Inovasi Garda Ampuh, Uang Saku, Uang Transport dan Biaya Hidup yang berasal dari anggaran APBD tahun 2021 dan juga dari Alokasi BOP Kesetaraan .

3) Jumlah Pendidik Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1):

a) Permasalahan

Jumlah Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV/S1 sejumlah 499 orang dari 675 orang guru yang sudah memiliki ijazah D-IV/S1 atau sebesar 74%.

b) Solusi

Untuk memenuhi kekurangan guru di Pendidikan Kesetaraan, Pengelola Pendidikan Kesetaraan mempersilahkan guru/pendidik sekolah formal untuk menambah jam mengajar di Pendidikan Kesetaraan



4) Jumlah Pendidikan Kesetaraan terakreditasi

a) Permasalahan

Jumlah PKBM terakreditasi pada tahun 2021 adalah sebesar 20 lembaga dari jumlah seluruhnya 56 lembaga sehingga jumlah capaian sebesar 35,71%.

b) Analisis Penyebab

Terdapat lembaga yang belum terakreditasi disebabkan adanya pendirian lembaga baru dan jumlah kuota akreditasi.

c) Solusi

Dinas Pendidikan meningkatkan pengendalian proses perizinan Pendirian PKBM di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)

yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif, diantaranya adalah :



- a. Peningkatan kesehatan;
- b. Perlindungan spesifik;
- c. Diagnosis dini dan pengobatan tepat;
- d. Pencegahan kecacatan;
- e. Rehabilitasi.

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, juga oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	Setiap tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100 %	Setiap tahun



4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan	100 %	Setiap tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100 %	Setiap tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap tahun
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Setiap tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100 %	Setiap tahun



12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	Setiap tahun
----	---	---	-------	--------------

4.2.3 Realisasi

Realisasi terhadap target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20.138 org
		23.144 org = 87,1 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.071 org
		22.092 org = 95,4 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.452 org
		21.040 org = 92,5 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	80.419 org
		109.073 org = 73,7 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	81.080 org
		217.017 org = 37,4 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	833.375 org
		1.010.602 org = 82,5 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	116.981 org
		279.760 org = 41,8 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	344.080 org
		486.469 org = 70,7 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	20.569 org
		27.097 org = 75,9 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang	516 org = 42,1 %



	dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1.225 org	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.715 org	= 33,3 %
		17.161 org	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	23.459 org	= 86,7 %
		27.051 org	

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada perangkat daerah pengampu urusan Kesehatan sesuai dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,839,681,160	302,466,140
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2,970,307,350	2,366,731,456
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109,156,080	29,000,450
4	Pelayanan Kesehatan Balita	409,134,280	88,301,730
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	756,031,240	317,812,040
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,560,716,890	1,476,027,909
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	638,235,930	225,936,950
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	754,412,200	225,700,810
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	562,984,880	552,383,350
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	869,831,140	182,790,290
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,083,794,000	2,016,606,850
12	Pelayanan Kesehatan Orang	1,088,060,363	622,246,029



	Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)		
--	---	--	--

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada perangkat daerah pengampu urusan Kesehatan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

Tabel 4.8

Dukungan Personil Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personel
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Koordinator dan pengelola program KIA Dinas Kesehatan : 7 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Kepala Puskesmas : 45 Orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Dokter Umum Puskesmas : 99 orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	- Dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Spesialis Anak : 6 orang
		- Bidan Koordinator KIA : 45 orang
		- Pengelola Program KIA Puskesmas : 45 orang
		- Bidan Puskesmas : 790 orang
		- Tenaga Teknisi Medis : 90 orang
		- Nutrisonis : 52 orang
		- Kader Pembangunan Manusia : 217 orang
		- Kader Posyandu : 2306 orang
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Koordinator dan pengelola program UKS Dinas Kesehatan : 5 orang
		- Kepala Puskesmas : 45 orang
		- Dokter Umum Puskesmas : 99 orang
		- Dokter Gigi Puskesmas : 54 orang
		- Perawat/perawat gigi puskesmas : 471 orang
		- Pengelola Program UKS : 45 orang
		- Pengelola Program Promosi Kesehatan : 45 puskesmas
		- TP UKS Kabupaten : 27 orang



		- Guru UKS : 1.403 orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Koordinator dan pengelola program Usila Dinas Kesehatan : 2 orang - Kepala Puskesmas : 45 orang - Dokter Umum Puskesmas : 99 orang - Perawat puskesmas : 471 orang - Pengelola Program Usila Puskesmas : 45 orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Koordinator dan pengelola program Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan : 3 orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Koordinator dan pengelola program Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan : 2 orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	- Kepala Puskesmas : 45 orang - Dokter Umum Puskesmas : 99 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	- Dokter Gigi Puskemas : 54 orang - Perawat puskesmas : 471 orang - Pengelola Program Penyakit Tidak Menular : 45 orang - Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga : 45 orang - Kader Posbindu : 217 orang - Kader Kesehatan Jiwa ; 217 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Koordinator dan pengelola program Penyakit Menular Dinas Kesehatan : 9 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	- Dokter Spesialis Paru : 3 orang - Kepala Puskesmas : 45 orang - Dokter Umum Puskesmas : 99 orang - Perawat puskesmas : 471 orang - Pengelola Program TBC : 45 orang - Pengelola Program HIV : 45 orang - Tenaga Teknisi Medis : 90 orang - Tenaga Kefarmasian - Komisi Penanggulangan AIDS : 5 orang - LSM Peduli HIV/AIDS : 10 orang



4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2021 mencapai 20.168 (87,1%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 23.144.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

a) Masih banyak ditemukannya ibu hamil dengan usia kehamilan > 12 minggu yang disebabkan antara lain karena kehamilan tidak diinginkan (KTD)

b) Belum samanya persepsi antara pemegang wilayah di puskesmas yang memegang kohort tentang definisi operasional dan teknis pengisian kohort dengan benar sehingga menyebabkan kerancuan dalam pencatatan serta pelaporan

c) Masih adanya kasus abortus yang menjadi salah satu target K4 berkurang

d) Karakteristik masyarakat juga menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan baik yang meliputi perilaku sosial dan ekonomi maupun Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program kesehatan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak

e) Banyaknya faskes (BPM/DPM/ Klinik/ RS Swasta) yang membuka layanan di wilayah puskesmas akan tetapi tidak di konfirmasi kepada wilayah kerja puskesmas.

f) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan ditarik untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19.

g) Kegiatan pertemuan yang mengharuskan tatap muka tidak dapat dilakukan karena kondisi pandemi

h) Laporan puskesmas terkadang mengalami keterlambatan karena petugas puskesmas terfokus untuk kegiatan percepatan vaksinasi Covid-19



3) Solusi

- a) Ditingkatkan kualitas dengan melakukan sweeping yang adekuat dengan bantuan kader kesehatan yang menjadi mitra kerja bidan dan diberikan pula informasi-informasi seputar layanan kesehatan ibu anak sehingga mobilisasi penduduk minimal dapat diatasi dan tidak terjadi ibu hamil baru memeriksakan kehamilannya setelah usia kehamilan > 12 minggu.
- b) Meningkatkan KIE petugas kesehatan kepada masyarakat yang meliputi KIE yang sasarannya kepada remaja usia subur, calon pengantin wanita serta ibu hamil
- c) Meningkatkan dan menjalin kerja sama lintas sektor maupun swasta yang sekiranya dapat membantu promosi program layanan kesehatan ibu dan anak misalnya bekerja sama dengan KUA Kecamatan, TP PKK Kecamatan/Kelurahan ataupun juga pada Jasa perias pengantin, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- d) Melakukan dan peningkatan pemahaman scoring kesejahteraan ibu hamil dengan benar sehingga resiko terjadinya kasus abortus bisa diminimalkan.
- e) Menyamakan persepsi sesuai dengan Definisi Operasional (DO) pengisian kohort dengan cara refreshing kohort atau desk kohort dalam kurun waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing puskesmas.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan faskes yang memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah puskesmas untuk wajib melaporkan layanan-layanan yang diberikan di faskes tersebut terkait dengan cakupan layanan KIA.
- g) Menggalakkan telekonsultasi dengan memanfaatkan Whatsapp (WA), pembuatan janji temu, dan menggabungkan beberapa layanan sejenis untuk mengurangi kerumunan pada saat pelayanan di Puskesmas. Kelas ibu tidak berjalan, tetapi pada beberapa ibu hamil risiko tinggi dilakukan kunjungan rumah oleh kader.
- h) Mengoptimalkan pemantauan status Ibu Hamil melalui e-kohort



b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada Tahun 2021 mencapai 21.071 (95.4%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 22.092.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

a) Mobilisasi penduduk biasanya ada saat menjelang persalinan ibu pulang ke rumah nya di luar wilayah puskesmas / kabupaten.

b) Tingginya target kabupaten dibanding pencapaian riil di wilayah.

c) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan ditarik untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19.

d) Kegiatan pembahasan dan pembelajaran kasus maternal untuk Puskesmas yang terdapat kematian ibu belum optimal.

e) Laporan puskesmas terkadang mengalami keterlambatan karena petugas puskesmas terfokus untuk kegiatan percepatan vaksinasi Covid-19

3) Solusi

a) Kerja sama dengan kader kesehatan untuk melaporkan bila ada ibu melahirkan di luar wilayah sebagai keterangan di kohort.

b) Mengoptimalkan peran kader pendamping Ibu Hamil Resiko Tinggi

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada Tahun 2021 mencapai 19.452 (92.5%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 21.040.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

a) Standar pelayanan kesehatan neonatal dasar tidak selalu diterapkan

b) Belum optimalnya pemahaman ibu/suami, keluarga masyarakat tentang pentingnya ketepatan waktu pemeriksaan bayi baru lahir

c) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan dioptimalkan untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19.

d) Tidak maksimal dalam hal pelayanan kesehatan bayi baru lahir karena kondisi pandemi.



- e) Kelas ibu hamil tidak dilaksanakan karena pandemi.
- f) Belum optimalnya pemahaman ibu/suami, keluarga masyarakat tentang pentingnya ketepatan waktu pemeriksaan bayi baru lahir

3) Solusi

- a) Pengkajian dan tindak lanjut penyebab ketidakpatuhan pada standar pelayanan kesehatan neonatal esensial.
- b) Peningkatan mekanisme integrasi dengan program yang sudah berjalan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan neonatal diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan tepat waktu.
- c) Fasilitasi peningkatan kompetensi nakes dalam memberikan pelayanan neonatus esensial melalui metoda pendampingan *inhouse training* dan/atau *on the job training* serta penguatan proses pendidikan *pre-service*.
- d) Memfasilitasi peningkatan pengetahuan ibu/suami, keluarga dan masyarakat/kader tentang praktik perawatan neonatal di rumah, deteksi dini neonatal sakit serta pola pencarian pertolongan mendapatkan pelayanan kesehatan.

d) Pelayanan Kesehatan Balita

1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan balita pada Tahun 2021 mencapai 80.419 (73.7%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 109.073.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

- a) Belum optimalnya kesadaran orang tua untuk datang ke posyandu karena anak sudah masuk PAUD/TK.
- b) Belum optimalnya sarana untuk media promosi dalam penyuluhan.
- c) Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kunjungan anak balita baik anak dalam keadaan sehat maupun sakit.
- d) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan dioptimalkan untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19.
- e) Capaian target tahun 2021 belum terpenuhi karena kondisi pandemi.



f) Banyak ibu yang takut datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan tumbuh kembang balitanya.

3) Solusi

a) Dilakukan kerjasama antara PKM dengan PAUD/TK yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk melakukan pendataan sehingga capaian bisa lebih maksimal.

b) Membuat media promosi yang menarik seperti brosur kemudian disebar ke masyarakat yang memiliki balita serta memberikan materi penyuluhan dan mengevaluasi penerapannya.

c) Meningkatkan peranan dan kinerja kader posyandu yaitu dengan evaluasi kerja kader, pelatihan kader dan keaktifan kader dalam menghimbau masyarakat.

d) Bekerja sama dengan kader untuk kunjungan ke rumah balita guna melakukan kegiatan penimbangan dan pengukuran tinggi badan.

e) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

1) Permasalahan

Realisasai cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada Tahun 2021 mencapai 81.080 (37.4%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 217.017.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

a) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada anak usia dasar dilaksanakan mulai Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021 (mengikuti tahun ajaran baru)

b) Pelayanan kesehatan untuk anak usia dasar sampai Desember Tahun 2021 masih difokuskan pada siswa kelas 1 dan 7

c) Selama Pandemi, Sekolah dilaksanakan secara daring sehingga pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak dapat terlaksana

d) Tenaga Puskesmas terfokus dalam pencapaian vaksinasi COVID 19 sehingga kekurangan tenaga dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

e) Menghindari penularan COVID 19 karena pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang sesuai standar terdiri dari : pemeriksaan status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut, serta



ketajaman indera yang mengharuskan membuka masker dan tidak bisa menjaga jarak antara petugas kesehatan dan sasaran

3) Solusi

- a) Pemanfaatan Google Form sebagai sarana untuk siswa usia pendidikan dasar dapat memantau kesehatan dirinya masing-masing (self assessment) dengan dibantu orang tua.
- b) Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun ajaran 2021/2022.

f) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif pada Tahun 2021 mencapai 833.375 (82,5%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 1.010.602.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

- a) Belum tercapainya sasaran dari target karena capaian SPM yang terlalu tinggi.
- b) Masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pemeriksaan.
- c) Masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pengobatan.
- d) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan dioptimalkan untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19

3) Solusi

- a) Untuk tahun kedepan diharapkan kualitas pelaksanaannya perlu ditingkatkan artinya tidak asal dilakukan skrining tetapi ketika kita menemukan faktor resiko PTM pada peserta hendaknya dilakukan rujukan dan pastikan peserta tersebut datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan.
- b) Meningkatkan gerakan sayang ibu dengan melakukan kegiatan skrining kanker servik (IVA Test).
- c) Melalui usulan musrenbang dan diharapkan setiap dusun dan kelompok masyarakat sudah terpenuhi bahan habis pakainya.
- d) Dalam mendukung puskesmas dengan paradigma sehat, diharuskan puskesmas juga melakukan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu PTM).



- e) Mengembangkan dan memperluas jaringan kegiatan posbindu PTM, di instansi pemerintah dan swasta, di tempat – tempat umum, dan di sekolah.
- f) Optimalisasi kegiatan KAMPUNG CERDIK
- g) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada Tahun 2021 mencapai 116.891 (41,8%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 279.760.
 - 2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator
 - a) Terbatasnya blangko skrining P3G dan alat cek kolesterol dan gula darah.
 - b) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan dioptimalkan untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19
 - c) Kondisi pandemi Covid-19 membuat kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terbatas kecuali untuk kondisi darurat, banyak lansia yang takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan.
 - 3) Solusi
 - a) Membuat media promosi yang menarik seperti brosur kemudian disebar ke masyarakat serta memberikan materi penyuluhan dan mengevaluasi penerapannya.
 - b) Ditingkatkan kualitas dengan melakukan sweeping yang adekuat dengan bantuan kader kesehatan yang menjadi mitra kerja puskesmas dan diberikan pula informasi-informasi seputar layanan kesehatan pada usia lanjut.
 - c) Pemanfaatan dana BOK dan JKN untuk pengadaan blangko skrining
 - d) Memfasilitasi peningkatan pengetahuan usia lanjut, keluarga dan masyarakat/kader tentang kesehatan usia lanjut.
 - e) Meningkatkan peranan dan kinerja kader posyandu yaitu dengan evaluasi kerja kader, pelatihan kader dan keaktifan kader dalam menghimbau masyarakat.
 - f) Melakukan kunjungan ke rumah lansia risti dan screening P3G
- h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 1) Permasalahan



Realisasi cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi pada Tahun 2021 mencapai 344.080 (70,7%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 486.469.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

- a) Masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pemeriksaan.
- b) Masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pengobatan.
- c) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan dioptimalkan untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19.

3) Solusi

- a) Memaksimalkan kegiatan atau program dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman Definisi Operasional (DO).
- b) Untuk tahun kedepan diharapkan kualitas pelaksanaannya perlu ditingkatkan artinya tidak asal dilakukan skrining tetapi ketika kita menemukan faktor resiko PTM pada peserta hendaknya dilakukan rujukan dan pastikan peserta tersebut datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan.
- c) Mengembangkan dan memperluas jaringan kegiatan posbindu PTM, di instansi pemerintah dan swasta, di tempat – tempat umum, dan di sekolah.
- d) Programer PTM di Puskesmas, bisa memonitoring kondisi Kesehatan pasien dilakukan secara telekonsultasi untuk memastikan pengobatan yang teratur bagi penderita Hipertensi
- e) Optimalisasi kegiatan KAMPUNG CERDIK

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM) pada Tahun 2021 mencapai 20.569 (75,9%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 27.097.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

- a) Masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pemeriksaan.
- b) Masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pengobatan.



- c) Pandemi covid 19 sehingga layanan UKBM di Banyuwangi tidak berjalan optimal. Tenaga kesehatan dioptimalkan untuk mengoptimalkan pelayanan UKP dan penanganan Covid 19
- d) Solusi
 - a) Memaksimalkan kegiatan atau program dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman Definisi Operasional (DO).
 - b) Untuk tahun kedepan diharapkan kualitas pelaksanaannya perlu ditingkatkan artinya tidak asal dilakukan skrining tetapi ketika kita menemukan faktor resiko PTM pada peserta hendaknya dilakukan rujukan dan pastikan peserta tersebut datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan.
 - c) Mengembangkan dan memperluas jaringan kegiatan posbindu PTM, di instansi pemerintah sdan swasta, di tempat – tempat umum, dan di sekolah.
 - d) Programer PTM di Puskesmas, bisa memonitoring kondisi Kesehatan pasien dilakukan secara telekonsultasi untuk memastikan pengobatan yang teratur bagi penderita Hipertensi
 - e) Optimalisasi kegiatan KAMPUNG CERDIK
- j) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
 - 1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat pada Tahun 2021 mencapai 516 (42,1%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran 1.225.
 - 2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator
 - a) Baseline data/ mapping masalah kesehatan jiwa di tingkat puskesmas (ODGJ, risiko, dan sehat) masih 60 %
 - b) Masih ada Puskesmas yang belum memiliki dokter terlatih (GP Plus) karena adanya pergantian/mutasi
 - c) Masih adanya penolakan dari keluarga / orang tua ODGJ dalam hal penanganan dari petugas Puskesmas
 - d) Programer keswa memegang lebih dari satu program di puskesmas
 - e) Belum semua kader kesehatan jiwa mendapat pelatihan di bidang kesehatan jiwa,



- f) Belum semua Puskesmas memiliki posyandu kesehatan jiwa sebagai pusat rehabilitasi ODGJ sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat

3) Solusi

- a) Banyuwangi sudah mendeklarasikan bebas pasung, diharuskan dalam mendukung kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
- b) Meningkatkan deteksi dini penemuan ODGJ pada keluarga
- c) Mendokumentasikan setiap perjalanan ODGJ (Setiap ODGJ yang ditemukan)
- d) Melakukan pelatihan untuk kader jiwa
- e) Peningkatan kemampuan dokter umum di faskes primer tentang pemberian psikofarmaka dan penanganan masalah kesehatan jiwa sesuai dengan kebijakan yang berlaku,
- f) Optimalisasi kader kesehatan dan pelatihan peningkatan kader kesehatan jiwa
- g) Peningkatan sistem rujuk balik (RSU, RSJ, dan puskesmas)
- h) Pemberdayaan ODGJ melalui Posyandu kesehatan jiwa di semua desa / kelurahan
- i) Revitalisasi TPKJM dan Korwil
- j) Pengembangan pendidikan keswa di sekolah Peningkatan/ pengembangan kualitas inovasi keswa diseluruh puskesmas
- k) Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat untuk melaksanakan pendampingan dan monitoring kondisi pasien ODGJ, yaitu untuk mengurangi risiko putus obat dan kekambuhan pada pasien ODGJ.

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1) Permasalahan

Realisasi cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada tahun 2021 sebesar 5.715 (33.3%). Hal tersebut belum memenuhi target sebesar 17.161.

2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator

- a) Terbatasnya ruang gerak petugas dalam melaksanakan penemuan terduga TBC secara aktif di masyarakat akhirnya penemuan terduga dan pasien TBC yang di obati belum optimal.



- b) Masih belum optimalnya kegiatan Investigasi Kontak dan pelacakan di masyarakat.
 - c) cakupan pasien TBC dengan HIV mendapatkan ART untuk koinfeksi TB-HIV masih belum optimal.
 - d) Belum semua rumah sakit menerapkan pelaksanaan program DOTS.
 - e) Belum optimalnya klinik dan praktek mandiri dalam melakukan notifikasi terduga TBC.
 - f) Jejaring Internal dan eksternal Rumah sakit belum berjalan maksimal, masih ditemukan kasus hilang di rumah sakit.
 - g) Belum semua Faskes DOTS mengirimkan spesimen dahak untuk penegakan diagnosa menggunakan TCM.
- 3) Solusi
- a) Meningkatkan notifikasi kasus TB dengan implementasi model Public-Private Mix (PPM) kabupaten, intensifikasi penemuan kasus, skrining aktif di fasilitas masyarakat dan kesehatan, investigasi dan sosialisasi kontak TB komunitas, serta penegakan penerapan wajib notifikasi pada klinik dan dokter praktek Mandiri (DPM).
 - b) Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan yang belum menerapkan program DOTS untuk dapat melaksanakan program DOTS.
 - c) Meningkatkan cakupan tes HIV di antara pasien TBC dan penyediaan ART untuk koinfeksi TB-HIV.
 - d) Melakukan Investigasi Kontak pada kontak pasien TBC baik kontak serumah ataupun kontak erat.
 - e) Meningkatkan cakupan pengobatan pencegahan TBC pada anak balita kontak serumah dan ODHA.
 - f) Pelibatan Masyarakat melalui kader kesehatan untuk melakukan kegiatan investigasi kontak, pelacakan, dan pendampingan pasien TBC.
 - g) Mengembangkan pemeriksaan TBC melalui perluasan dan desentralisasi lokasi laboratorium pengujian molekuler dan peningkatan sistem transportasi dahak.



- h) Mengatur transport sputum yang efektif, berdasarkan sistem kurir yang tersedia di wilayah tersebut (termasuk rumah sakit umum dan swasta).
 - i) Skrining dan tes TBC di lapas dan perluas penerapan TB-HIV di rangkaian lapas.
 - j) Seluruh terduga TBC yang ditemukan dilakukan pemeriksaan sesuai standart.
 - k) Memperkuat kembali tata-laksana TBC dengan melaksanakan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis ke fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan jejaring, tata laksana program TBC, pencatatan dan pelaporan.
 - l) Menyediakan bahan logistik penunjang untuk penengakan diagnosa TBC.
 - m) Memperkuat kembali jejaring eksternal dan internal faskes DOTS.
- l) Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
- 1) Permasalahan

Realisasi cakupan pelayanan kesehatan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada Tahun 2021 mencapai 23.459 (86,7%), hal tersebut belum memenuhi target sasaran sebesar 27.051.
 - 2) Analisa Penyebab Tidak Tercapainya Indikator
 - a) Penyebab menurunnya capaian test HIV pada ibu hamil dikarenakan Belum optimalnya rujukan bumil dari KIA ke test HIV, terbatasnya petugas kesehatan dalam melakukan kunjungan rumah mencari sasaran bumil di wilayah kerja masing-masing
 - b) Penyebab menurunnya capaian test HIV pada warga binaan Pemasyarakatan dikarenakan test hanya di berlakukan pada narapidana baru.
 - c) Penyebab menurunnya capaian test HIV pada pasien TBC dikarenakan pasien anak-anak yg harus mendapatkan persetujuan wali atau orang tua, meninggal, pindah domisili atau default.
 - d) Belum optimalnya penjangkauan petugas kesehatan pada kelompok-kelompok beresiko yang harus dilakukan test HIV.



- e) Petugas kesehatan kurang melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok resiko tinggi tertular hiv untuk melakukan promosi dan preventif.
- f) Banyaknya kesalahan pencatatan dan pelaporan dalam SIHA yang dilakukan oleh petugas sehingga banyak kasus test HIV tidak tercatat dalam laporan.
- g) Adanya Pandemi Covid 19 yang menghambat Kegiatan Penanggulangan HIV
- h) Kelompok Resti khususnya WPS sulit di jangkau karena terdapat kebijakan penutupan lokalisasi
- i) Tersebar nya spot spot baru dan sulit dijangkau
- j) Jumlah populasi kunci (WPS, LSL, IDU, Waria) belum dapat dipastikan jumlahnya dengan akurat, karena kegiatan ponci tersebut terselubung.
- k) Pengobatan ARV belum merata di semua layanan kesehatan
- l) Adanya ODHA yang loss follow up dalam pengobatan ARV
- m) Adanya ODHA yang malu datang ke layanan serta jarak yang jauh ke layanan ARV

3) Solusi

- a) Memberikan pelayanan kesehatan dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai dengan Peraturan Daerah No.5 tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV.
- b) Mengupdate kembali ilmu terkait pelayanan HIV dan menguatkan komitmen petugas untuk memberikan pelayanan.
- c) Meningkatkan Kegiatan Promosi HIV AIDS seara offline maupun Online
- d) Kegiatan Penyuluhan HIV di 25 kecamatan yang diikuti oleh kader dan tokoh masyarakat
- e) Peningkatan Pencegahan pada populasi rentan HIV melalui intervensi kelompok sebaya/ peer educator
- f) Meningkatkan kegiatan Deteksi Dini HIV padap populasi resiko HIV yaitu Bumil, Pasien TB, Pasien IMS, Warga Binaan Pemasyarakat, dan Populasi Kunci HIV
- g) Pengadaan Bahan pendukung Lab Deteksi Dini HIV



- h) Meningkatkan peran petugas kesehatan dalam kunjungan rumah ODHA serta meningkatkan upaya perawatan berbasis rumah dengan melibatkan keluarga ODHA
- i) Memperkuat petugas kesehatan dalam konseling kepatuhan minum ARV.
- j) Mendorong keterlibatan Kader Kesehatan dan LSM dalam pendampingan ODHA.
- k) Bekerja sama untuk keberhasilan pengobatan antara petugas kesehatan dengan keluarga ODHA terhadap ODHA yang menolak pengobatan ARV.
- l) Peningkatan kegiatan Evaluasi dan monitoring keberhasilan Pengobatan ARV melalui tes Viral Load.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Pelaksanaan di Kabupaten Banyuwangi 2 (dua) jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan dan Dinas Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, uraian berikutnya pada sub bab Urusan Pekerjaan Umum bersumber dari 2 (dua) perangkat daerah tersebut.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :



Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap tahun

4.3.3 Realisasi

Realisasi terhadap target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 KK
		100 KK = 100 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	14.296 KK
		14.296 KK = 100 %

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada perangkat daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum sesuai dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.11

Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2021

NO.	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31,209,206,735	24,786,631,607	83%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187,999,940	156,881,370	83%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,816,987,118	12,730,129,609	71%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	599.989.000	399,416,000	67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,410,296,624	1,796,682,848	75%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499,799,980	474,678,900	95%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,944,396,073	7,427,387,650	93%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,749,738,000	1,743,332,000	100%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	183,136,502,761	173,115,506,534	95%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51,491,650,010	48,474,344,390	94%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	131,644,852,751	124,641,162,144	95%



3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	29,324,888,800	25,381,936,820	91%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	29,324,888,800	25,381,936,820	91%
TOTAL		243,670,598,296	223,225,951,731	92%

Adapun untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Urusan Sekretariat	1.453.198.966	1.150.887.507	79
2.	Urusan Kebersihan	13.142.934.247	11.613.374.440	88
3.	Urusan Pengawasan dan Pengendalian	561.048.690	531.001.700	94
4.	Urusan Konservasi dan Rehabilitasi	209.503.130	190.784.100	91
5.	Urusan Pelaksana Teknis Dinas	684.106.090	610.724.700	89

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada perangkat daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
Daftar Pegawai PNS dan THL Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Golongan / Ruang	Esselon			Staf	Jumlah
	II	III	IV		
Golongan IV/c	1	0	0	0	1
Golongan IV/b	0	0	0	0	0
Golongan IV/a	0	2	0	0	2
Jumlah Golongan IV	1	2	0	0	3



Golongan III/d	0	1	3	0	4
Golongan III/c	0	0	3	1	4
Golongan III/b	0	0	0	6	6
Golongan III/a	0	0	0	10	10
Jumlah Golongan III	0	1	6	17	24
Golongan II/d	0	0	0	4	4
Golongan II/c	0	0	0	35	35
Golongan II/b	0	0	0	77	77
Golongan II/a	0	0	0	17	17
Jumlah Golongan II	0	0	0	133	133
Golongan I/d	0	0	0	1	1
Golongan I/c	0	0	0	3	3
Golongan I/b	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0
Jumlah Golongan I	0	0	0	4	4
Total	1	3	8	163	163

sedangkan untuk Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi Sebanyak 361 orang.

Adapun untuk rincian pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sejumlah 136 PNS dan 485 THL adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14

Daftar Dukungan Personil SPM Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Berdasarkan pendidikan, pangkat dan golongan (PNS)

Seksi	Jml	Pendidikan						Pangkat			Jabatan	
		SD	S M P	S L T A	D 3	S 1	S 2	I & II	III	IV	Struk	Fung
Sekretariat	22	2	3	11	1	4	1	15	6	2	4	19
Bidang Pengawasan dan Pengendalian	7	-	-	1	-	5	2	1	5	1	3	4
Bidang	5	-	-	2	-	3	-	2	3	-	2	3



Konservasi dan Rehabilitasi												
Bidang Kebersihan	22	9	10	52	1	2	1	72	2	1	1	74
UPTD Lab. Lingk.	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2
UPT Pengelolaan Persampahan	45	5	15	21	-	4	-	35	10	-	1	44

Berdasarkan pendidikan (THL)

Seksi	Jml					Pendidikan				Keterangan
		TS	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	SI	
Sekretariat	6	-	-	1	2	-	-	-	3	Tenaga keamanan, kebersihan dan pengemudi
UPTD Lab. Lingk.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	Tenaga analis
Bidang Pengawasan dan Pengendalian	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Jasa Administrasi (Pelayanan Perijinan)
Bidang Kebersihan	360	70	80	55	155	1	4	2	16	Tenaga Pesapon
UPT Pengelolaan Persampahan	112	20	20	40	30	-	-	-	2	

Catatan : TS (tidak sekolah)

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari permasalahan atau kendala. Permasalahan yang terjadi di Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi pada kegiatan Sarana dan



Prasarana Air Bersih yaitu realisasi capaian indikator tidak memenuhi target dikarenakan pada tahun 2021 ada sub kegiatan yang gagal dilaksanakan karena masalah social dengan pihak Perkebunan dan Perhutani;

2. Permasalahan terhadap pelayanan yang ada pada SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagian besar Pondok Pesantren belum memiliki pengelolaan sanitasi yang optimal, begitu juga masyarakat padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Solusi

1. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas PU Pengairan akan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat sekitar, betapa pentingnya manfaat sarana dan prasarana air bersih, dan pada tahun 2022 sub kegiatan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang gagal dilaksanakan akan diusulkan ulang;
2. Solusi permasalahan terhadap pelayanan tersebut yaitu dengan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap Pondok Pesantren, masyarakat padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah tentang akan dibangunnya IPAL Komunal dan diharapkan bisa meminimalkan terjadinya pencemaran terhadap sungai.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun



2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang terbangun (unit)	100 %	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah rumah korban relokasi yang terbangun (unit)	100 %	Setiap tahun

4.4.3 Realisasi

Realisasi terhadap target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0 unit
		0 unit = 0 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	0 unit
		0 unit = 0 %



4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada perangkat daerah pengampu urusan Perumahan Rakyat sesuai dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17

Alokasi Anggaran SPM Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Tahun 2021

PROGRAM	PAGU	REALISASI
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	297.396.507.088	290.267.981.960
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	44.561.683.599	40.519.804.030
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	275.000.000	271.561.000
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	15.750.629.590	15.612.736.430
Program pengembangan permukiman	60.064.703.263	59.189.404.240
Program penataan bangunan gedung	16.217.727.267	15.914.764.866
Program penataan bangunan dan lingkungannya	28.718.307.180	28.267.359.960
Program penyelenggaraan jalan	129.656.766.489	128.738.534.230
Program pengembangan jasa konstruksi	389.999.780	260.216.770
Program penyelenggaraan penataan ruang	1.761.689.920	1.493.600.434
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.901.561.670	1.549.089.190
Program pengembangan perumahan	2.157.283.680	1.549.089.190
Program kawasan permukiman	949.997.960	908.411.420
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	794.280.030	776.548.960

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada perangkat daerah pengampu urusan Perumahan Rakyat yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :



Tabel 4.18

Daftar Pegawai PNS dan THL DPUCKPP Kab. Banyuwangi Tahun 2021

GOL/ RUANGAN	ESELON					STAFF	THL	TOTAL
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV/b			1			81	188	289
Golongan IV/a			3	2				
Golongan III/d				8				
Golongan III/c				6				

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Anggaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sudah dianggarkan di awal Tahun 2021 akan tetapi dikarenakan tidak adanya bencana sampai dengan akhir tahun 2021. Program ini diefisiensikan anggarannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk digunakan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang lebih prioritas.

b. Solusi

- 1) Sebaiknya anggaran yang digunakan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Tidak Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/kota tetap dianggarkan hingga akhir tahun anggaran. Karena Program ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- 2) Perlu adanya program/kegiatan pengantisipasi sebelum terjadi bencana contohnya kegiatan sosialisasi pencegahan kawasan kumuh agar membangkitkan kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungannya.
- 3) Perlu adanya koordinasi bersama dengan dinas-dinas yang lain agar bersinergi bekerja terutama dalam memperoleh data untuk kelancaran penerapan SPM sehingga di tahun yang selanjutnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan tepat sasaran.



4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Pelayanan Informasi rawan bencana;
- 3) Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelaksanaan di Kabupaten Banyuwangi 5 (lima) jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh karena itu, uraian berikutnya pada sub bab bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bersumber dari 2 (dua) perangkat daerah tersebut.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :



Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap tahun
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap tahun

4.5.3 Realisasi

Realisasi terhadap target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0
		0 = 0 %
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	581.604 org
		581.604 org = 100 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	581.604 org
		581.604 org = 100 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	25 org
		25 org = 100 %
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	24 pelayanan
		24 kejadian = 100 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada perangkat daerah pengampu urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI(Rp.)
	BELANJA DAERAH	7.233.286.088,00	6.488.159.491,00
	Program Penunjang Urusan	4.608.377.057,00	3.704.446.735,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI(Rp.)
Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.999.890,00	49.533.050,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.840.495.050,00	1.879.620.143,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.379.160,00	844.634.779,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	49.876.061,00	43.813.550,00
5	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.698.936,00	472.622.963,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.927.960,00	414.222.250,00
Program Penanggulangan Bencana		2.259.916.751,00	2.783.712.756,00
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	134.997.080,00	64.995.250,00
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.259.916.751,00	2.497.547.565,00
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	69.996.630,00	68.368.850,00
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	159.998.570,00	152.801.091,00

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu	1.958.834.655	1.949.844.400



2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.284.871.000	1.226.054.600
----	--	---------------	---------------

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada perangkat daerah pengampu urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan rincian jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 berjumlah 364 anggota yang terdiri dari 67 orang PNS dan 297 THL.

Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja : 364

- Status :
- Pegawai Negeri Sipil : 67 orang
 - Non Pegawai Negeri Sipil : 297 orang
 - PPNS Satpol PP : 5 orang
 - PPNS Unit Kerja Lainnya

Tabel 4.23

Dukungan Personil

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Rincian Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja :		
Kepangkatan / Golongan		
No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Gol IV	5
2	Gol III	11
3	Gol II	50
4	Gol I	1
Jumlah		67
Tingkat Pendidikan		
No	PENDIDIKAN	Jumlah
1	Pasca Sarjana	4
2	Sarjana	8
3	SMA	51
4	SMP	2
5	SD	2
Jumlah		67



Jenis Kediklatan		
No	JENIS KEDIKLATAN	Jumlah
1	Struktural	10
2	Fungsional	14
3	Pemerintahan	
4	Teknis	
5	Diklat Dasar Pol PP	21
Jumlah		45

Adapun untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, dengan komposisi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.24

Dukungan Personil

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Banyuwangi Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	19 PNS 20 Non PNS
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Terbatasnya Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang memadai, mengingat luas dan perkembangan Kabupaten Banyuwangi.
2. Terbatasnya Kendaraan Operasional dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya pandemi covid 19
4. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban bencana;
5. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
6. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;



7. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
8. Luasnya wilayah Kabupaten Banyuwangi (5.782,5 km²) sehingga akses jalan dan jarak tempuh menuju Tempat Kejadian Bencana bisa terhambat karena banyak jalur yang tidak bisa terprediksi (jalur rusak dan sempit).

b. Solusi :

1. Pemenuhan kendaraan operasional
2. Peremajaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
3. Pemasangan Hidrant di untuk suporting sistem pemadaman kebakaran.
4. Pembentukan sekretariat terpadu Call Center pelayanan kedaruratan
5. Mengajukan penyusunan regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban bencana;
6. Mengusulkan tambahan anggaran untuk tambahan bantuan kepada korban bencana, biaya operasional, kebutuhan sarana dan prasarana penunjang, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana;
7. Mengusulkan alokasi anggaran untuk *updating* dokumen kebencanaan (dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) setiap tahunnya;

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;



- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal adalah :

Tabel 4.25
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tunas sosial di luar panti	100 %	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	100 %	Setiap tahun



	paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	perlindungan dan jaminan sosial		
--	--	---------------------------------	--	--

4.6.3 Realisasi

Realisasi terhadap target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	8580 org
		8580 org = 100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	366 org
		366 org = 100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1206 org
		1206 org = 100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	82 org
		82 org = 100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	94 org
		94 org = 100 %

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pada perangkat daerah pengampu urusan Sosial sesuai dengan realisasi anggaran belanja pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.27

Alokasi anggaran pencapaian SPM Dinas Sosial PPKB Tahun 2021

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.757.670.399,-	6.346.734.453,-	72,47
2	Program Pemberdayaan Sosial	753.354.400,-	715.275.100,-	94,95
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.910.500,-	0	0
4	Program Rehabilitasi Sosial	893,326,070,-	801.558.433,-	89,73
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	733.162.000,-	722.504.000,-	98,55
6	Program Penanganan Bencana	525.388.400,-	428.713.800,-	81,60

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada perangkat daerah pengampu urusan Sosial yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM dengan rincian total Pegawai PNS dan THL Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 sejumlah 81 orang dengan rincian PNS 33 orang dan THL 48 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang ada yaitu :

1. Pengumpulan Data

Penyebab terjadinya adalah karena kurang pedulinya Pilar-Pilar Sosial (PSM, TKSK) sehingga mengakibatkan pengumpulan data PPKS masih belum terpenuhi secara keseluruhan

2. Penghitungan Kebutuhan

Perhitungan kebutuhan disesuaikan dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic covid-19.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Untuk Program Rantang Kasih masih perlu ditingkatkan anggarannya sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan bagi lansia miskin/sebatangkara.



4. Pelaksanaan

Pelaksanaan penanganan orgil dan gelandangan masih minim akses dan layanannya terkait kapasitas layanan kesehatan dasar serta fasilitas penampungan sementara khusus orgil tidak mencukupi mengingat kapasitas PKM Licin yang overload.

Pelayanan lansia terlantar masih banyak mengalami kendala dikarenakan kondisi anggaran dan klien serta ketidakseimbangan antara jumlah klien dan jumlah SDM yang menangani

b. Solusi

1. Pemberian bimbingan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan potensi PSM dan TKSK
2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi PPKS agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara mandiri.
3. Perlu penambahan anggaran untuk Program Rantang Kasih
4. Penambahan kapasitas penampungan untuk orgil dan gelandangan dan penambahan anggaran dan SDM dalam penanganan lansia terlantar



4.7 Program dan Kegiatan

A. Bidang Pendidikan

Tabel 4.28
Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none">• Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan <ul style="list-style-type: none">• Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Program Pemberian Perlengkapan Dasar <ul style="list-style-type: none">• Program Pemberian Perlengkapan Dasar Pendidikan anak usia dini	320.200.898.342
2	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan <ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	



		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Program Pengembangan Kurikulum • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Program Pemberian Perlengkapan Dasar • Program Pemberian Perlengkapan Dasar Pendidikan dasar 	
--	--	--	--



3	Pendidikan Kesetaraan	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan <p>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan <p>Program Pemberian Perlengkapan Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberian Perlengkapan Dasar Pendidikan kesetaraan 	
---	-----------------------	---	--

B. Bidang Kesehatan

Tabel 4.29
Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota.	13.642.345.513
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
4	Pelayanan Kesehatan Balita		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		



6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	



C. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 4.30

Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29.324.888.800
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	- Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	9.600.000.000

D. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4.31

Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan <ul style="list-style-type: none">Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Rp 549.999.330



2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
---	--	--	--

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.32

Program dan Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas 	<p>1.958.834.655</p> <p>1.632.124.855</p>



		<p>termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum <p>Kegiatan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penganganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 	326.709.800
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	225.9916.751
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, 	<p>1.284.971.000</p> <p>1.109.870.000</p>



		penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - Pendataan sarana Prasarana Proteksi kebakaran	125.001.000
--	--	---	-------------

F. Bidang Sosial

Tabel 4.33
Program dan Kegiatan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial ▪ Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	60.969.600,- 39.839.070,-
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Program HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial ▪ Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan	104.800.000,-



		<p>Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 	74.998.400,-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Program HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Permakanaan ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 	<p>383.218.700,-</p> <p>70.557.500,-</p>
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Program HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 	158.942.800,-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	<p>Program Penanganan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Makanan ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sandang 	<p>74.191.600,-</p> <p>6.560.000,-</p> <p>57.491.500,-</p>



		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan <p>- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 	387.145.300,-
--	--	---	---------------



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Daerah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang oleh Pemerintah Pusat kewenangannya diserahkan kepada Daerah.

Diharapkan nantinya hasil dari pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 ini dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2020. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan DPRD, jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk pemerintah desa, seluruh stakeholder pembangunan, dan seluruh rakyat Kabupaten Banyuwangi yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.



INDIKATOR KINERJA MAKRO
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2021

No	Capaian Kinerja Makro	Capaian Tahun N-1	Capaian Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70.62	71.38	1.08
2	Angka Kemiskinan	8.06	8.07	0.12
3	Angka Pengangguran	5.34	5.42	1.5
4	Pertumbuhan Ekonomi	-3.58	4.08	-213.97
5	Pendapatan Per Kapita	81102.88	85916.02	5.93
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.32	0.373	16.56

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

No.	Jenis Urusan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
			Jenis Data/Rumus	Capaian Kinerja	Satuan		
1	Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (negeri dan swasta)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD (negeri dan swasta) ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	$\frac{45,467}{44,180} \times 100 = 102.91$	%	Dispendik	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (negeri dan swasta) ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	$\frac{140,829}{134,206} \times 100 = 104.93$	%	Dispendik	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	$\frac{70,225}{66,958} \times 100 = 104.88$	%	Dispendik	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan	$\frac{4,482}{4,403} \times 100 = 101.79$	%	Dispendik	
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah penduduk di kab/kota	$\frac{1,504}{1,750,778} \times 100 = 0.09$	%	Dinkes	
		2. Presentase RS Rujukan Tingkat kab/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di kab/kota	$\frac{13}{13} \times 100 = 100.00$	%	Dinkes	

		3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kab/kota	$\frac{20,168 \times 100}{20,168} = 100.00$ 20,168	%	Dinkes	
		4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100% Jumlah ibu bersalin di kab/kota	$\frac{21,071 \times 100}{21,071} = 100.00$ 21,071	%	Dinkes	
		5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di kab/kota	$\frac{19,452 \times 100}{19,452} = 100.00$ 19,452	%	Dinkes	
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di kab/kota	$\frac{80,419 \times 100}{80,419} = 100.00$ 80,419	%	Dinkes	
		7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di kab/kota	$\frac{81,080 \times 100}{81,080} = 100.00$ 81,080	%	Dinkes	
		8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota	$\frac{833,375 \times 100}{833,375} = 100.00$ 833,375	%	Dinkes	
		9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di kab/kota	$\frac{116,891 \times 100}{116,891} = 100.00$ 116,891	%	Dinkes	
		10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita hipertensi di kab/kota	$\frac{344,080 \times 100}{344,080} = 100.00$ 344,080	%	Dinkes	

		11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di kab/kota	$\frac{20,569 \times 100}{20,569} = 100.00$ 20,569	%	Dinkes	
		12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di kab/kota	$\frac{220 \times 100}{220} = 100.00$ 220	%	Dinkes	
		13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di kab/kota	$\frac{5,715 \times 100}{5,715} = 100.00$ 5,715	%	Dinkes	
		14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kab/Kota	$\frac{23,459 \times 100}{23,459} = 100.00$ 23,459	%	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota	$\frac{3,442 \times 100}{4,291} = 80.21$ 4,291	%	PU Pengairan	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota -----x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota	$\frac{11 \times 100}{11} = 100.00$ 11	%	PU Pengairan	

		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	$\frac{30,224 \times 100}{30,224} = 100.00$	%	PU Pengairan	
		4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut	$\frac{679,966 \times 100}{749,357} = 90.74$	%	PU Pengairan	
		5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten	$\frac{525,906 \times 100}{560,906} = 93.76$	%	DLH	
		6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya ----- x 100% Jumlah IMB yang berlaku	$\frac{342,539 \times 100}{342,539} = 100.00$	%	DPMPTSP	
		7. Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ----- x 100% Jumlah total panjang jalan kab/kota	$\frac{2,719 \times 100}{2,771} = 98.12$	%	DPUCKPP	
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota	$\frac{1,270 \times 100}{1,270} = 100.00$	%	DPUCKPP	

		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	$\frac{1,524 \times 100}{1,524} = 100.00$ 1,524	%	DPUCKPP	
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	DPUCKPP	
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	DPUCKPP	
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	$\frac{20 \times 100}{20} = 100.00$ 20	%	DPUCKPP	
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah unit rumah kab/kota	$\frac{1,806 \times 100}{560,906} = 0.32$ 560,906	%	DPUCKPP	
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah unit rumah kab/kota	$\frac{23,665 \times 100}{23,665} = 100.00$ 23,665	%	DPUCKPP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	$\frac{225 \times 100}{225} = 100.00$ 225	%	Satpol PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi	$\frac{9 \times 100}{9} = 100.00$ 9	%	Satpol PP	

		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1058998	orang	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	581604	orang	BPBD	
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	134021	orang	BPBD	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota	$\frac{24 \times 100}{24} = 100.00$	%	Satpol PP	
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran	14,9	menit	Satpol PP	
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	$\frac{10,234 \times 100}{10,234} = 100.00$	%	Dinsos PPKB	
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota	$\frac{94 \times 100}{94} = 100.00$	%	Dinsos PPKB	

7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota	$\frac{15 \times 100}{15} = 100.00$ 15	%	Disnakertrans Perin	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	$\frac{5.241 \times 100}{502,366} = 1.04$ 502,366	%	Disnakertrans Perin	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	$\frac{55,471,060,000}{934,177} = 59,379,603.65$ 934,177	Rupiah	Disnakertrans Perin	
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah perusahaan	$\frac{3,514 \times 100}{3,568} = 98.49$ 3,568	%	Disnakertrans Perin	
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	$\frac{988 \times 100}{1,177} = 83.94$ 1,177	%	Disnakertrans Perin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	$\frac{9,477,502,532 \times 100}{21,680,652,001} = 43.71$ 21,680,652,001	%	Dinsos PPKB	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	$\frac{33 \times 100}{439,521} = 0.01$ 439,521	%	Dinsos PPKB	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100000 Jumlah penduduk perempuan	$\frac{31 \times 100,000}{875,670} = 3.54$ 875,670	Rasio	Dinsos PPKB	
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	$\frac{744 \times 100}{164,006} = 0.45$ 164,006	%	Dispertapang	

10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	$\frac{839.979 \times 100}{839.979} = 100.00$ 839,979	%	DPMPTSP	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{25.397.202 \times 100}{30.639.060} = 82.89$ 30,639,060	%	DPUCKPP	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Jumlah tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya di atas izin lokasi -----X100% Luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{839.979 \times 100}{839.979} = 100.00$ 839,979	%	DPMPTSP	
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Bag Pemerintahan	
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah ----- x 100% Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	$\frac{9.312.208 \times 100}{9.351.320} = 99.58$ 9,351,320	%	DPUCKPP	
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	$\frac{8 \times 100}{8} = 100.00$ 8	%	Bag Pemerintahan	
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab = (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	0.7061	nilai	DLH	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	$\frac{1.684.588 \times 100}{1.687.050} = 99.85$ 1,687,050	%	DLH	

		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota ----- x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100.00$ 1	%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP-el	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP ----- x 100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	$\frac{1,331,166}{1,357,788} \times 100 = 98.04$ 1,357,788	%	Dispenduk Capil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	$\frac{228,769}{413,612} \times 100 = 55.31$ 413,612	%	Dispenduk Capil	
		3. Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	$\frac{435,370}{440,618} \times 100 = 98.81$ 440,618	%	Dispenduk Capil	
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah OPD	$\frac{7}{15} \times 100 = 46.67$ 15	%	Dispenduk Capil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal dan Desa	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)	$\frac{1}{1} \times 100 = 100.00$ 1	%	DPMPD	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	$\frac{13}{26} \times 100 = 50.00$ 26	%	DPMPD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,07	angka	Dinsos PPKB	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur	$\frac{231,248}{314,675} \times 100 = 73.49$ 314,675	%	Dinsos PPKB	

		3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur	$\frac{37.705 \times 100}{314,675} = 11.98$	%	Dinsos PPKB	
15	Perhubungan	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1,58	rasio	Dishub	
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,345	rasio	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo ----- x 100% Jumlah OPD	$\frac{55 \times 100}{55} = 100.00$	%	Diskominfo	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah layanan publik	$\frac{29 \times 100}{29} = 100.00$	%	Diskominfo	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah penduduk (17 tahun keatas)	$\frac{1.357.788 \times 100}{1,357,788} = 100.00$	%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT.volume usaha dan aset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	$\frac{467 \times 100}{868} = 53.80$	%	Diskop	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	$\frac{19.572 \times 100}{168,264} = 11.63$	%	Diskop	
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah A investasi A tahun A n-1A A di kabupaten/kota	$\frac{2.310.552 \times 100}{4,231,605} = 54.60$	%	DPMPSTP	

19	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/ kota ----- X 100% Jumlah A pemuda A (umur A A 16-30 tahun) di kab/kota	$\frac{204.120 \times 100}{386.936} = 52.75$ 386,936	%	Dispora	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota ----- X 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kab/kota	$\frac{44.743 \times 100}{386.936} = 11.56$ 386,936	%	Dispora	
		3. Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	16	keping	Dispora	
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistika dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- X 100% Jumlah OPD	$\frac{55 \times 100}{55} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	$\frac{55 \times 100}{55} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- X 100% Jumlah area penilaian	$\frac{389 \times 100}{645} = 60.31$ 645	%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- X 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	$\frac{3.766 \times 100}{3.766} = 100.00$ 3,766	%	Disbudpar	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	58	nilai	Perpus	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	29	indeks	Perpus	

24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	63,17	nilai	Perpus	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	25,94	nilai	Perpus	
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	72291	ton	Diskan	
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- X 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	$\frac{-13,372 \times 100}{15,517} = -86.18$	%	Disbudpar	

		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- X 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	$\frac{-1,149,263}{2,579,460} \times 100 = -44.55$	%	Disbudpar	
		3. Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	$\frac{1,185}{3,591} \times 100 = 33.00$	%	Disbudpar	
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku ----- X100 Total PDRB harga berlaku	$\frac{2,850}{55,741} \times 100 = 5.11$	%	Disbudpar	
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD ----- x 100% Jumlah total PAD	$\frac{31,605,793,728}{52,001,519,118} \times 100 = 6.08$	%	Disbudpar	
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- X 100% Luas panen	$\frac{784,732}{118,319} \times 100 = 663.23$	%	Dispertapang	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) Æ jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100% JumlahA A kejadian/kasus penyakitA hewanA menularA tahun sebelumnya (t-1)	$\frac{-324}{823} \times 100 = -39.37$	%	Dispertapang	
28	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	$\frac{240}{252} \times 100 = 95.24$	%	Diskop	
		2. Persentase Kinerja realisasi Pupuk	Realisasi ----- x 100% RDKK	$\frac{127,142}{247,658} \times 100 = 51.34$	%	Diskop	
		3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulangA di wilayah kab/kota	$\frac{13,075}{95,314} \times 100 = 13.72$	%	Diskop	

29	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	$\frac{7,364 \times 100}{10,529} = 69.94$	%	Disnakertrans Perin	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	92,43%		Disnakertrans Perin	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{13 \times 100}{13} = 100.00$	%	Disnakertrans Perin	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$	%	Disnakertrans Perin	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$	%	Disnakertrans Perin	
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	50% + 20% = 70%		Disnakertrans Perin	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

No.	Jenis Urusan	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
			Rumus	Hasil	Satuan		
1	Pendidikan	1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (negeri dan swasta)					
		1.1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	590	orang	Dispendik	
		1.2. Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1250	orang	Dispendik	
		1.3. Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42133	orang	Dispendik	
		1.4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	3182	orang	Dispendik	
		1.5. Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	Jumlah pendidik pada PAUD (negeri dan swasta)	3201	orang	Dispendik	
		1.6. Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1576	orang	Dispendik	
		1.7. Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD (negeri dan swasta) formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD (negeri dan swasta) non- formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Jumlah kepala sekolah PAUD (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD (negeri dan swasta) formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD (negeri dan swasta) non- formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	579	orang	Dispendik	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
		2.1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	833	sekolah	Dispendik	
		2.2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1462	orang	Dispendik	
		2.3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1000	orang	Dispendik	
		2.4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	15951	orang	Dispendik	
		2.5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14238	orang	Dispendik	

		2.6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	7435	orang	Dispendik		
		2.7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	3732	orang	Dispendik		
		2.8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	7314	orang	Dispendik		
		2.9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	3427	orang	Dispendik		
		2.10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	1634	orang	Dispendik		
		2.11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	828	orang	Dispendik		
		2.12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	813	orang	Dispendik		
		2.13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	774	orang	Dispendik		
		2.14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3168	orang	Dispendik		
		2.15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1800	orang	Dispendik		
		2.16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	477	orang	Dispendik		
		2.17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	135	orang	Dispendik		
		2.18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	622	orang	Dispendik		
		2.19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	774	orang	Dispendik		
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama						
		3.1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	833	sekolah	Dispendik		
		3.2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1462	orang	Dispendik		
		3.3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1000	orang	Dispendik		

		3.4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	15951	orang	Dispendik	
		3.5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14238	orang	Dispendik	
		3.6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	7435	orang	Dispendik	
		3.7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	3732	orang	Dispendik	
		3.8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	7314	orang	Dispendik	
		3.9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	3427	orang	Dispendik	
		3.10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	1634	orang	Dispendik	
		3.11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	828	orang	Dispendik	
		3.12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta)	813	orang	Dispendik	
		3.13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta)	774	orang	Dispendik	
		3.14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3168	orang	Dispendik	
		3.15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1800	orang	Dispendik	
		3.16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	477	orang	Dispendik	
		3.17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	135	orang	Dispendik	
		3.18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	622	orang	Dispendik	
		3.19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	774	orang	Dispendik	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
		4.1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	20	lembaga	Dispendik	

		4.2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	855	orang	Dispendik		
		4.3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5949	orang	Dispendik		
		4.4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	725	orang	Dispendik		
		4.5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	494	orang	Dispendik		
		4.6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	494	orang	Dispendik		
		4.7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	477	orang	Dispendik		
		4.8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	56	orang	Dispendik		
2	Kesehatan	1. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk						
		1.1. Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	13	unit	Dinkes		
		2. Presentase RS Rujukan Tingkat kab/kota yang terakreditasi						
		2.1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	13	unit	Dinkes		
		3. Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil						
		3.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	100840		Dinkes		
		3.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dibuat dalam bentuk daftar	898		Dinkes		
		4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan						
		4.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	63213		Dinkes		
		4.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	898		Dinkes		
		5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir						
		5.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	77808		Dinkes		
		5.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	898		Dinkes		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar						
		6.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	160838		Dinkes		
		6.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	898		Dinkes		

		7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		7.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	85953		Dinkes	
		7.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	45		Dinkes	
		8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		8.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	135		Dinkes	
		8.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	225		Dinkes	
		9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		9.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	91919		Dinkes	
		9.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	217		Dinkes	
		10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		10.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	90		Dinkes	
		10.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	562		Dinkes	
		11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		11.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	1920		Dinkes	
		11.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	562		Dinkes	
		12. Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		12.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	180		Dinkes	
		12.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	562		Dinkes	
		13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		13.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	2865		Dinkes	
		13.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	562		Dinkes	
		14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		14.1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	2227		Dinkes	
		14.2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	225		Dinkes	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota					
		1.1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	4291	ha	PU Pengairan	
		1.2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	330872	meter	PU Pengairan	

		1.3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	11	ha	PU Pengairan		
		1.4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	14885	meter	PU Pengairan		
		1.5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	ada/tidak	PU Pengairan		
		1.6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	ada/tidak	PU Pengairan		
		1.7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Dibuat dalam bentuk daftar Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	1 Bangunan Perkuatan Tebing 0 m 2 Tanggul Sungai 20550 m 3 Kanal Banjir 0 m 4 Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 390 unit 5 Pompa Banjir 0 m 6 Polder/Kolam Retensi 0 unit 7 Breakwater 184.3 m 8 Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 285.4 m	Daftar	PU Pengairan		
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota						
		2.1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	4291	ha	PU Pengairan		
		2.2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	330872	meter	PU Pengairan		
		2.3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	11	ha	PU Pengairan		

		2.4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (m)	14885	meter	PU Pengairan	
		2.5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	ada/tidak	PU Pengairan	
		2.6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	ada/tidak	PU Pengairan	
		2.7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Dibuat dalam bentuk daftar Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	1 Bangunan Perkuatan Tebing 0 m 2 Tanggul Sungai 20550 m 3 Kanal Banjir 0 m 4 Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 390 unit 5 Pompa Banjir 0 m 6 Polder/Kolam Retensi 0 unit 7 Breakwater 184.3 m 8 Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 285.4 m	Daftar	PU Pengairan	
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi							
		3.1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang saluran irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	$\frac{1,780}{3,649} \times 100 = 48.78$	%	PU Pengairan	
		3.2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang saluran irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	$\frac{460,686}{679,477} \times 100 = 67.80$	%	PU Pengairan	
		3.3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	$\frac{2,833,522}{11,106,740} \times 100 = 25.51$	%	PU Pengairan	

		4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
		4.1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	Ada	ada/tidak	PU Pengairan
		4.2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	ada/tidak	PU Pengairan
		4.3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1	lembaga	PU Pengairan
		4.4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	izin	PU Pengairan
		4.5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	1	dokumen	PU Pengairan
		5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
		5.1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	404025	unit	DLH
		5.2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	626266	unit	DLH
		5.3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	626276	unit	DLH
		5.4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	339	unit	DLH
		5.5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	339	unit	DLH
		5.6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	626276	unit	DLH
		5.7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik -1 Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun	$\frac{578,666}{626,276} \times 100 = 92.40$	%	DLH
		5.8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ----- x 100% Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	$\frac{339}{404,025} \times 100 = 0.08$	%	DLH

		5.9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T	$\frac{472,634}{626,266} \times 100 = 75.47$	%	DLH	
		5.10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----- x 100% Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	$\frac{404,025}{525,733} \times 100 = 76.85$	%	DLH	
		5.11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- x 100% Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	$\frac{1}{1} \times 100 = 100.00$	%	DLH	
		5.12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- x 100% Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	$\frac{9,000}{9,000} \times 100 = 100.00$	%	DLH	
		5.13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD ----- x 100% Jumlah rumah yang memiliki sambungan SPALD-T pada kab/kota	$\frac{472,634}{626,266} \times 100 = 75.47$	%	DLH	
		5.14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot ----- x 100% Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S	$\frac{339}{525,733} \times 100 = 0.06$	%	DLH	
6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota							
		6.1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku ----- x 100% Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	$\frac{256}{571} \times 100 = 44.83$	%	DPUCKPP	
		6.2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1454	jumlah	DPMPSTP	
		6.3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		6.4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		6.5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	150	unit	DPUCKPP	
		6.6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	12	unit	DPUCKPP	

		6.7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	9478	unit	DPUCKPP	
		6.8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2132	unit	DPUCKPP	
		7. Tingkat kemantaban jalan kabupaten/kota					
		7.1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2771	kilometer	DPUCKPP	
		7.2. Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	715125,75	kilometer	DPUCKPP	
		7.3. Panjang jembatan yg dibangun	Panjang jembatan yg dibangun	40,70	meter	DPUCKPP	
		7.4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	64896,33	kilometer	DPUCKPP	
		7.5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	425,20	meter	DPUCKPP	
		7.6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	64896,33	kilometer	DPUCKPP	
		7.7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	425,20	meter	DPUCKPP	
		7.8. Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	64896,33	kilometer	DPUCKPP	
		7.9. Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	425,20	meter	DPUCKPP	
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi					
		8.1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1	kegiatan	DPUCKPP	
		8.2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	1270	orang	DPUCKPP	
		8.3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1270	orang	DPUCKPP	
		8.4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ada	ada/tidak	DPUCKPP	

		8.10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak	ada/tidak	DPUCKPP	
		8.18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	47	jumlah	DPUCKPP	
		8.19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	570	jumlah	DPUCKPP	
		8.20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	47	jumlah	DPUCKPP	
		8.21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	47	jumlah	DPUCKPP	
		8.22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	570	jumlah	DPUCKPP	

		8.23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	jumlah	DPUCKPP	
		8.24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	jumlah	DPUCKPP	
		8.25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	jumlah	DPUCKPP	
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
4	Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota					
		1.1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	unit	DPUCKPP	
		1.2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	unit	DPUCKPP	
		1.3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Dibuat dalam bentuk daftar	0	jiwa	DPUCKPP	
		1.4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	unit	DPUCKPP	
		1.5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	unit	DPUCKPP	
		1.6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	unit	DPUCKPP	
		1.7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	unit	DPUCKPP	
		1.8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Dibuat dalam bentuk daftar	0	jiwa	BPBD	
		1.9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	3456	ha	DPUCKPP	
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
		2.1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	kk	Bag Pemerintahan	
		2.2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	kk	Bag Pemerintahan	
		2.3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	kk	Bag Pemerintahan	
		2.4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	kk	Bag Pemerintahan	

		2.5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	kk	Bag Pemerintahan		
		2.6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	ha	Bag Pemerintahan		
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani						
		3.1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	20,47	ha	DPUCKPP		
		3.2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	2958	unit	DPUCKPP		
		3.3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	51,90	ha	DPUCKPP		
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)						
		4.1. Jumlah rumah di kab/kota	Jumlah rumah di kab/kota	560906	unit	DPUCKPP		
		4.2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	2958	unit	DPUCKPP		
		4.3. Jumlah rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni	1806	unit	DPUCKPP		
		4.4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Jumlah rumah yang tidak dihuni	37312	unit	DPUCKPP		
		4.5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- Jumlah total unit rumah	$\frac{642,019 \times 100}{560,906} = 114.46$ 560,906	%	DPUCKPP		
		4.6. Jumlah rumah pembangunan baru	Jumlah rumah pembangunan baru	7716	unit	DPUCKPP		
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)						
		5.1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	193	unit	DPUCKPP		
		5.2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	679966	unit	PU Pengairan		
		5.3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	23665	unit	DPUCKPP		
		5.4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	23665	unit	DPUCKPP		
		5.5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	193	unit	DPUCKPP		
		5.6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	23665	unit	DPUCKPP		
		5.7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	89	cv/pt	DPUCKPP		
		5.8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah pengembang yang teregistrasi	89	cv/pt	DPUCKPP		
		5.9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	89	cv/pt	DPUCKPP		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan						
		1.1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah temuan dan laporan	225	jumlah	Satpol PP		
		1.2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1280	orang	Satpol PP		
		1.3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	17	buah	Satpol PP		
		1.4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	orang	Satpol PP		

		1.5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	ada	ada/tidak	Satpol PP	
		1.6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	ada/tidak	Satpol PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
		3.1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	$1 \times 100 = 100.00$ 1	%	BPBD	
		3.2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$581,604 \times 100 = 100.00$ 581,604	%	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		4.1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	$1 \times 100 = 100.00$ 1	%	BPBD	
		4.2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	$4 \times 100 = 100.00$ 4	%	BPBD	
		4.3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana	$465,169 \times 100 = 79.81$ 582,834	%	BPBD	
		4.4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$463,939 \times 100 = 79.77$ 581,604	%	BPBD	
		4.5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ----- x 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$581,604 \times 100 = 100.00$ 581,604	%	BPBD	
		4.6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan ----- x 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$134,021 \times 100 = 100.00$ 134,021	%	BPBD	

		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		5.1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	BPBD	
		5.2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	BPBD	
		5.3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- x 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	$\frac{640 \times 100}{640} = 100.00$ 640	%	BPBD	
		5.4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	$\frac{25 \times 100}{25} = 100.00$ 25	%	BPBD	
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
		6.1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	jumlah kegiatan operasi darurat non kebakaran	17	kegiatan	Satpol PP	
		6.2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ada	ada/tidak	Satpol PP	
		6.3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	ada/tidak	Satpol PP	
		6.4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	ada/tidak (dibuat dalam bentuk daftar)	ada	ada/tidak	Satpol PP	
		6.5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	dibuat dalam bentuk daftar	ada	ada/tidak	Satpol PP	
		6.6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	27	orang	Satpol PP	
		6.7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	11	orang	Satpol PP	

		6.8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	8	kegiatan	Satpol PP	
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
6	Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)					
		1.1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1767	jumlah	Dinsos PPKB	
		1.2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	5408	jumlah	Dinsos PPKB	
		1.3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	unit	Dinsos PPKB	
		1.4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	10234	orang	Dinsos PPKB	
		1.5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	unit	Dinsos PPKB	
		1.6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1460	orang	Dinsos PPKB	
		1.7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	14	unit	Dinsos PPKB	
		1.8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	118	orang	Dinsos PPKB	
		1.9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	84	orang	Dinsos PPKB	
		1.10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	39	jumlah	Dinsos PPKB	
		1.11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	2	jumlah	Dinsos PPKB	
		1.12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	118	orang	Dinsos PPKB	
		1.13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	6	orang	Dinsos PPKB	
		1.14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	242	orang	Dinsos PPKB	
		1.15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	696	orang	Dinsos PPKB	
		1.16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	404	orang	Dinsos PPKB	
		1.17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	orang	Dinsos PPKB	

		1.18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	1672	orang	Dinsos PPKB		
		1.19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	384	orang	Dinsos PPKB		
		1.20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	384	orang	Dinsos PPKB		
		1.21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	orang	Dinsos PPKB		
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota								
		2.1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	94	orang	Dinsos PPKB		
		2.2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	94	orang	Dinsos PPKB		
		2.3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	lokasi	Dinsos PPKB		
		2.4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	110	paket	Dinsos PPKB		
		2.5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	94	orang	Dinsos PPKB		
		2.6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	276	orang	Dinsos PPKB		
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						
		1.1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	sesuai	sesuai/ tidak sesuai	Disnakertrans Perin		
		1.2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100% Realisasi indikator - Target indikator ----- x 100% Realisasi	$\frac{5,916 \times 100}{6,000} = 98.60$	%	Disnakertrans Perin		
		1.3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	41	perusahaan	Disnakertrans Perin		
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi								
		2.1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ----- x 100% keseiurunan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	$\frac{38 \times 100}{845} = 4.50$	%	Disnakertrans Perin		

		2.2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	$\frac{100 \times 100}{190} = 52.63$	%	Disnakertrans Perin	
		2.3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- x 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	$\frac{190 \times 100}{1,078} = 17.63$	%	Disnakertrans Perin	
		2.4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- x 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	$\frac{11 \times 100}{54} = 20.37$	%	Disnakertrans Perin	
		2.5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- x 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	$\frac{46 \times 100}{54} = 85.19$	%	Disnakertrans Perin	
		2.6. Jumlah penganggur yang dilatih	Jumlah penganggur yang dilatih	1078	orang	Disnakertrans Perin	
		2.7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih pada tahun n	$\frac{911 \times 100}{1,078} = 84.51$	%	Disnakertrans Perin	
		2.8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- x 100% jumlah lulusan pada tahun n	$\frac{474 \times 100}{911} = 52.03$	%	Disnakertrans Perin	
		2.9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	$\frac{791 \times 100}{911} = 86.83$	%	Disnakertrans Perin	
		2.10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ----- x 100% Jumlah CPMI terdaftar	$\frac{786 \times 100}{786} = 100.00$	%	Disnakertrans Perin	
		2.11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	786	orang	Disnakertrans Perin	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		3.1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{38 \times 100}{3,568} = 1.07$	%	Disnakertrans Perin	
		3.2. Data tingkat produktivitas total	pertumbuhan ekonomi - (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja).	0	angka	Disnakertrans Perin	

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
		4.1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	$\frac{126 \times 100}{2,293} = 5.49$ 2,293	%	Disnakertrans Perin	
		4.2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	$\frac{59 \times 100}{90} = 65.56$ 90	%	Disnakertrans Perin	
		4.3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	90	lembaga	Disnakertrans Perin	
		4.4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang sudah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	$\frac{6 \times 100}{126} = 4.76$ 126	%	Disnakertrans Perin	
		4.5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	$\frac{3,514 \times 100}{3,568} = 98.49$ 3,568	%	Disnakertrans Perin	
		4.6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	$\frac{253 \times 100}{3,568} = 7.09$ 3,568	%	Disnakertrans Perin	
		4.7. Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja	0	kejadian	Disnakertrans Perin	
		4.8. Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan	2	kejadian	Disnakertrans Perin	
		4.9. Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan	0	kejadian	Disnakertrans Perin	
		4.10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	kejadian	Disnakertrans Perin	
		4.11. Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK	14	kejadian	Disnakertrans Perin	
		4.12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	142	orang	Disnakertrans Perin	
		4.13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	kejadian	Disnakertrans Perin	
		4.14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	ada	ada/tidak	Disnakertrans Perin	
		4.15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama ----- x 100% Jumlah kasus perselisihan	$\frac{9 \times 100}{19} = 47.37$ 19	%	Disnakertrans Perin	

		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota					
		5.1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	564	posisi	Disnakertrans Perin	
		5.2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1177	orang	Disnakertrans Perin	
		5.3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	31	jumlah	Disnakertrans Perin	
		5.4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kab/kota	0	orang	Disnakertrans Perin	
		5.5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	6	orang	Disnakertrans Perin	
		5.6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	lembaga	Disnakertrans Perin	
		5.7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	493	kegiatan	Disnakertrans Perin	
		5.8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	orang	Disnakertrans Perin	
		5.9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- x 100% Jumlah CPMI/CTKI	$\frac{786 \times 100}{786} = 100.00$ 786	%	Disnakertrans Perin	
		5.10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	786	orang	Disnakertrans Perin	
		5.11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- x 100% Jumlah PMI yang pulang	$\frac{7 \times 100}{1,068} = 0.66$ 1,068	%	Disnakertrans Perin	
		5.12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- x 100% Jumlah PMI/TKI	$\frac{786 \times 100}{786} = 100.00$ 786	%	Disnakertrans Perin	
		5.13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- x 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya	$\frac{26 \times 100}{1,068} = 2.43$ 1,068	%	Disnakertrans Perin	
		5.14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk ----- x 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Disnakertrans Perin	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1.1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	55	lembaga	Dinsos PPKB	
		1.2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	1	kegiatan	Dinsos PPKB	

		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten					
		2.1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	buah	Dinsos PPKB	
		2.2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	lembaga	Dinsos PPKB	
		2.3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten	$\frac{33 \times 100}{100} = 100.00$ 33	%	Dinsos PPKB	
		2.4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	lembaga	Dinsos PPKB	
		2.5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	lembaga	Dinsos PPKB	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)					
		3.1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	organisasi	Dinsos PPKB	
		3.2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	100	orang	Dinsos PPKB	
		3.3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	33	lembaga	Dinsos PPKB	
		3.4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	lembaga	Dinsos PPKB	
		3.5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3	kebijakan	Dinsos PPKB	
		3.6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	0	lembaga	Dinsos PPKB	
		3.7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ----- x 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	$\frac{31 \times 100}{100} = 100.00$ 31	%	Dinsos PPKB	
9	Pangan	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)					
		1.1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	ada/tidak	Dispertapang	
		1.2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	ada/tidak	Dispertapang	
		1.3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	ada/tidak	Dispertapang	

		1.4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	ada/tidak	Dispertapang		
		1.5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	ada/tidak	Dispertapang		
		1.6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	ada/tidak	Dispertapang		
		1.7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	ada/tidak	Dispertapang		
		1.8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	ada/tidak	Dispertapang		
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
		1.1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	$\frac{84 \times 100}{84} = 100.00$ 84	%	DPMPSTSP		
		1.2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ----- x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan pada perubahan landreform	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Bag Pemerintahan		
		1.3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee ----- x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Bag Pemerintahan		
		1.4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	$\frac{84 \times 100}{84} = 100.00$ 84	%	DPMPSTSP		
		1.5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	$\frac{303 \times 100}{327} = 92.66$ 327	%	Bag Pemerintahan		
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum						
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal						
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						

		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat					
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota					
		1.1. Hasil perhitungan kabupaten/ kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Hasil perhitungan kabupaten/ kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	70,61 (Indeks)	indeks	DLH	IKA, IKU, IKL masuk kategori "BAIK"
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota					
		2.1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	dibuat dalam bentuk daftar : 1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	99,85 %		DLH	Penanganan sampah di Kab. Bwi. telah dilakukan secara optimal
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
		3.1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota ----- x 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	$\frac{458 \times 100}{465} = 98.49$	%	DLH	7 (tujuh) izin dikembalikan karena pengikuti peraturan yang baru
		3.2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	$\frac{2 \times 100}{458} = 0.44$	%	DLH	
		3.3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui ----- x 100% Jumlah usulan MHA	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$	%	DLH	Tanah masyarakat adat milik pribadi
		3.4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah MHA yang ada	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$	%	DLH	Masih proses pembentukan MHA
		3.5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	$\frac{5 \times 100}{5} = 100.00$	%	DLH	

		3.6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	$\frac{10 \times 100}{10} = 100.00$ 10	%	DLH	Telah ditindaklanjuti 80%, sedangkan yang 20% masih proses
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Perekaman KTP-el					
		1.1. Penerbitan akta perkawinan	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% peristiwa perkawinan yang dilaporkan	$\frac{396 \times 100}{396} = 100.00$ 396	%	Dispenduk Capil	
		1.2. Penerbitan akta perceraian	jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% peristiwa perceraian yang dilaporkan	$\frac{139 \times 100}{139} = 100.00$ 139	%	Dispenduk Capil	
		1.3. Penerbitan akta kematian	jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% peristiwa kematian yang dilaporkan	$\frac{17,211 \times 100}{17,247} = 99.79$ 17,247	%	Dispenduk Capil	
		1.4. Penyajian data kependudukan	jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun ----- x 100% 2 tahun	$\frac{2 \times 100}{2} = 100.00$ 2	%	Dispenduk Capil	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
		3. Kepemilikan akta kelahiran					
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal					
		1.. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	desa	DPMPD	
		1.1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	desa	DPMPD	
		1.3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	lembaga	DPMPD	
		1.4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	desa	DPMPD	
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri					
		2.1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	13	desa	DPMPD	

		2.2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	13	desa	DPMPD		
		2.3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1318	lembaga	DPMPD		
		2.4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	-0.38	desa	DPMPD		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)						
		1.1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	TIDAK	ada/tidak	Dinsos PPKB		
		1.2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50%ri semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	25	tahun	Dinsos PPKB		
		1.3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	2	angka	Dinsos PPKB		
		1.4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) ----- x 100% jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{23.653 \times 100}{190,787} = 12.40$	%	Dinsos PPKB		
		1.5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23	instansi	Dinsos PPKB		
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		2.1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- x 100% Jumlah faskes	$\frac{68 \times 100}{100} = 100.00$ 68	%	Dinsos PPKB		
		2.2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ----- x 100% Jumlah pasangan usia subur	$\frac{56,597 \times 100}{231,248} = 24.47$ 231,248	%	Dinsos PPKB		
		2.3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	25	kelompok	Dinsos PPKB		

		2.4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ----- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	$\frac{7,311 \times 100}{43,941} = 16.64$	%	Dinsos PPKB	
		3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		3.1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar desa/kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	0	desa	Dinsos PPKB	
		3.2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- x 100% Jumlah keluarga PBI	$\frac{52,357 \times 100}{72,713} = 72.01$	%	Dinsos PPKB	
15	Perhubungan	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota					
		1.1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	$\frac{141 \times 100}{165} = 85.45$	%	Dishub	
		1.2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100% Jumlah kendaraan wajib uji	$\frac{25,196 \times 100}{36,096} = 69.80$	%	Dishub	
		1.3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyebrangan ----- x 100% Jumlah lintas penyebrangan dalam kabupaten/kota	$\frac{50 \times 100}{50} = 100.00$	%	Dishub	
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota					
		2.1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota	$\frac{9,148 \times 100}{10,618} = 86.15$	%	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1.1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{55 \times 100}{55} = 100.00$	%	Diskominfo	

		1.2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{55 \times 100}{100} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		1.3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	Ya	ya/tidak	Diskominfo	
2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi							
		2.1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ----- x 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	$\frac{1 \times 100}{100} = 100.00$ 1	%	Diskominfo	
		2.2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{55 \times 100}{100} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		2.3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	$\frac{55 \times 100}{100} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		2.4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah Layanan	$\frac{47 \times 100}{100} = 100.00$ 47	%	Diskominfo	
		2.5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	$\frac{7 \times 100}{100} = 14.89$ 7	%	Diskominfo	
		2.6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik	$\frac{163 \times 100}{100} = 100.00$ 163	%	Diskominfo	

		2.7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- x 100% layanan publik dan layanan administrasi	$\frac{47 \times 100}{100} = 100.00$ 47	%	Diskominfo	
		2.8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{55 \times 100}{100} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		2.9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{55 \times 100}{100} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		2.10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{55 \times 100}{100} = 100.00$ 55	%	Diskominfo	
		2.11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	$\frac{3,198 \times 100}{100} = 100.00$ 3,198	%	Diskominfo	
		2.12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	$\frac{9 \times 100}{100} = 16.36$ 55	%	Diskominfo	
		2.13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah ASN pengelola TIK	$\frac{11 \times 100}{100} = 100.00$ 11	%	Diskominfo	

		2.14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan -Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	ada	ada/tidak	Diskominfo		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						
		3.1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ----- x 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota	$\frac{74 \times 100}{100} = 100.00$ 74	%	Diskominfo		
		3.2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- x 100% Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota	$\frac{3,199 \times 100}{3,199} = 100.00$ 3,199	%	Diskominfo		
		3.3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP ----- x 100% Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	$\frac{3,199 \times 100}{3,199} = 100.00$ 3,199	%	Diskominfo		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas						
		1.1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam	$\frac{0 \times 100}{228} = 0.00$ 228	%	Diskop		

		1.2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Diskop	
		1.3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{868 \times 100}{868} = 100.00$ 868	%	Diskop	
		1.4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	$\frac{155 \times 100}{729} = 21.26$ 729	%	Diskop	
		1.5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{476 \times 100}{868} = 54.84$ 868	%	Diskop	
		1.6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	$\frac{1,335 \times 100}{172,100} = 0.78$ 172,100	%	Diskop	
		1.7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0 \times 100}{868} = 0.00$ 868	%	Diskop	
		1.9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{468 \times 100}{868} = 53.92$ 868	%	Diskop	
		1.10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0 \times 100}{868} = 0.00$ 868	%	Diskop	
		1.11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{0 \times 100}{868} = 0.00$ 868	%	Diskop	
		1.12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$\frac{531 \times 100}{868} = 61.18$ 868	%	Diskop	

		1.13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	$0 \times 100 = 0.00$ 868	%	Diskop		
2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha								
		2.1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	$11,576 \times 100 = 59.15$ 19,572	%	Diskop		
		2.2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$322 \times 100 = 0.19$ 168,264	%	Diskop		
		2.3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$182 \times 100 = 0.11$ 168,264	%	Diskop		
		2.4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	$534 \times 100 = 0.32$ 167,730	%	Diskop		
		2.5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- x 100% jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran	$15,628 \times 100 = 10.24$ 152,636	%	Diskop		
		2.6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$9,365 \times 100 = 5.57$ 168,264	%	Diskop		
		2.7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	$291 \times 100 = 0.17$ 168,264	%	Diskop		
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota						
		1.1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	16	fasilitas	DPMPSTP	Pemberian Insentif Penanaman Modal, 11 Item Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	

		1.2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	tidak ada	ada/tidak	DPMPTSP	draft SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	
		1.3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	1	dokumen	DPMPTSP		
		1.4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	2	kegiatan	DPMPTSP	Kegiatan Seminar bisnis/business forum	
		1.5. Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	2	kegiatan	DPMPTSP	Kegiatan Pameran Prov. Jawa Timur	
		1.6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	kegiatan	DPMPTSP	Penerimaan Misi Penanaman Modal dalam kunjungan Wakil Presiden RI, Mendagri dan Menparekraf RI	
		1.7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	5430	kegiatan	DPMPTSP		
		1.8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	5430	dokumen	DPMPTSP		
		1.9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kab/Kota	6.54216E+12	rupiah	DPMPTSP	Berdasarkan realisasi PMA dan PMDN	
		1.10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	5475	orang	DPMPTSP	107 Aparatur Penanaman Modal dan 5430 Perusahaan Penanam Modal	
		1.11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	109	perusahaan	DPMPTSP	07 Perusahaan LKPM Konstruksi, 22 Perusahaan LKPM Produksi	
		1.12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	45	permintaan	DPMPTSP		
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
		1.1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	908	orang	Dispora		
		1.2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	808	orang	Dispora		
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
		2.1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1522	orang	Dispora		
		2.2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	90	lembaga	Dispora		

		3. Peningkatan prestasi olahraga					
		3.1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan (Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.) (Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga.)	23	orang	Dispora	
		3.2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4	kegiatan	Dispora	
20	Statistik	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1.1. Tersedianya buku profil daerah	Tersedianya buku profil daerah	Ada	ada/tidak	Diskominfo	
		1.2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	3	kegiatan	Diskominfo	
		1.3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	dokumen	Diskominfo	
		1.4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	kegiatan	Diskominfo	
		1.5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	dokumen	Diskominfo	
		1.6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- x 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Diskominfo	
		1.7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah metadata indikator statistik sektoral ----- x 100% Jumlah indikator statistik sektoral	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Diskominfo	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah					
		1.1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada	$\frac{6 \times 100}{6} = 100.00$ 6	%	Diskominfo	
		1.2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jumlah SE yang ada	$\frac{9 \times 100}{163} = 5.52$ 163	%	Diskominfo	
		1.3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada	$\frac{10 \times 100}{163} = 6.13$ 163	%	Diskominfo	

		1.4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik diamankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS	$\frac{272 \times 100}{100} = 100.00$ 272	%	Diskominfo		
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya						
		1.1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	11 OPK	obyek	Disbudpar	Semua Objek Pemajuan Kebudayaan adalah Inventarisasi, pengamanan Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi	
		1.2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	4	obyek	Disbudpar		
		1.3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	4	obyek	Disbudpar		
		1.4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	25	buah	Disbudpar		
		1.5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemerinkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan " Jumlah CB dihapuskan	1	cagar budaya	Disbudpar		
		1.6. Perlindungan cagar budaya kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar)	3766	cagar budaya	Disbudpar		
		1.7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kab/kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar kab/kota	0	cagar budaya	Disbudpar		
		1.8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	26	cagar budaya	Disbudpar		
		1.9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	10	cagar budaya	Disbudpar		
		1.10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	3639	koleksi	Disbudpar		
		1.11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	1612	orang	Disbudpar		
		1.12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	5	orang	Disbudpar		
		1.13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	7	orang	Disbudpar		

		1.14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	7	tim	Disbudpar		
		1.15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	0	orang	Disbudpar		
		1.16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	27	orang	Disbudpar		
		1.17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kab/kota	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	1	orang	Disbudpar		
		1.18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	6	unit	Disbudpar		
		1.19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2	kegiatan	Disbudpar		
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						
		1.1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$\frac{1,286,836}{1,556,855} \times 100 = 82.66$	%	Perpus		
		1.2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	$\frac{989,821}{1,556,855} \times 100 = 63.58$	%	Perpus		
		1.3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$\frac{1,823}{1,556,855} \times 100 = 0.12$	%	Perpus		
		1.4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku	$\frac{140}{1,385} \times 100 = 10.11$	%	Perpus		
		1.5. Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemyarakatan gemar membaca di masyarakat	8647	orang	Perpus		
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						
		2.1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	2	dokumen	Perpus		
		2.2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2	dokumen	Perpus		
		2.3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	296	koleksi	Perpus		

24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1.1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh arsip aktif</p> <p>Â diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman</p> <p>naskah dinas internal instansiÂ Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif. Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	$\frac{2,170 \times 100}{2,170} = 100.00$		%	Perpus
		1.2. persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<p>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh arsip inaktif</p> <p>Â diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier.Â</p> <p>Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif. Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p>	$\frac{23,137 \times 100}{24,101} = 96.00$		%	Perpus
		1.3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<p>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- x 100%</p> <p>Jumlah seluruh arsip statisÂ</p> <p>Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012. Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012Â</p>	$\frac{19,679 \times 100}{34,768} = 56.60$		%	Perpus

		1.4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- x 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan kab/kota Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	$\frac{50 \times 100}{61,039} = 0.08$	%	Perpus	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		2.1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Ada	ada/tidak	Perpus	
		2.2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Ada	ada/tidak	Perpus	
		2.3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di kabupaten	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	ada	ada/tidak	Perpus	
		2.4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	ada	ada/tidak	Perpus	
		2.5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	ada	ada/tidak	Perpus	
		2.6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Ada	ada/tidak	Perpus	
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)					
		1.1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	50	RTP	Diskan	
		1.2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ----- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kab/kota	$\frac{5 \times 100}{10} = 50.00$	%	Diskan	
		1.3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	15	dokumen	Diskan	

		1.4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	360	orang	Diskan		
		1.5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun	2.472.016.000	ekor	Diskan		
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan						
		1.1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	170	entitas	Disbudpar		
		1.2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	99	sarana	Disbudpar		
		1.3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	55	dokumen	Disbudpar		
		1.4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	2145	orang	Disbudpar		
		1.5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5	kegiatan	Disbudpar		
		1.6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0	kegiatan	Disbudpar		
		1.7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	5	lembaga	Disbudpar		
		1.8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata	0	%	Disbudpar		
		1.9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- x 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{592 \times 100}{592} = 100.00$	%	Disbudpar		
		1.10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	72	lokasi	Disbudpar		
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota						
		3. Tingkat hunian akomodasi						
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku						
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD						
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
		1.1. Sarana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	191	sarana	Dispertapang		
		1.2. Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	65	prasarana	Dispertapang		
		1.3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	15	izin	Dispertapang		
		1.4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- x 100% Jumlah prasarana yang dibangun	$\frac{65 \times 100}{65} = 100.00$ 65	%	Dispertapang		

		1.5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{15 \times 100}{100} = 100.00$ 15	%	Dispertapang	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular					
		2.1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (pertanian dan penyakit hewan menular)	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- x 100% Luas area terkena bencana	$\frac{3 \times 100}{100} = 100.00$ 3	%	Dispertapang	
28	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1.1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ?5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	$\frac{240 \times 100}{240} = 100.00$ 240	%	Diskop	
		1.2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ?5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	$\frac{151 \times 100}{151} = 100.00$ 151	%	Diskop	
		1.3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- x 100% Jumlah gudang yang ada di kab/kota	$\frac{8 \times 100}{159} = 5.03$ 159	%	Diskop	
		1.4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :	$\frac{0 \times 100}{1} = 0.00$ 1	%	Diskop	
		1.4.a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ?2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri	$\frac{19 \times 100}{19} = 100.00$ 19	%	Diskop	
		1.4.b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ?2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri	$\frac{0 \times 100}{1} = 0.00$ 1	%	Diskop	
		1.4.c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ?2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri	$\frac{0 \times 100}{1} = 0.00$ 1	%	Diskop	

		1.5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota -----x 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer	$\frac{0 \times 100}{1} = 0.00$	%	Diskop	
		1.6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ?1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	$\frac{980 \times 100}{980} = 100.00$	%	Diskop	
		1.7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	100	nilai	Diskop	
		1.8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	4		Diskop	
2. Persentase Kinerja realisasi Pupuk							
		2.1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(bxc) \times 100$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kabupaten sebesar (90?ri RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	57	ton	Diskop	
3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku							
		3.1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera atau ditera ulang di wilayah Kab/kota	$\frac{13,075 \times 100}{95,314} = 13.72$	%	Diskop	
		3.2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	$\frac{0 \times 100}{1} = 0.00$	%	Diskop	
29	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten					
		1.1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$	%	Disnakertrans Perin	

		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
		2.1. Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur kabupaten (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) keterangan : penilaian bersyarat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	30% + 20% =50%		Disnakertrans Perin	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		3.1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{31 \times 100}{32} = 96.88$ 32	%	Disnakertrans Perin	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		4.1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	$\frac{1 \times 100}{1} = 100.00$ 1	%	Disnakertrans Perin	
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota					
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
		6.1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{66 \times 100}{17,893} = 0.37$ 17,893	%	Disnakertrans Perin	
30	Transmigrasi						
		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	1	lokasi	Disnakertrans Perin	
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	1	lokasi	Disnakertrans Perin	
		3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1	lokasi	Disnakertrans Perin	

**CAPAIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

No.	Jenis Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
			Jenis Data/Rumus	Capaian Kinerja	Satuan		
1	FPUP Perencanaan dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- X 100%	$\frac{72.610.366.931 \times 100}{30.935.932.545} = 23.47$	%	BPKAD	
			Jumlah APBD				
		2. Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100%	$\frac{52.002.315.693 \times 100}{85.916.020.000} = 0.06$	%	BPKAD	
			Jumlah PDRB non migas				
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP)	3665	level	Inspektorat	
			4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kapabilitas APIP (berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP)			
5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer Expenditures ----- X 100%	$\frac{26.763.277.858 \times 100}{28.961.221.518} = 92.41$	%	BPKAD			
	jumlah belanja APBD						
6. Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir	WTP		BPKAD	2011 = WDP, 2012 = WTP		
2	FPUP Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100%	$\frac{0 \times 100}{4.968} = 0.00$	%	Bagian PBJ	
			jumlah kontrak keseluruhan tahun n				
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- X 100%	$\frac{370 \times 100}{4.598} = 8.05$	%	Bagian PBJ	
Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif							
3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100%	$\frac{72.795.427.696 \times 100}{14.925.664.858} = 48.77$	%	Bagian PBJ			
	Total belanja langsung						
3	FPUP Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100%	$\frac{898 \times 100}{1.926} = 46.63$	%	BKD	
			Sejumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100%	$\frac{79 \times 100}{1.926} = 4.10$	%	BKD			
	Sejumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						

		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{79}{79} \times 100 = 100.00$ 79	%	BKD	
4	FPUP Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu	$\frac{30.935.932.545}{33.147.304.865} \times 100 = 93.33$ 33,147,304,865	%	BPKAD	
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- X 100% total PAD dalam APBD dikurangi satu	$\frac{52.002.315.693}{50.589.107.518} \times 100 = 102.79$ 50,589,107,518	%	BPKAD	
		3. Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (ya/tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (ya/tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (ya/tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (ya/tidak)	ya	ya/tidak	BPKAD	
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	$\frac{38.781.230.789}{31.406.389.046} \times 100 = 12.35$ 31,406,389,046	%	BPKAD	
5	FPUP Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	$\frac{30.934.930.326}{33.147.304.865} \times 100 = 93.33$ 33,147,304,865	%	BPKAD	
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	$\frac{12}{12} \times 100 = 100.00$ 12	%	BPKAD	